



PEMERINTAH KAB. JOMBANG
KECAMATAN PERAK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN PERAK TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	15
1.4. Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	30
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	63
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	65
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	67
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	69
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	77
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	81
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	84
3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya	86
3.2. Realisasi Anggaran	105
BAB IV PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan.....	117
4.2. Inovasi dan Penghargaan.....	117
4.3. Upaya Perbaikan	121
LAMPIRAN	125
1. Perjanjian Kinerja	125
2. Penetapan IKU.....	125
3. KKPT	125
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	125
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.....	125

6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	125
7. Pengukuran Kinerja.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja secara sistematis dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. LKJIP disusun untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta hasil pengukuran indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara terukur dan objektif.

Kecamatan Perak sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Perak mencakup penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang seluruhnya harus dipertanggungjawabkan melalui pengukuran kinerja yang sistematis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Perak Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, antara lain Rencana Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Kecamatan Perak Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran secara transparan mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Perak sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Melalui penyusunan LKJIP Kecamatan Perak Tahun 2025 diharapkan dapat terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan melalui kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil pembangunan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel..

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- g. Pengelolaan kearsipan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;

- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
 - Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan aprogram dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

- a. Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

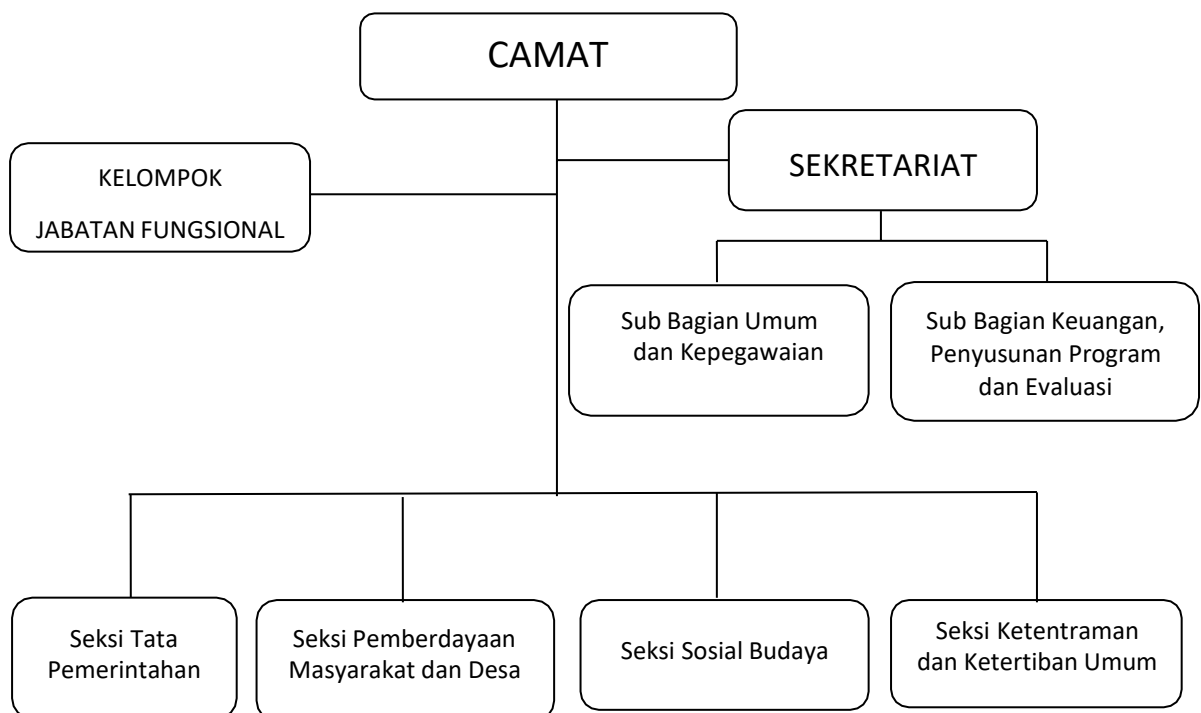
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanankan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Perak



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Perak, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Perak Kabupaten Jombang per bulan Januari 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV
Kecamatan Perak

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. SUPRIYONO	197010131992011011	Camat
2	ABDUL WAKHID, SE	196812011994031006	Sekretaris Kecamatan
3	SUHEDI,S.IP	19670128 1989121001	Kasi Pemerdayaan Masyarakat Desa
4.	DINI NURFIBRIANY, S.E., MM	198302272011012002	Kasi Sosial budaya
5.	IDA AYU NURSANTI,SE	198012042006042025	Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
6.	BAGUS RACHMAT, S.IP	198509282005011001	Kasubag Keuangan Penyusunan Program,dan Evaluasi

Tabel 1.2

Pegawai Jabatan Staf/Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	AHMAD SHOLI	19680812 200604 1 007	Pengadministrasi Perkantoran
2	YUNI SUSILAWATI	19790626 201001 2 001	Pengolah Data dan Informasi
3	TITIK ZAKIYAH, SE	19680110 201001 2 001	Pengolah Data dan Informasi
4	DANY EKA NOVITASARI, A.Md.Keb	198401032017042003	Pengolah Data dan Informasi
5	IRFAN YUDIANTO	19691124 200906 1 002	Operator Layanan Operasional

No	Nama	NIP	Jabatan
6	SLAMET	19670323 200801 1 009	Operator Layanan Operasional
7	AMBAR SULISTYOWATI	19780601 200901 2 002	Pengadministrasi Perkantoran
8	NURCHOLIS	19670607 20070 1 1026	Operator Layanan Operasional
9	SAIFUDIN ZUHRI	19730308 200906 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	3
4	III/c	2
5	III/b	1
6	III/a	6
7	II/c	1
8	II/a	1

Berdasarkan Tabel 1.3, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Perak menunjukkan distribusi pegawai yang tersusun secara hierarkis berdasarkan golongan/ruang. Pada level tertinggi, jabatan Camat berada pada golongan IV/b sebagai pimpinan perangkat daerah, serta Sekretaris Kecamatan pada golongan IV/a yang berperan dalam pengoordinasian administrasi pemerintahan.

Selanjutnya, pada level manajemen menengah, terdapat pegawai pada golongan III yang tersebar dari III/d hingga III/a, serta golongan II dari II/c hingga II/a. Komposisi ini mencerminkan ketersediaan sumber daya aparatur yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajerial, administratif, dan teknis operasional kecamatan.

Pada level operasional, terdapat dukungan dari pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan rutin.

Keberadaan pegawai pada level ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung dalam penyelenggaraan layanan publik.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai di Kecamatan Perak telah membentuk struktur organisasi yang cukup representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Namun demikian, jumlah pegawai yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya ideal apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan dan penguatan sumber daya manusia secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi kinerja organisasi.

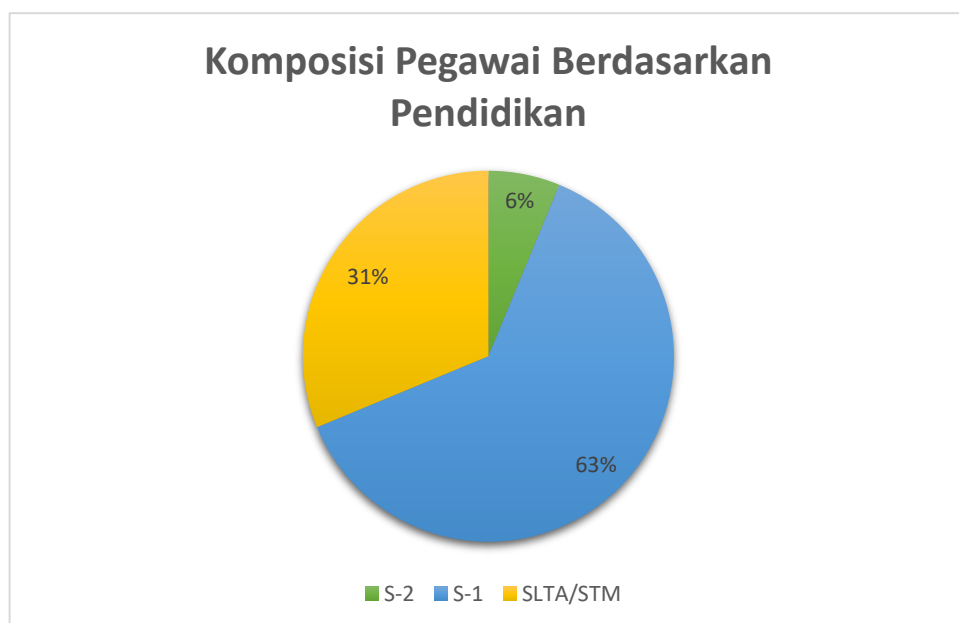
Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	NIP	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	19701013 199201 1 001	Drs. SUPRIYONO	Camat Perak	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
2	19681201 199403 1 006	ABDUL WAKHID, SE	Sekretaris Kecamatan Perak	S-1/Sarjana - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	
3	19670128 198912 1 001	SUHEDI, S.IP.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
4	19910907 201505 1 001	DWINDRA SETYO NUGROHO, S.IP	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	S-1/Sarjana - S-1 ILMU POLITIK	
5	19801204 200604 2 025	IDA AYU NURSANTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	S-1/Sarjana - S-1 MANAJEMEN	
6	19850928 200501 1 001	BAGUS RACHMAT, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	S-1/Sarjana - ILMU PEMERINTAHAN	
7	19680110 201001 2 001	TITIK ZAKIYAH, S.E.	Pengolah Data Dan Informasi	S-1/Sarjana - S-1 MANAJEMEN	
8	19730308 200906 1 001	SAIFUDDIN ZUHRI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1/Sarjana - S-1 MANAJEMEN	
9	19790626 201001 2 001	YUNI SUSILAWATI, S.IP	Pengolah Data Dan Informasi	S-1/Sarjana - ILMU PEMERINTAHAN	
10	19680812 200604 1 007	AHMAD SHOLI	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA - SMA ILMU SOSIAL	

No.	NIP	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
11	19670323 200801 1 009	SLAMET	Operator Layanan Operasional	SLTA - SMA ILMU ILMU BIOLOGI	
12	19780601 200901 2 002	AMBAR SULISTYOWATI	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA - SMEA ADMINISTRASI PERKANTORAN	
13	19840103 201704 2 003	DANY EKA NOVITASARI, S.Tr Keb., Bdn	Pengolah Data Dan Informasi	S-1/Sarjana - S-1 PROFESI BIDAN	
14	198302272011012002	DINI NURFIBRIANY, S.E., MM	Kepala Seksi Sosial budaya	S-2/Sarjana - S-2 Manajemen	
15	19691124 200906 1 002	IRFAN YUDIANTO	Operator Layanan Operasional	SLTA - SMA ILMU ILMU BIOLOGI	
16	19670607 200701 1 026	NUR CHOLIS	Operator Layanan Operasional	SLTA - STM BANGUNAN	

Berdasarkan hasil pengolahan data pegawai Kecamatan Perak per Januari 2025, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Dari total **16 pegawai**, sebanyak **1 Pegawai (6,25%)** memiliki Pendidikan **Strata 2 (S2)**, **10 pegawai (62,5%)** memiliki pendidikan **Strata 1 (S1)**, sedangkan **5 pegawai (31,25%)** masih berkualifikasi **SLTA atau sederajat**. Data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana berikut :

Gambar 1.1 Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Struktur pendidikan ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur Kecamatan Perak secara umum telah memenuhi kebutuhan kompetensi dasar birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam prinsip profesionalitas ASN dan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Ditinjau dari bidang keilmuan, pegawai dengan pendidikan S2 dan S1 didominasi oleh disiplin ilmu yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, dan Ilmu Politik. Dominasi bidang keilmuan tersebut mencerminkan kesesuaian antara kompetensi akademik pegawai dengan fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan kecamatan. Kondisi ini mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pembangunan wilayah.

Sementara itu, pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA masih memiliki peran penting terutama pada fungsi administrasi operasional dan pelayanan teknis. Namun demikian, secara regulatif peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal maupun pengembangan kompetensi berbasis pelatihan tetap diperlukan untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan pengembangan karier ASN dan standar kompetensi jabatan. Proporsi pegawai SLTA yang masih mencapai lebih dari sepertiga jumlah ASN menunjukkan adanya ruang peningkatan kualitas SDM aparatur melalui program tugas belajar, izin belajar, maupun pelatihan teknis administrasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan ASN Kecamatan Perak dapat dikategorikan **cukup memadai namun masih perlu penguatan**, terutama dalam peningkatan proporsi pegawai berpendidikan tinggi dan kesesuaian bidang keilmuan dengan kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan kualifikasi pendidikan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan public

Gambar 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Gender



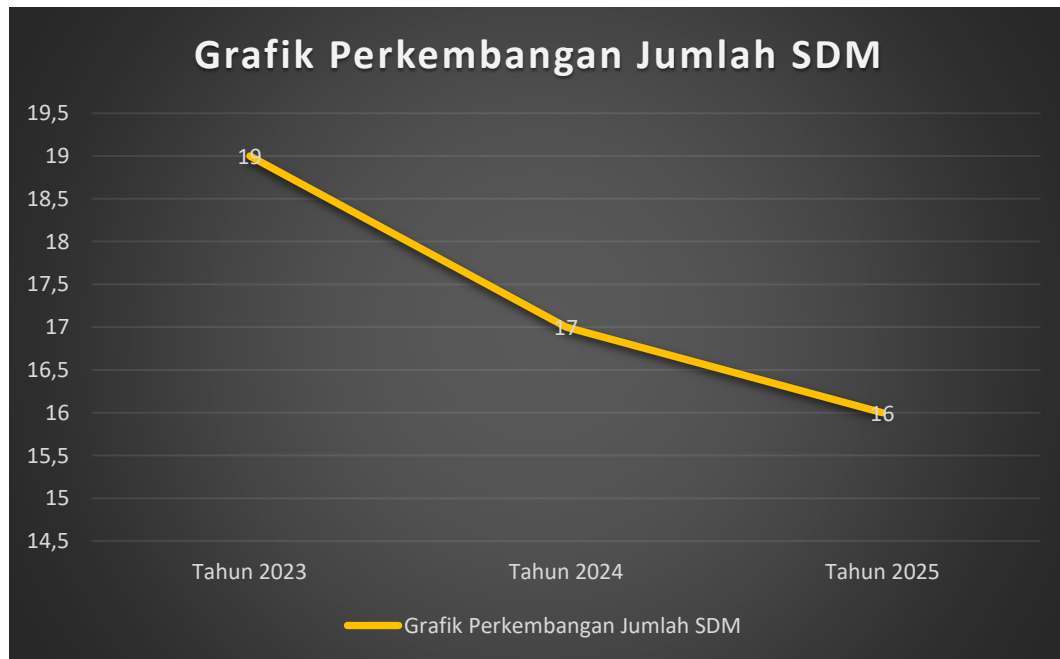
Berdasarkan hasil pengolahan data pegawai Kecamatan Perak keadaan bulan Januari Tahun 2025, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pegawai didominasi oleh pegawai **laki-laki sebanyak 11 orang (69%)**, sedangkan pegawai **perempuan berjumlah 5 orang (31%)** dari total **16 pegawai**. Struktur komposisi gender tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan pegawai perempuan masih lebih kecil dibandingkan pegawai laki-laki, meskipun secara umum masih dalam batas yang wajar bagi organisasi perangkat daerah tingkat kecamatan.

Dari perspektif teknokratik, komposisi gender yang ada masih mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara efektif karena distribusi pegawai tetap mencukupi untuk menjalankan fungsi pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, keseimbangan gender merupakan salah satu aspek penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan karena keberagaman sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Secara regulatif, prinsip kesetaraan kesempatan dalam manajemen ASN sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya aparatur mendorong agar pengisian jabatan dan pengembangan karier tidak membedakan jenis kelamin, melainkan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Oleh karena itu, komposisi pegawai Kecamatan Perak saat ini dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan pegawai ke depan dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan kesetaraan kesempatan

bagi pegawai laki-laki maupun perempuan.

Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Jumlah Pegawai 2023-2025



Berdasarkan grafik perkembangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Perak Tahun 2023–2025, terlihat adanya tren penurunan jumlah pegawai secara bertahap. Pada Tahun 2023 jumlah SDM tercatat sebanyak 19 orang, kemudian menurun menjadi 17 orang pada Tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 16 orang pada Tahun 2025.

Penurunan jumlah SDM sebesar 3 orang dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan adanya dinamika kepegawaian yang dapat disebabkan oleh faktor purna tugas. Kondisi ini berdampak langsung terhadap beban kerja pegawai yang tersisa, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan desa, serta koordinasi pembangunan wilayah.

Meskipun terjadi pengurangan jumlah personel, Kecamatan Perak tetap berkomitmen menjaga kinerja organisasi melalui optimalisasi pembagian tugas, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Strategi yang dilakukan antara lain dengan penyesuaian beban kerja, peningkatan kapasitas pegawai melalui pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, kondisi keterbatasan SDM menjadi

tantangan sekaligus pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi kerja. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh kualitas manajemen kinerja, efektivitas koordinasi, serta komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, tren penurunan SDM ini menjadi perhatian strategis bagi perencanaan kepegawaian ke depan, guna memastikan keseimbangan antara beban tugas dan kapasitas sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Perak secara berkelanjutan.

1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Peran strategis Kecamatan Perak dalam periode 2025–2029 tidak hanya diposisikan sebagai entitas administratif, tetapi sebagai perangkat daerah kewilayahan yang menjalankan mandat atribusi dan delegasi kewenangan Bupati sesuai kerangka regulasi nasional dan daerah. Dalam konteks Kabupaten Jombang, Kecamatan Perak berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintahan yang menjembatani kebijakan makro daerah dengan implementasi operasional di tingkat desa. Peran ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara regulatif, penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kecamatan Perak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan konsistensi vertikal antara dokumen perencanaan nasional, RPJMD Kabupaten, hingga Renja tahunan. Kecamatan Perak bertanggung jawab mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang terukur, berbasis kinerja, serta berorientasi pada hasil (outcome-oriented).

Dalam dimensi tata kelola, Kecamatan Perak berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum, pembina dan pengawas administrasi desa, serta fasilitator pelayanan publik terpadu (PATEN). Fungsi ini menempatkan kecamatan sebagai pusat integrasi kebijakan sektoral di wilayah,

termasuk koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Peran koordinatif tersebut menjadi krusial dalam pengendalian isu strategis kewilayahan seperti penanggulangan bencana banjir, percepatan penurunan stunting, serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya, dalam kerangka transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif sebagaimana menjadi mandat RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2029, Kecamatan Perak memegang fungsi akseleratif dalam mendorong digitalisasi layanan, peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah kecamatan dan desa. Peran ini bersifat strategis karena kecamatan merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki legitimasi struktural untuk mengharmonisasikan kepentingan pemerintah daerah dan kebutuhan riil warga.

Dengan demikian, peran strategis Kecamatan Perak dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama: (1) dimensi regulatif, sebagai pelaksana kewenangan yang dilimpahkan sesuai peraturan perundang-undangan; (2) dimensi koordinatif, sebagai penghubung dan pengendali integrasi kebijakan lintas desa dan lintas sektor; serta (3) dimensi pelayanan publik, sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan administratif yang cepat, transparan, dan adaptif. Optimalisasi ketiga dimensi tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Perak.

1.4. Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah kewilayahan di lingkungan Kabupaten Jombang, Kecamatan Perak menghadapi sejumlah isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja tahun 2025. Identifikasi isu ini dilakukan dengan mempertimbangkan mandat regulatif, kondisi faktual sumber daya, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan prioritas kinerja dan pengukuran capaian sebagaimana dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2025.

Isu strategis pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Jumlah pegawai yang tersedia belum sepenuhnya

memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Kondisi ini berdampak pada tingginya intensitas kerja, keterbatasan pengembangan inovasi layanan, serta potensi penurunan efektivitas fungsi koordinatif dan pembinaan desa. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah, sehingga penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menjamin pencapaian indikator kinerja secara optimal.

Isu kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas dan modernisasi pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah menunjukkan perbaikan dalam kecepatan dan kemudahan layanan, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi digitalisasi, standardisasi prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perspektif sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas layanan yang terukur dan berbasis hasil menjadi tuntutan utama.

Isu ketiga adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan memiliki fungsi strategis sebagai simpul koordinasi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemerintah desa. Tantangan yang dihadapi meliputi disparitas kapasitas administrasi desa, kebutuhan harmonisasi perencanaan pembangunan, serta penguatan pengendalian dan evaluasi program di tingkat wilayah. Dalam konteks perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kecamatan dituntut memastikan keterpaduan perencanaan dan konsistensi implementasi program secara vertikal dan horizontal.

Isu keempat berkaitan dengan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, khususnya banjir, mengingat karakteristik geografis Kecamatan Perak sebagai wilayah dataran rendah beririgasi teknis. Kerentanan ini memerlukan peningkatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (*Forkopimcam*), serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko. Ketahanan wilayah menjadi variabel penting yang mempengaruhi stabilitas sosial dan keberlanjutan pelayanan publik.

Isu kelima adalah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Tata ruang pelayanan yang belum sepenuhnya representatif, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kerja berdampak pada kenyamanan dan efektivitas pelayanan. Penguatan infrastruktur pelayanan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut, pelaksanaan kinerja Kecamatan Perak Tahun 2025 diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi koordinasi dan pembinaan desa, penguatan ketahanan wilayah, serta pembenahan sarana prasarana pendukung kinerja. Isu strategis ini menjadi landasan analisis dalam evaluasi capaian kinerja dan perumusan langkah perbaikan berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Kabupaten Jombang. Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai periode transisi perencanaan pembangunan daerah yang menjembatani pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan penyusunan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyesuaian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan, konsistensi kebijakan, serta efektivitas pencapaian sasaran strategis daerah pada awal masa pemerintahan baru.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Kecamatan Perak melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap seluruh dokumen perencanaan dan dokumen kinerja Tahun 2025. Penyesuaian tersebut meliputi penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 yang bertransisi ke Renstra Tahun 2025–2029, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Proses ini dilaksanakan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap kerangka regulasi nasional, kemampuan fiskal daerah, serta evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

Secara teknokratik, integrasi kebijakan pada masa transisi ini diarahkan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Kecamatan Perak Tahun 2025 tetap relevan, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang baru. Dengan demikian, perencanaan strategis Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan kesinambungan dokumen perencanaan sebelumnya, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebijakan dan arah pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap

berada dalam koridor hukum, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.

Secara normatif, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar pengukuran kinerja. Selain itu, dokumen ini disusun dalam kerangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga setiap sasaran dan indikator kinerja dirumuskan secara terukur dan berorientasi hasil (outcome).

2.1.1 Rencana Strategis

Pada periode Renstra 2024–2026, arah kebijakan Kecamatan Perak difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan desa. Memasuki periode Renstra 2025–2029, arah tersebut dipertegas melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis kinerja, dengan menitikberatkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan;
2. Penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;
4. Penguatan stabilitas wilayah melalui koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Perak disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kewilayahan, Kecamatan Perak memiliki peran strategis dalam

mendukung pencapaian visi pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, koordinatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Tujuan strategis Kecamatan Perak dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.”

Tujuan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kecamatan Perak dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sebagaimana diarahkan dalam kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan meliputi:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;**
- 2. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.**

Sasaran strategis tersebut mencerminkan komitmen Kecamatan Perak dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kecamatan Perak diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terukur dan signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah melalui perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta dukungan sarana dan prasarana aparatur.

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program ini menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan mendukung efektivitas pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Perak.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Perak. Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan serta kemudahan akses pelayanan masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat kelembagaan masyarakat desa. Kegiatan :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Program ini bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan serta memperkuat kelembagaan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan stabilitas wilayah melalui koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Program ini bertujuan menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaFasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Perak melalui peningkatan koordinasi lintas sektor.

Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program ini bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Perak serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja perangkat daerah.

Tujuan strategis Kecamatan Perak awal Tahun 2025, Kecamatan Perak mengampu tujuan pembangunan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan pembangunan Kecamatan Perak disesuaikan dengan dokumen RPJMD tersebut melalui penyusunan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan serta sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja peran

2.1.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2025	Target Perubahan Renja 2025	Bertambah/ (Berkurang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	100 Persen	-
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	100 Persen	-
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	-
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	100 Persen	-
	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 Persen	100 Persen	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	16 Orang/bulan	(2 Orang/Bulan)
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Perak	0 Persen	0 Persen	
Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2025	Target Perubahan Renja 2025	Bertambah/ (Berkurang)
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	-
Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	
Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 unit	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	85	85	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2025	Target Perubahan Renja 2025	Bertambah/ (Berkurang)
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 persen	100 persen	-
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100 Persen	100 Persen	
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11 Desa	11 Desa	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78 Lembaga Kemasyarakatan	78Lembaga Kemasyarakatan	-
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkaitke Instansi Terkait	100 Persen	100 Persen	-
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait Daerah	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibumyang ditindaklanjuti instansi terkait	100 Persen	100 Persen	-
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renja 2025	Target Perubahan Renja 2025	Bertambah/ (Berkurang)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen	4 Dokumen	
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 Laporan	4 Laporan	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	-
Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11 Desa	11 Desa	-
Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	-

Sumber: Renja Perubahan 2025 Kecamatan Perak

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Kecamatan Perak merupakan dokumen komitmen kinerja tahunan antara Camat Perak selaku pimpinan

perangkat daerah dengan Bupati Jombang selaku atasan langsung, yang disusun dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi instrumen formal untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus manajemen kinerja yang terintegrasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan melalui penandatanganan oleh Camat Perak dan Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2025.

1. Tahapan Formulasi

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ada beberapa tahapan formulasi sebagaimana berikut :

a. Penelaahan Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diawali dengan penelaahan dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Kecamatan Perak Tahun 2025, serta Dokumen APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025. Penelaahan ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi antara tujuan strategis, sasaran, indikator kinerja, program dan dukungan anggaran. Selanjutnya dilakukan penurunan sasaran strategis ke dalam indikator kinerja tahunan yang terukur, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penurunan Sasaran Strategis ke Indikator Kinerja

Tahun 2025 juga merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu masa peralihan dari dokumen perencanaan sebelumnya menuju dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, dimana hal tersebut berpengaruh pada perubahan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Perak pada di tahun 2025. Adapun penjelasan terkait transisi perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel xx. Perbandingan Tujuan dan Sasaran Kecamatan pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak			

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Perbandingan antara Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian yang bersifat substansial pada rumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Perak. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah serta penajaman orientasi kinerja berbasis hasil (result oriented performance).

Pada PK Awal Tahun 2025, tujuan yang ditetapkan adalah “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan. Sasaran yang mendukung tujuan tersebut meliputi peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Perak, yang diukur melalui Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak, serta peningkatan kualitas layanan publik yang diukur melalui Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan. Struktur ini menunjukkan bahwa

fokus awal Perjanjian Kinerja lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas internal dan reformasi birokrasi sebagai pengungkit utama peningkatan kinerja.

Sementara itu, dalam PK Perubahan Tahun 2025 terjadi reformulasi tujuan menjadi “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.” Perubahan ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari orientasi akuntabilitas semata menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Indikator yang digunakan juga mengalami penyesuaian menjadi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, yang lebih menggambarkan capaian kinerja secara komprehensif.

Pada level sasaran, PK Perubahan menetapkan dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Dibandingkan dengan PK Awal, struktur sasaran dalam PK Perubahan menjadi lebih sistematis dan terklasifikasi dengan jelas antara aspek pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Reformulasi ini mempertegas bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi outcome utama, sedangkan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif diposisikan sebagai prasyarat (enabling factor) untuk mencapai kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Secara konseptual, perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan arsitektur kinerja, yaitu:

- Tujuan dirumuskan lebih operasional dan kontekstual sesuai tugas kecamatan;
- Sasaran dipisahkan secara tegas antara aspek pelayanan dan tata kelola;
- Indikator disesuaikan agar lebih mencerminkan kinerja substantif, bukan hanya kinerja administratif.

c. Penetapan Target Tahunan

Penetapan target kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu target tahunan dalam Renstra 2025–2029, capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai baseline, kemampuan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2025, serta rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Tahun 2025 merupakan tahun transisi menuju implementasi penuh RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, sehingga penetapan target dilakukan dengan pendekatan penyesuaian yang tetap menjaga kesinambungan kinerja dan arah kebijakan pembangunan daerah.

d. Harmonisasi dan Validasi Internal

Harmonisasi dan validasi internal merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan konsistensi, keterukuran, serta akuntabilitas indikator dan target kinerja sebelum dokumen ditetapkan secara formal. Dalam praktiknya, harmonisasi dilakukan melalui rapat koordinasi internal yang melibatkan Camat, Sekretaris Kecamatan, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta para Kepala Seksi. Pada tahap ini dilakukan penelaahan terhadap rumusan tujuan, sasaran dan indikator. Harmonisasi juga mencakup penyesuaian redaksional agar indikator bersifat outcome-oriented (berorientasi hasil), bukan sekadar output kegiatan.

Setelah dilakukan harmonisasi, tahapan berikutnya adalah validasi internal. Melalui validasi internal, perangkat daerah memastikan bahwa indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kinerja substantif dan bukan sekadar formalitas administratif

2. Sumber data

Sumber data merupakan komponen fundamental dalam sistem pengukuran kinerja karena menentukan tingkat validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas capaian indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam konteks Kecamatan Perak, sumber data disusun secara sistematis untuk mendukung pengukuran sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025.

Penetapan sumber data dilakukan pada saat formulasi indikator kinerja dan menjadi bagian dari proses validasi internal untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki dukungan data yang sah dan dapat diverifikasi. Sumber data dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2025 dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:

a. Data Internal Perangkat Daerah

Data internal berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, antara lain:

- Laporan realisasi program dan kegiatan;
- Laporan keuangan perangkat daerah;
- Rekapitulasi pelayanan administrasi (PATEN);
- Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Data internal ini digunakan untuk mengukur indikator yang bersifat operasional dan administratif, seperti capaian aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan desa.

b. Data Hasil Evaluasi Eksternal

Data eksternal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau instansi pengawas dan masyarakat pengguna layanan, antara lain:

- Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah;
- Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Data ini digunakan untuk mengukur indikator strategis seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik. Karena bersumber dari evaluasi independen, data ini memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi.

c. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen ini menjadi sumber data acuan dan baseline, meliputi:

- Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029;
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- Dokumen APBD Tahun 2025;

- Dokumen Perjanjian Kinerja dan PK Perubahan Tahun 2025.

Dokumen tersebut digunakan untuk memastikan konsistensi antara target yang ditetapkan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

3. Penanggungjawab Data.

Penanggung jawab data merupakan unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena menentukan kejelasan otoritas, tanggung jawab, dan keterlacakan (traceability) informasi kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penetapan penanggung jawab data dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja memiliki unit atau pejabat yang secara administratif dan substantif bertanggung jawab atas keabsahan dan ketepatan datanya. Penanggung jawab data kinerja ditetapkan secara berjenjang sesuai struktur organisasi, yaitu :

- Penanggung jawab utama: Camat;
- Koordinator teknis: Sekretaris Kecamatan;
- Pelaksana dan penyedia data: Kepala Seksi/Kepala Subbagian sesuai bidang tugas masing-masing;
- Pengelola pelaporan kinerja: Pejabat/Tim penyusun LKJIP.

Tanggung jawab tersebut mencakup aspek akurasi, validitas, ketepatan waktu penyampaian, serta konsistensi data dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Perak tahun n	Hasil Evaluasi AKIPKec. Perak	Camat Perak
		Definisi Operasional : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil survey IKM dan IPP Kecamatan Perak	Camat Perak
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan			

		masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017)			
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas secara substantif, IKU Kecamatan Perak Tahun 2025 terdiri atas dua indikator utama yang merepresentasikan fokus kinerja kecamatan, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator pertama adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Perak, yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat kecamatan. Nilai evaluasi AKIP diperoleh dari hasil penilaian terhadap berbagai komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta

evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja. Nilai ini mencerminkan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja yang diterapkan oleh kecamatan serta menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja. Sumber data indikator ini berasal dari hasil evaluasi AKIP Kecamatan Perak, dengan Camat Perak sebagai penanggung jawab utama atas pencapaian indikator tersebut.

Indikator kedua adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak, yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. IKPP merupakan indikator komposit yang diperoleh dari penggabungan berbagai ukuran kinerja pelayanan publik, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). IKM menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik, yang diukur melalui survei berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan kementerian terkait. Survei tersebut mencakup beberapa unsur penilaian pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif pelayanan, kualitas produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, mekanisme penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Sementara itu, IPP merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih luas dengan memperhatikan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Perak, yaitu :

Tabel 2.3

Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	FORMULASI
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparat	Persentase rata-rata capaian kinerja aparat	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec Perak -----x100% Jumlah PNS Kec Perak
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100% Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- x100% Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi	19 orang/bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi tahun n
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100% Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	8 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi Dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Pengadaan sarana dan prasarana yang ditargetkan

1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	58 unit	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100% Jumlah perencanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 Laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik -----x100% Jumlah Barang milik daerah
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n

1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	24 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara tahun n
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	86,3	Nilai PATEN Kecamatan Perak tahun n
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang di verifikasi -----x100% Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
3.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	12 Laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

	dan Peraturan Kepala Daerah				
--	--------------------------------	--	--	--	--

4. Dasar Penetapan Target

Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Perak dilakukan secara rasional, terukur, dan berbasis data dengan memperhatikan prinsip perencanaan kinerja yang akuntabel. Target tidak ditetapkan secara normatif atau spekulatif, melainkan melalui analisis terhadap capaian sebelumnya, kapasitas sumber daya, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara umum, dasar penetapan target Tahun 2025 mempertimbangkan beberapa aspek berikut :

a. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Target indikator strategis mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra menjadi kerangka makro penetapan target tahunan, sehingga target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari periode perencanaan jangka menengah tersebut. Dengan demikian, target tahunan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari trajektori pencapaian target lima tahunan.

b. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Baseline)

Penetapan target dilakukan dengan memperhatikan realisasi indikator pada tahun sebelumnya sebagai baseline. Analisis tren capaian digunakan untuk menentukan tingkat peningkatan yang realistis dan menantang (realistic but challenging).

c. Kapasitas Sumber Daya dan Dukungan Anggaran

Target kinerja juga mempertimbangkan kemampuan riil perangkat daerah, meliputi:

- Ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2025;
- Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Dukungan sistem administrasi dan teknologi informasi.

Analisis ini memastikan bahwa target yang ditetapkan sejalan dengan kapasitas fiskal dan administratif Kecamatan Perak.

d. Standar dan Kebijakan Nasional/Daerah

Untuk indikator berbasis indeks seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik, target ditetapkan dengan mengacu pada standar evaluasi yang berlaku di tingkat kabupaten maupun nasional. Penyesuaian dilakukan agar target mendukung peningkatan nilai AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.

Dengan mempertimbangkan aspek perencanaan jangka menengah, capaian baseline, kapasitas sumber daya, kebijakan evaluasi, serta hasil validasi internal, target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Perak ditetapkan secara terukur, realistis, dan akuntabel.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	74,80
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8,18

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.015.501.054
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Perak	85,3	5.813.750

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	190.989.600
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	12.120.500
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	5.700.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	156.551.300

Dari tabel diatas secara substantif, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan serta meningkatnya kualitas layanan public dengan indicator dan target sebagai berikut:

- e. Sasaran pertama diukur melalui indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak dengan target sebesar 74,80, yang mencerminkan kualitas implementasi manajemen kinerja mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
- f. Sasaran kedua diukur melalui Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak dengan target 8,18, yang menunjukkan tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang berlaku.

Kedua sasaran tersebut menegaskan bahwa fokus kinerja Tahun 2025 diarahkan pada penguatan tata kelola internal sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan enam program utama yang dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk meningkatkan capaian kinerja aparatur dengan target persentase rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen dan didukung anggaran terbesar, yang menunjukkan peran strategisnya dalam menopang operasional kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menargetkan nilai PATEN sebesar 85,3 sebagai indikator kualitas pelayanan administrasi terpadu.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam dengan target 100 persen.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengukur persentase tindak lanjut laporan pelanggaran Perda dan ketertiban umum sebesar 100 persen.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menetapkan target ketepatan waktu laporan realisasi APBDesa sebesar 100 persen.
6. Sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menargetkan seluruh desa memiliki perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sebesar 100 persen.

Keseluruhan program tersebut didukung pagu anggaran sebesar Rp3.386.676.204 yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan kinerja dan pengalokasian sumber daya.

Secara teknokratik dan regulatif, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah menunjukkan konsistensi antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan alokasi anggaran. Struktur dokumen mencerminkan pendekatan berbasis hasil (outcome oriented) dan prinsip money follows program, dimana penganggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme supervisi dan evaluasi oleh Kepala Daerah

sebagaimana dinyatakan dalam dokumen mempertegas fungsi PK sebagai instrumen pengendalian manajerial dan dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai tingkat capaian kinerja.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Perak Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,18
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Perak	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,80
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%

6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%
----	---	--	-----

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Perak Tahun 2025 merupakan dokumen penyesuaian (reviu) atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara substantif, PK Perubahan Tahun 2025 menetapkan tiga sasaran strategis utama, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target 75.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan public. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Pelayanan Publik dengan target 8,18. serta
- 3) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target 75.

Perumusan indikator berbasis indeks ini menunjukkan pendekatan evaluatif yang lebih komprehensif karena mengukur capaian kinerja secara agregatif dari berbagai aspek manajerial dan pelayanan

Pada tingkat sasaran program, PK Perubahan Kecamatan Perak Tahun 2025 merinci enam aspek kinerja utama yang mencerminkan fungsi kecamatan secara menyeluruh, meliputi akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Masing-masing aspek diukur dengan indikator capaian nilai dalam bentuk persentase atau nilai evaluasi, dengan target yang telah ditetapkan secara kuantitatif. Struktur ini menunjukkan adanya penajaman pengukuran kinerja yang tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga pada capaian aspek substantif penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi penganggaran, total alokasi anggaran dalam PK Perubahan Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.254.734.242 yang bersumber dari APBD. Apabila dibandingkan dengan PK awal Tahun 2025, terdapat penurunan pagu anggaran. Penurunan tersebut merupakan implikasi dari kebijakan efisiensi

belanja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyesuaian fiskal nasional. Kebijakan efisiensi ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan anggaran, pengendalian belanja yang bersifat kurang prioritas, serta penguatan belanja yang benar-benar mendukung pelayanan publik dan prioritas pembangunan.

Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran, struktur program tetap dipertahankan dan diselaraskan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *money follows program* dan efisiensi berbasis kinerja, dimana keterbatasan sumber daya dikelola melalui prioritisasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, pencapaian target tetap diupayakan secara optimal melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan program, penguatan koordinasi, serta pengendalian internal yang lebih ketat.

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun $n+1$

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 merupakan dokumen formal yang memuat komitmen kinerja antara Camat Perak selaku Pihak Pertama dan Bupati Jombang selaku Pihak Kedua untuk Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen perencanaan perangkat daerah, khususnya Renja Kecamatan Perak Tahun 2026.

1. Proses dan Tahapan Penyusunan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penelaahan Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diawali dengan penelaahan dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD Kabupaten, Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025 - 2029, dan secara khusus Rencana Kerja Kecamatan Perak Tahun 2026 sebagai rujukan tahunan. Berdasarkan hasil telaah tersebut dilakukan formulasi sasaran strategis dengan pendekatan berbasis hasil (*outcome oriented*), memastikan keterkaitan vertikal dengan tujuan pembangunan daerah

serta keterpaduan horizontal dengan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja.

b. Formulasi Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam PK dirumuskan berdasarkan outcome yang ingin dicapai pada tingkat kecamatan, dengan mempertimbangkan mandat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Formulasi dilakukan melalui pendekatan Konsistensi vertikal (selaras dengan RPJMD dan Renstra), Konsistensi horizontal (sinkron dengan program dan kegiatan dalam Renja 2026) dan berbasis hasil (outcome oriented). Dari proses tersebut ditetapkan tiga sasaran strategis, yaitu :

- 1) meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan,
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan
- 3) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

c. Penetapan Indikator dan Target Kinerja

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dalam bentuk indeks, yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target 75, Indeks Kualitas Pelayanan Publik dengan target 8,63, serta Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 77,05. penggunaan indikator berbasis indeks menunjukkan pendekatan agregatif dan komprehensif, karena pengukuran mencakup berbagai dimensi manajerial dan pelayanan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian indikator berasal dari dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan. Adapun dokumen yang dijadikan sumber data sebagai berikut :

- a. Dokumen evaluasi internal Kecamatan, seperti laporan kinerja triwulanan dan tahunan
- b. Hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025
- c. Data survei kepuasan masyarakat (SKM) Tahun 2025 dan hasil evaluasi PEKPP Tahun 2025.

- d. Dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan
- e. Data monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dalam Rencana Kerja.

3. Penanggung Jawab Data

Dalam proses kompilasi data kinerja, mekanisme pengelolaan dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Camat bertindak sebagai penanggung jawab utama atas keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah. Sekretaris Kecamatan berperan sebagai koordinator dalam konsolidasi dan pengendalian data, sedangkan para Kepala Seksi dan Subbagian bertanggung jawab sebagai penyedia data teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengaturan peran ini dirancang untuk menjamin validitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan resmi perangkat daerah.

- f. laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 2026, hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi, serta data survei kepuasan masyarakat. Data tersebut dikompilasi secara berjenjang dengan Camat sebagai penanggung jawab utama capaian kinerja, Sekretaris Kecamatan sebagai koordinator konsolidasi data, dan para Kepala Seksi serta Subbagian sebagai penyedia data teknis sesuai bidang tugas masing-masing. Mekanisme ini memastikan validitas, akurasi, dan akuntabilitas informasi kinerja yang dilaporkan.

4. Dasar Penetapan Target Tahun 2026

Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja tahun sebelumnya (baseline performance), sebagai dasar proyeksi peningkatan;
- b. Mandat yang tercantum dalam Renja 2026, khususnya target indikator program dan kegiatan;
- c. Kapasitas fiskal daerah dan pagu anggaran yang tersedia, dimana total anggaran Tahun 2026 sebesar Rp2.483.192.901 yang bersumber dari APBD

- d. Kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat nasional dan daerah;
- e. Standar evaluasi eksternal, seperti parameter penilaian SAKIP, pelayanan publik, dan reformasi birokras.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,63
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	77,05

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.331.193.801	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 5.547.500	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 38.568.800	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.758.500	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 101.024.300	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.100.000	APBD
	Rp. 2.483.192.901	

Secara substantif, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menetapkan tiga sasaran strategis yang merepresentasikan mandat utama penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, yaitu :

- a. meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditargetkan sebesar 75
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur Indeks Kualitas Pelayanan Publik dengan target sebesar 8,63, serta
- c. terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 77,05. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan indikator berbasis indeks yang bersifat agregatif dan komprehensif.

Penggunaan indikator dalam bentuk indeks menunjukkan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga pada kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan, dan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja.

Dari sisi program dan penganggaran, PK Tahun 2026 memuat enam program utama yang merupakan representasi fungsi kecamatan, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Seluruh program tersebut didanai melalui APBD dengan total pagu anggaran sebesar Rp2.483.192.901. Struktur penganggaran ini mencerminkan penerapan prinsip konsistensi antara perencanaan dan pengalokasian sumber daya, dimana anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara regulatif, dokumen PK Tahun 2026 menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Camat Perak sebagai pimpinan perangkat daerah. Bupati Jombang

selaku atasan langsung memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi, evaluasi, serta mengambil langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan dokumen secara elektronik dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh instansi berwenang memperkuat aspek legalitas dan keabsahan dokumen dalam sistem administrasi pemerintahan berbasis digital.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui suatu sistem pengelolaan dan pelaporan kinerja yang disusun secara periodik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang, kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan laporan kinerja ini dilaksanakan sebagai implementasi dari ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pedoman penyusunan pelaporan kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada tingkat sasaran strategis. Nilai capaian IKU diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja yang secara langsung merepresentasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, penyimpulan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kinerja organisasi.

Untuk memberikan interpretasi yang terstandar terhadap hasil pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja diklasifikasikan ke dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, capaian kinerja dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengelompokan capaian kinerja dalam skala pengukuran ordinal

NO.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	>100% - 110%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80% - 100%	: Baik (Berhasil)
3	>60% - 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20% - 60%	: Kurang
5	0% - 20%	: Sangat Kurang

Dalam proses penilaian capaian kinerja, apabila hasil pengukuran menunjukkan capaian lebih dari 110 persen, maka nilai yang digunakan dalam perhitungan dibatasi pada nilai maksimum sebesar 110 persen. Sebaliknya, apabila capaian kinerja bernilai negatif, maka nilai tersebut diperlakukan sebagai nol persen. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga konsistensi dan objektivitas dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan analisis terhadap capaian kinerja guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

Melalui laporan ini, Kecamatan Perak menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kinerja secara sistematis, baik pada tingkat kegiatan maupun pada tingkat sasaran strategis organisasi. Penilaian dilakukan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan serta indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, khususnya dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan komprehensif mengenai tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Pada Tahun 2025, Kecamatan Perak menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan serta meningkatnya kualitas layanan publik. Kedua sasaran tersebut mencerminkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada akhir periode pelaporan.

Namun demikian, pada Tahun 2025 penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berada dalam suatu periode transisi yang menjembatani pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan penyusunan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Kondisi transisi tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan dokumen kinerja perangkat daerah. Penyesuaian dimaksud meliputi penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2029, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan target kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan.

Sebagai konsekuensi dari penyesuaian dokumen perencanaan tersebut, terjadi perubahan pada beberapa komponen perencanaan kinerja, khususnya pada rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dan target yang ditetapkan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang sedang disusun dalam dokumen RPJMD. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dalam struktur tujuan dan indikator kinerja, proses pengukuran dan evaluasi

kinerja tetap dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Melalui evaluasi tersebut dapat diidentifikasi capaian kinerja yang telah berhasil diraih sekaligus dianalisis berbagai kendala dan faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian target kinerja. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan serta penyempurnaan strategi pelaksanaan program pada periode berikutnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

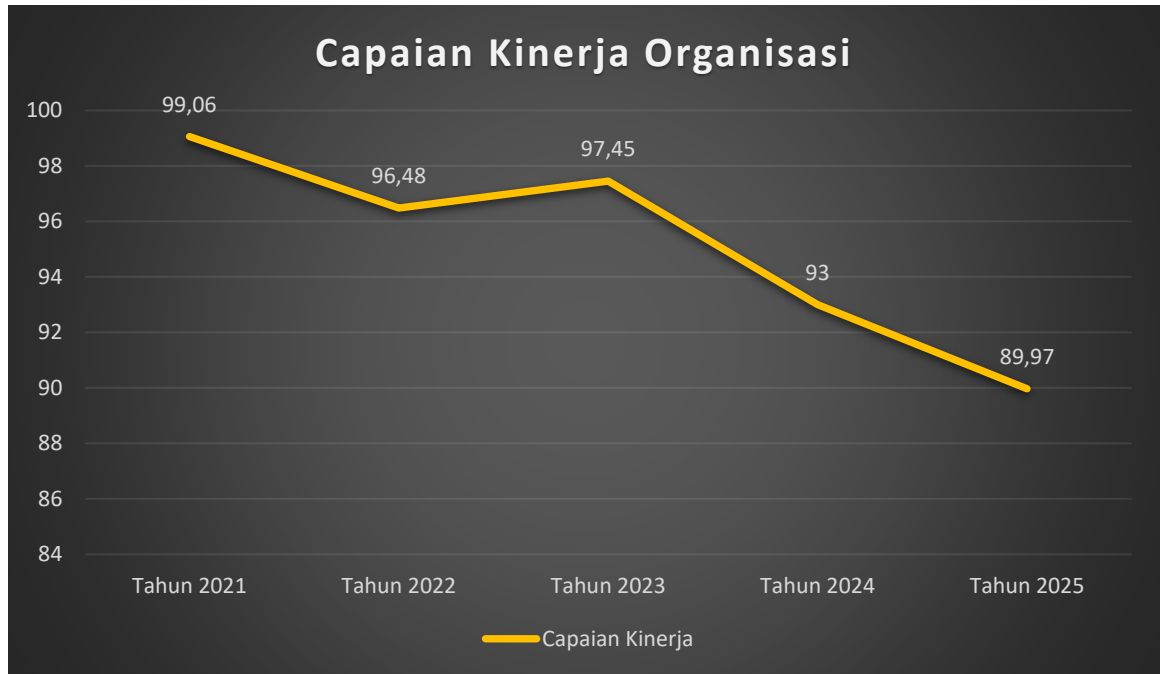
Selain menilai tingkat pencapaian kinerja, evaluasi juga mencakup analisis efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang digunakan (input), seperti anggaran, sumber daya manusia, dan sarana pendukung, dengan keluaran (output) yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan keluaran yang optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja dan analisis efisiensi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan, penyempurnaan perencanaan program, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Melalui mekanisme evaluasi yang sistematis dan berbasis kinerja ini, Kecamatan Perak diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Grafik Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Perak

Tahun 2021 - 2025



Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan grafik capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Perak selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum masih berada pada kategori kinerja baik, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja organisasi tercatat sebesar 99,06, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam pencapaian sasaran kinerja. Pada Tahun 2022 capaian tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 96,48, namun masih berada dalam kategori Baik (Berhasil). Selanjutnya pada Tahun 2023 capaian kinerja kembali mengalami peningkatan menjadi 97,45, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penguatan manajemen kinerja perangkat daerah.

Memasuki Tahun 2024 dan Tahun 2025, capaian kinerja organisasi menunjukkan tren penurunan, yaitu menjadi 93 pada Tahun 2024 dan 89,97

pada Tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan nilai capaian, secara substansial kinerja organisasi masih berada dalam kategori Baik (Berhasil) berdasarkan skala pengukuran kinerja yang berlaku. Penurunan nilai capaian tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh menurunnya kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan dalam metode pengukuran dan formulasi perhitungan kinerja organisasi.

Perubahan tersebut merujuk pada diberlakukannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025. Regulasi ini membawa penyesuaian terhadap pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mekanisme evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, termasuk perubahan pada formulasi perhitungan capaian kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan adanya penyesuaian formulasi tersebut, beberapa komponen penilaian kinerja mengalami penyempurnaan, baik dari aspek pembobotan indikator, metode agregasi nilai, maupun mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja.

Konsekuensi dari perubahan metode perhitungan tersebut berdampak pada hasil agregasi nilai capaian kinerja organisasi, sehingga nilai capaian pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan nilai ini lebih bersifat metodologis akibat perubahan sistem pengukuran kinerja, bukan semata-mata mencerminkan penurunan kualitas kinerja organisasi secara substantif.

Secara keseluruhan, analisis terhadap tren capaian kinerja organisasi Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Perak tetap mampu mempertahankan kinerja organisasi dalam kategori baik, meskipun terdapat penyesuaian dalam metode evaluasi kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian kinerja organisasi tetap berjalan secara efektif. Ke depan, penyesuaian terhadap regulasi baru tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas implementasi SAKIP, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja Kecamatan Perak pada tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan target dan realisasi capaian sasaran strategis Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI DARI NILAI AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Perak	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	68.84	91.79%	10%	82.61%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Kecamatan Perak yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indek	75	77.04	102.72%	10%	92.45%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Perak	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	Indeks	8.18	8.62	105.38%	10%	94.84%
TOTAL CAPAIAN		269.9%						
RATA-RATA CAPAIAN		89.97%						
PREDIKAT PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI		BAIK						

Berdasarkan tabel Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025, capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Perak menunjukkan hasil Baik dengan rata-rata capaian sebesar 89,97%. Nilai tersebut diperoleh dari agregasi capaian tiga sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Perak Tahun 2025. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, kemudian dihitung menggunakan formulasi capaian kinerja serta penyesuaian nilai berdasarkan kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Perhitungan / Formulasi dan data dukung atas realisasi indikator kinerja

Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Perak dengan satuan indeks. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 75, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 68,84. Berdasarkan formulasi pengukuran kinerja yaitu $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, diperoleh capaian sebesar 91,79%. Namun demikian, sesuai ketentuan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan koreksi nilai akuntabilitas kinerja sebesar 10%, sehingga nilai akhir capaian kinerja pada indikator ini menjadi 82,61%.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung keberhasilan capaian ini antara lain adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, dukungan regulasi serta pembinaan dari pemerintah daerah, dan adanya sistem monitoring serta evaluasi kinerja secara berkala. Sementara itu, faktor penghambat yang mempengaruhi capaian indikator antara lain masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil, serta adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dalam sistem evaluasi kinerja perangkat daerah.

b. **Sasaran 2** : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Kecamatan Perak yang Bersih dan Efektif

1. Perhitungan / Formulasi dan data dukung atas realisasi indikator kinerja

Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 75 dan realisasi sebesar 77,04. Berdasarkan formulasi perhitungan $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, diperoleh capaian kinerja sebesar 102,72%, yang menunjukkan bahwa

realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, setelah dilakukan koreksi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 10%, nilai akhir capaian indikator menjadi 92,45%.

Realisasi indikator ini didukung oleh hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Perak Tahun 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 8 Desember 2025 nomor : 000.8.6/10028/415.10/2025, dimana Kecamatan Perak memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,04 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 74,90, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan serta penguatan budaya kerja aparatur.

Meskipun demikian, pada komponen Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai yang diperoleh mengalami sedikit penurunan dari 6,37 pada tahun 2024 menjadi 5,99 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pengelolaan strategi reformasi birokrasi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait dengan kualitas perencanaan rencana aksi, efektivitas monitoring dan evaluasi internal, serta pengelolaan agen perubahan. Rencana aksi reformasi birokrasi yang disusun pada umumnya telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya, namun sebagian indikator masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kinerja yang terukur. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi internal belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa pelaksanaan rencana aksi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Pada komponen Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Perak menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai 71,05, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 68,52. Peningkatan ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi mulai memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan budaya kerja aparatur. Dalam aspek

tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, beberapa indikator menunjukkan capaian yang positif. Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah dinilai sangat efektif, yang menunjukkan bahwa struktur organisasi dan proses kerja yang ada telah mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi serta beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan. Selain itu, indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan signifikan dari 75,70 menjadi 90,67, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, implementasi sistem kerja baru sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi telah dilakukan melalui pembentukan tim kerja dan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja, namun belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian dokumen SOP dan proses bisnis perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas sistem kerja baru belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme kerja organisasi. Selain itu, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kecamatan Perak masih memerlukan penguatan, karena meskipun telah dibentuk tim pembangunan Zona Integritas, namun belum ditemukan bukti yang memadai terkait pelaksanaan program kerja pada enam area perubahan Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada aspek penguatan tata kelola pengawasan dan pengendalian internal, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum dilakukan evaluasi secara memadai pada tingkat perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna memastikan bahwa sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sementara itu, pada aspek budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalitas ASN, beberapa indikator menunjukkan tren yang positif. Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan dari 76,28 menjadi

82,49, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur. Namun demikian, dimensi kompetensi dan kinerja masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Upaya internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK juga telah dilakukan, namun implementasinya masih belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja organisasi sehingga nilai-nilai tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari.

Dari sisi pelayanan publik, Kecamatan Perak menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan, bahkan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 99,43 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan yang diberikan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Perak telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun demikian, upaya perbaikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih memperoleh nilai relatif lebih rendah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Perak telah berada pada jalur yang cukup baik dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi ke depan, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan rencana aksi yang lebih berbasis hasil, peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, percepatan pembangunan Zona Integritas, optimalisasi implementasi SPIP, serta penguatan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan tata kelola reformasi birokrasi, antara lain :

- Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi perangkat daerah serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.
Rencana aksi tersebut disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah.
- Melaksanakan penataan sistem kerja organisasi sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Hal ini diwujudkan melalui pembentukan tim kerja perangkat daerah serta penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis aplikasi, seperti pemanfaatan aplikasi e-Kinerja dalam pemantauan dan pengukuran kinerja pegawai. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong terciptanya pola kerja yang lebih kolaboratif.
- Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi layanan publik.
Kecamatan Perak telah memanfaatkan berbagai sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Penerapan digitalisasi layanan ini juga diikuti dengan upaya integrasi layanan lintas perangkat daerah guna memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
- Dalam aspek penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal, Kecamatan Perak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, antara lain melalui peningkatan pengelolaan arsip, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Melakukan penguatan manajemen kinerja pegawai.

Penguatan manajemen pegawai ini dilakukan melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan profesionalitas aparatur melalui pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK guna membentuk budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Perak secara konsisten melakukan pengukuran dan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penghambat Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain :

- Komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
- Adanya dukungan kebijakan reformasi birokrasi dari pemerintah daerah, serta koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain :

- keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan seluruh komponen reformasi birokrasi secara optimal
- Dinamika kebijakan yang menuntut adanya penyesuaian berkelanjutan dalam sistem kerja organisasi.

c. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Perak

1. Perhitungan / Formulasi dan data dukung atas realisasi indikator kinerja

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dengan target sebesar 8,18 dan realisasi sebesar 8,62. Berdasarkan formulasi pengukuran kinerja ($\text{Realisasi} \div \text{Target} \times 100\%$), diperoleh capaian sebesar 105,38%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan.

Setelah dilakukan koreksi nilai sebesar 10%, nilai akhir capaian indikator menjadi 94,84%.

Realisasi indikator ini didukung oleh data hasil pengukuran kualitas pelayanan publik yang meliputi berbagai aspek, antara lain ketersediaan standar pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Perak antara lain :

- a. Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- b. Pengusulan Peningkatan kompetensi bagi aparatur pelayanan kepada instansi terkait melalui pembinaan dan pelatihan,
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- d. Optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat.
- e. Penyediaan media informasi pelayanan yang mudah diakses.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penghambat Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain :

- Meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional,
- Adanya inovasi pelayanan publik,
- meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain :

- keterbatasan sarana pendukung pelayanan berbasis digital
- meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Perak telah berjalan cukup efektif dalam mendukung

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik. Dengan nilai rata-rata capaian sebesar 89,97% dan predikat kinerja Baik, tingkat implementasi manajemen kinerja organisasi dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi. Ke depan, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem manajemen kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan
2 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	68,84
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,17	8,13	8,62
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,65	74,90	77,04

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan dua tahun terakhir (2023–2025), dapat dilakukan analisis perkembangan kinerja pada setiap sasaran strategis Kecamatan Perak dengan melihat tren capaian kinerja, faktor yang mempengaruhi

perubahan kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

- Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”, realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 68,84. Data pada tahun sebelumnya belum tercantum secara lengkap pada tabel sehingga tren kenaikan atau penurunan secara kuantitatif tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, khususnya dalam hal koordinasi pemerintahan, pembinaan desa, serta pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan.
- Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada sasaran ini antara lain :
 1. peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah,
 2. optimalisasi pelaksanaan program kerja kecamatan,
 3. dukungan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian kinerja, di antaranya keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan pemerintahan di tingkat desa dan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, Kecamatan Perak telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain:

- penguatan koordinasi internal organisasi,
- peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan secara internal dan pengajuan usulan Bimbingan Teknis serta Pelatihan kepada instansi terkait.

- optimalisasi peran tim kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, serta
- pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan.

b. Sasaran 2 : **meningkatkan kualitas pelayanan public**

- capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Perak telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat..
- Faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja pada sasaran ini antara lain :
 1. adanya penyempurnaan standar pelayanan publik,
 2. peningkatan kompetensi petugas pelayanan,
 3. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, serta
 4. pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat.
 5. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti meningkatnya volume permohonan layanan masyarakat, kebutuhan percepatan proses pelayanan, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang berlaku. Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Kecamatan Perak telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain dengan :

- menyederhanakan prosedur pelayanan, memperkuat penerapan standar operasional prosedur pelayanan,
- meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, serta
- melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme layanan yang tersedia.

c. Sasaran 3 : **terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel**

- Pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, capaian kinerja juga menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Perak.
- Faktor-faktor yang mendorong peningkatan kinerja antara lain :
 1. meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
 2. penguatan pengelolaan kinerja aparatur melalui penerapan sistem e-Kinerja,
 3. peningkatan kualitas pengelolaan arsip,
 4. pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin tertib, serta
 5. meningkatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian pada sasaran ini, antara lain :

- belum optimalnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas,
- belum maksimalnya implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah, serta
- masih perlunya penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kecamatan Perak telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain :

- penguatan komitmen pimpinan dan aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,
- penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi internal organisasi, serta

- peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian kinerja Kecamatan Perak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Perak menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta tata kelola birokrasi yang akuntabel.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD / Renstra 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76	68,84	90,58
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,40	8.62	102,62
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,25	77,04	102,38

Berdasarkan Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah, dapat dilakukan analisis terhadap tingkat kemajuan pencapaian kinerja organisasi pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang dalam mendukung pencapaian

target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target akhir indikator kinerja pada periode perencanaan menengah dengan realisasi kinerja pada tahun 2025, sehingga dapat diketahui tingkat progres atau kemajuan pencapaian target yang telah ditetapkan.

a. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada sasaran strategis ini, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target akhir periode perencanaan sebesar 76. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 68,84, sehingga tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah mencapai 90,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja jangka menengah telah berhasil dicapai pada tahun berjalan, meskipun masih terdapat selisih antara realisasi dengan target akhir yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- masih berlangsungnya proses penguatan implementasi sistem manajemen kinerja berbasis hasil di tingkat kecamatan
- peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang masih terus disempurnakan, serta
- adanya penyesuaian terhadap kebijakan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Meskipun demikian, progres capaian yang telah mendekati target menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah berjalan cukup efektif dan diperkirakan target jangka menengah dapat tercapai pada periode perencanaan berikutnya.

b. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dengan target akhir sebesar 8,4. Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 8,62, sehingga tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah mencapai 102,62%. Hal ini menunjukkan

bahwa target kinerja jangka menengah pada indikator tersebut telah terlampaui lebih cepat dari yang direncanakan. Percepatan pencapaian target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional dan responsif,
- penyempurnaan standar operasional prosedur pelayanan,
- peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta
- adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Sasaran 3 Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Selanjutnya, pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target akhir periode perencanaan sebesar 75,25. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 77,04, sehingga tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah mencapai 102,38%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi pada Kecamatan Perak telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Percepatan pencapaian target ini dipengaruhi oleh konsistensi penerapan agenda reformasi birokrasi melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi, antara lain :

- penguatan manajemen perubahan,
- peningkatan kualitas tata laksana organisasi,
- penguatan sistem pengawasan, serta
- peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Dukungan komitmen pimpinan, koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait, serta penerapan mekanisme monitoring dan

evaluasi secara berkala turut menjadi faktor penting dalam percepatan pencapaian target tersebut.

Secara keseluruhan, progres pencapaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada Kecamatan Perak telah berada pada jalur yang positif dan bahkan beberapa di antaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja, memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik agar capaian kinerja organisasi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	68,84	69,70	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,62	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	77,04	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 3.6 tentang Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Nasional, dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja Kecamatan Perak dengan capaian kinerja pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi

relatif kinerja Kecamatan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang lebih luas.

Berdasarkan data yang tersedia, pada Tahun 2025 data pembanding baru tersedia pada tingkat Kabupaten Jombang. Sementara itu, data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum dirilis pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan indikator kinerja perangkat daerah, sehingga belum dapat disajikan dalam analisis perbandingan.

Pada Sasaran 1a “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mencatat realisasi Kecamatan Perak sebesar 68,84. Sebagai pembanding, realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 tercatat sebesar 69,70, yang merupakan nilai rata-rata Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang. Indikator ini ditetapkan sebagai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Jombang dengan nomenklatur “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Mengingat indikator tersebut hanya diberlakukan di lingkungan Kabupaten Jombang, maka data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum tersedia. Capaian Kecamatan Perak yang berada pada kisaran di atas rata-rata kabupaten menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja kewilayahan Kabupaten Jombang secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan realisasi Kecamatan Perak sebesar 8,62. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 8,56. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Perak berada di atas rata-rata kabupaten. Adapun data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional untuk indikator ini belum dirilis pada saat penyusunan laporan, sehingga belum dapat disajikan dalam tabel perbandingan.

Sementara itu, pada Sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat

Daerah mencatat realisasi Kecamatan Perak sebesar 77,04. Meskipun penilaian reformasi birokrasi dilaksanakan secara nasional, hasil pengukuran tersebut belum dipublikasikan secara terpisah untuk unit kecamatan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Oleh karena itu, kolom data pembanding untuk indikator ini masih tercantum sebagai tidak tersedia (N/A).

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Perak pada indikator yang telah memiliki data pembanding berada di atas rata-rata Kabupaten Jombang. Keterbatasan data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan serta adanya perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan pada tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.5. Efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan optimalisasi pencapaian kinerja organisasi, Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang terus melakukan berbagai strategi efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi, baik yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun pemanfaatan aset daerah. Strategi efisiensi tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Secara umum, kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Perak dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis, antara lain optimalisasi perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui pengendalian belanja operasional, pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama (shared resources), serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, strategi efisiensi penggunaan sumber daya difokuskan pada penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara optimal melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Pengukuran capaian kinerja pada sasaran ini menggunakan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang merupakan instrumen evaluasi kinerja kecamatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terkait terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, strategi efisiensi dilaksanakan melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyederhanaan proses bisnis organisasi, penataan tata laksana kerja yang lebih efisien, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur juga dilakukan melalui pembinaan internal dan peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, sehingga aparatur mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran pada sasaran ini juga dilakukan melalui pengendalian belanja operasional serta penguatan mekanisme perencanaan kegiatan yang lebih selektif dan berbasis prioritas.

Selanjutnya, pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, strategi efisiensi difokuskan pada peningkatan kualitas

pelayanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan agar mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari sisi pemanfaatan aset, dilakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat tanpa memerlukan penambahan investasi yang besar. Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

a. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran di Kecamatan Perak merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan biaya yang terkendali. Prinsip ini sejalan dengan konsep value for money dalam pengelolaan keuangan sektor publik, yaitu pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan keluaran dan manfaat yang maksimal. Secara konseptual, efisiensi anggaran menekankan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia harus dikelola secara optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai tanpa terjadi pemborosan sumber daya (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi anggaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dapat digunakan pendekatan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Secara sederhana, tingkat efisiensi anggaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efisiensi Anggaran = Persentase Capaian Kinerja - Persentase Capaian Anggaran

Apabila nilai efisiensi yang dihasilkan bernilai positif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien. Sebaliknya, apabila nilai efisiensi bernilai negatif, maka kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran, di mana realisasi anggaran yang digunakan belum mampu menghasilkan capaian kinerja yang sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.

Penerapan prinsip efisiensi anggaran di Kecamatan Perak menjadi semakin penting mengingat keterbatasan kapasitas anggaran yang harus dikelola untuk mendukung berbagai program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara cermat, terarah, dan berbasis kinerja agar alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, penerapan efisiensi anggaran juga berperan dalam memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya menjadi indikator dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada hasil

Tabel 3.7

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91,79	3.254.734.242,02	2.648.728.737,07	81,38	10,41%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	105,38	193.717.700	193.187.100	99.73	5,65%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	102,72	3.061.016.542,02	2.455.541.637,07	80,22	22,5%

Berdasarkan Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemanfaatan sumber daya pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik dan selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Hal tersebut tercermin dari perbandingan antara capaian kinerja program (PK) dengan realisasi anggaran, yang menunjukkan bahwa output dan outcome kegiatan dapat dicapai secara optimal tanpa harus menyerap anggaran secara maksimal. Efisiensi tersebut dicapai melalui berbagai langkah pengendalian belanja operasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dilaksanakan secara terencana.

- Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Perak, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,79 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja telah terealisasi dengan baik. Dalam rangka menjaga efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran ini, Kecamatan Perak telah menerapkan beberapa langkah konkret, antara lain melalui optimalisasi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan secara lebih selektif, pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas hanya pada kegiatan

yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja organisasi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi secara daring. Selain itu, pengelolaan kebutuhan operasional perkantoran seperti alat tulis kantor (ATK) dilakukan secara lebih terukur dengan mendorong penerapan digitalisasi administrasi dan penggunaan dokumen elektronik.

- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Selanjutnya, pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,72 persen, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp2.455.541.637,07 dari pagu anggaran sebesar Rp3.061.016.542,02, atau dengan tingkat penyerapan sebesar 80,22 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, dimana capaian kinerja dapat melampaui target meskipun tingkat serapan anggaran tidak mencapai 100 persen. Efisiensi tersebut didukung oleh penerapan kebijakan pengendalian belanja operasional, antara lain melalui rasionalisasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengendalian pengadaan barang operasional perkantoran secara lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Selain itu, pelaksanaan kegiatan rapat dan koordinasi internal juga dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, termasuk pengaturan penyediaan konsumsi rapat secara proporsional sesuai kebutuhan kegiatan.

- Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,38 persen, yang juga melampaui target yang ditetapkan. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp193.187.100 dari total pagu anggaran sebesar Rp193.717.700, atau dengan tingkat penyerapan sebesar 99,73 persen. Tingginya tingkat penyerapan anggaran yang sejalan dengan capaian kinerja yang melampaui target mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya pada aspek pelayanan publik telah

dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam mendukung efisiensi pada sasaran ini, Kecamatan Perak melakukan optimalisasi penggunaan anggaran pelayanan melalui penyederhanaan proses administrasi layanan berbasis digital, pengurangan penggunaan dokumen cetak melalui sistem administrasi elektronik, serta pengelolaan kegiatan pelayanan masyarakat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi sehingga dapat meminimalkan biaya operasional kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Perak menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan secara relatif efisien dan efektif. Capaian kinerja yang tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Ke depan, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi berbasis kinerja dan efisiensi guna memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan di Kecamatan Perak..

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Perak merupakan salah satu aspek strategis dalam mengevaluasi capaian kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis SDM dilakukan melalui penilaian terhadap ketersediaan, kesesuaian penempatan, serta optimalisasi pemanfaatan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Dalam konteks ini, efisiensi SDM diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja yang optimal melalui pemanfaatan jumlah dan kompetensi pegawai secara tepat guna dan berdaya guna.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SDM di Kecamatan Perak dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, dimana penugasan dan tanggung jawab didistribusikan secara langsung kepada masing-masing seksi sesuai dengan keterkaitan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, sehingga tercipta kejelasan peran dan akuntabilitas dalam pencapaian kinerja organisasi.

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, Kecamatan Perak menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Transparansi**
Pelaksanaan tugas dilakukan secara terbuka dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik, secara benar, objektif, dan tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Responsivitas**
Kemampuan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons secara cepat berbagai dinamika, permasalahan, serta perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- **Efisiensi**
Penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya diarahkan pada pencapaian hasil yang optimal dengan meminimalkan pemborosan serta mengutamakan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
- **Efektivitas**
Kemampuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan metode dan proses yang paling optimal.
- **Akuntabilitas**
Setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Terukur**
Penetapan target kinerja dilakukan secara jelas dan terukur, disertai dengan indikator serta mekanisme pencapaian yang dapat dievaluasi secara objektif.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya manusia di Kecamatan Perak dapat mendukung

peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Tabel 3.8

Laporan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Perak Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Camat		Struktural	12	1	1	0
2	Sekretaris	Camat	Struktural	11	1	1	0
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Camat	Struktural	9	1	1	0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Camat	Struktural	9	1	1	0
5	Kepala Seksi Sosial Budaya	Camat	Struktural	9	1	1	0
6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Camat	Struktural	9	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Struktural	8	1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Sekretaris	Struktural	9	1	1	0
9	Pengadministrasi Umum	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	5	0	1	1
10	Pengelola Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	6	0	1	1
11	Pramu Kebersihan	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	1	0	1	1
12	Pengelola Pemanfaatan BMD	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	6	0	1	1
13	Pengelola Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	6	0	1	1
14	Pengemudi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	3	1	1	0
15	Pengadministrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	5	0	1	1
16	Bendahara	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	0	1	1
17	Analisis Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	1	1	0
18	Pengelola Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	6	0	1	1

19	Analisis Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	0	1	1
20	Analisis Perencanaan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	1	1	0
21	Pengelola Program dan Laporan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	6	0	1	1
22	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	0	1	1
23	Pengadministrasian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	5	0	1	1
24	Analisis Desa dan Kelurahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	7	0	1	1
25	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	5	0	1	1
26	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	6	0	1	1
27	Pengelola Data	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	6	0	1	1
28	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Fungsional	6	0	1	1
29	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	7	0	1	1
30	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	6	1	1	0
31	Pengelola Data	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	6	0	1	1
32	Analisis Sosial Budaya	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	7	0	1	1
33	Pengelola Data	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	6	0	1	1
34	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	6	1	1	0
35	Analisis Keamanan	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	7	0	1	1
36	Petugas Keamanan	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	3	3	1	-2
37	Pengolah Data	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	6	0	1	1
38	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	6	0	3	3
JUMLAH					16	40	24

Sumber: Anjab ABK Kecamatan Perak

Secara keseluruhan, analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia merupakan landasan strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Perak. Optimalisasi pemanfaatan SDM yang didasarkan pada kesesuaian antara kompetensi, penempatan, dan kebutuhan organisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui pengelolaan SDM yang terencana dan berbasis kinerja, Kecamatan Perak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan tenaga kerja yang efektif dan efisien akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan SDM	Ketersediaan SDM Tahun 2025	% Pemenuhan Ketersediaan SDM (%)	EFISIENSI SDM
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91,79	40	18	45	60%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	105,38	22	11	50	55,38%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	102,72	18	7	38,89	70.93%
Rata – Rata Capaian Kinerja Dan Ketersediaan SDM	99,96	40	18	45	
EFISIENSI SDM = Capain Kinerja – Ketersediaan SDM	54,96%				

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat dilakukan analisis perbandingan antara capaian kinerja organisasi dengan tingkat pemenuhan kebutuhan

sumber daya manusia (SDM) pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kinerja organisasi dapat dicapai dengan memanfaatkan ketersediaan SDM yang ada secara efektif dan efisien. Secara umum, rata-rata capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 99,96%, sedangkan tingkat pemenuhan kebutuhan SDM hanya mencapai sekitar 45% dari total kebutuhan ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan jumlah aparatur yang tersedia, Kecamatan Perak tetap mampu mencapai kinerja organisasi yang relatif optimal. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat efisiensi pemanfaatan SDM secara keseluruhan tercatat sebesar 54,96%, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah dilakukan secara cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, capaian kinerja tercatat sebesar 91,79%, sementara tingkat pemenuhan kebutuhan SDM hanya mencapai 45% dari kebutuhan ideal (40 kebutuhan SDM dengan ketersediaan 18 orang). Dengan kondisi tersebut, tingkat efisiensi pemanfaatan SDM pada sasaran ini tercatat sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tetap dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat keterbatasan jumlah aparatur. Kondisi tersebut didukung oleh penguatan koordinasi internal, pembagian tugas yang proporsional antar pegawai, serta optimalisasi pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, capaian kinerja mencapai 105,38%, sedangkan tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sebesar 50% (22 kebutuhan SDM dengan ketersediaan 11 orang). Dengan demikian, tingkat efisiensi pemanfaatan SDM pada sasaran ini tercatat sebesar 55,38%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap dapat ditingkatkan meskipun dengan jumlah aparatur pelayanan yang terbatas. Hal ini didukung oleh penerapan sistem pelayanan yang lebih efektif, penyederhanaan

prosedur pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, capaian kinerja tercatat sebesar 102,72%, sementara tingkat pemenuhan kebutuhan SDM hanya mencapai 38,89% (18 kebutuhan SDM dengan ketersediaan 7 orang). Dengan kondisi tersebut, tingkat efisiensi pemanfaatan SDM pada sasaran ini tercatat sebesar 70,93%, yang merupakan tingkat efisiensi tertinggi dibandingkan sasaran strategis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan mampu dilaksanakan secara optimal melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan koordinasi lintas fungsi, serta pemanfaatan sumber daya aparatur secara lebih fleksibel.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan SDM pada Tahun 2025, ketersediaan aparatur di lingkungan Kecamatan Perak tidak hanya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga didukung oleh keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai kebijakan nasional. Dengan adanya dukungan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tetap dapat berjalan secara optimal meskipun jumlah ASN yang tersedia masih terbatas.

Dalam rangka mencapai efisiensi pemanfaatan SDM tersebut, Kecamatan Perak juga telah melaksanakan berbagai langkah konkret, antara lain melalui optimalisasi pembagian tugas dan fungsi aparatur sesuai dengan kompetensi dan beban kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan internal dan pembelajaran kerja (*learning by doing*) guna meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan berbagai fungsi organisasi secara multidisipliner.

Strategi efisiensi juga dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja tim antar unit kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan saling mendukung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik turut menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produktivitas kerja aparatur, sekaligus mengurangi ketergantungan pada penambahan sumber daya manusia baru.

Selain itu, efisiensi SDM juga diwujudkan melalui penyederhanaan proses bisnis organisasi dan penataan tata laksana kerja, sehingga alur kerja menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan duplikasi tugas. Pendekatan ini memungkinkan aparatur yang tersedia dapat menjalankan berbagai fungsi organisasi secara lebih optimal dan produktif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemenuhan kebutuhan SDM di Kecamatan Perak masih belum sepenuhnya terpenuhi, kinerja organisasi tetap dapat dicapai secara optimal melalui penerapan berbagai strategi pengelolaan SDM yang efektif. Ke depan, upaya peningkatan efisiensi ini akan terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas, serta penguatan manajemen kinerja organisasi agar penggunaan sumber daya manusia dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

b. Efisiensi Aset

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Perak merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kualitas pelayanan publik serta pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sarana dan prasarana dalam hal ini mencakup seluruh infrastruktur fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi pemanfaatannya diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional.

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi tersebut, Kecamatan Perak melaksanakan evaluasi secara komprehensif terhadap kondisi, tingkat pemanfaatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap kondisi fisik infrastruktur, intensitas dan pola penggunaan fasilitas, tingkat keandalan dan ketersediaan sarana pendukung, serta kesesuaian antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, analisis efisiensi juga dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan, perbaikan, maupun optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

NO	URAIAN	JUMLAH BERDASARKAN HASIL REKON BMD TAHUN 2025	KONDISI BARANG			USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1			1	100%
2	Station Wagon	2	2			2	100%
3	Sepeda Motor	30	26	4		30	100%
4	Lemari Besi/Metal	1	1			1	100%
5	Lemari Kayu	4	4			4	100%
6	Rak Besi	2	2			2	100%
7	Rak Kayu	1	1			1	100%
8	Filing Cabinet Besi	3	3			7	100%

9	Lemari Sorok	2	2			2	100%
10	Lemari Kaca	2	2			2	100%
11	CCTV - Camera Control Television System	1	1			1	100%
12	White Board	2	2			2	100%
13	Mesin Absensi	1	1			1	100%
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1			1	100%
15	Mesin Antrian	1	1			1	100%
16	Papan Nama Instansi	1	1			1	100%
17	Papan Pengumuman	2	2			2	100%
18	Alat Kantor Lainnya	1	1			1	100%
19	Meja Kerja Kayu	18	18			18	100%
20	Sice	2	2			2	100%
21	Tempat Tidur Kayu	1		1		1	100%
22	Meja Resepsionis	2	2			2	100%
23	Meja Panjang	1	1			1	100%
24	Meja 1/2 Biro	12	12			12	100%
25	Kursi Rapat	70	70			70	100%
26	Kursi Tamu	1	1			1	100%
27	Kursi Putar	17	17			17	100%
28	Bangku Tunggu	7	6	1		7	100%
29	Kursi Lipat	51	51			51	100%

30	Partisi	3	3			3	100%
31	Meubeleur lainnya	6	6			6	100%
32	A.C. Split	10	19	1		12	91,67%
33	Televisi	4	4			4	100%
34	Sound System	2	2			2	100%
35	Unit Power Supply	2	2			2	100%
36	Mimbar/Podium	1	1			1	100%
37	Gordyin/Kray	1	1			1	100%
38	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1			1	100%
39	Alat Pemadam/Portable	2	2			2	100%
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			1	100%
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			1	100%
42	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1			1	100%
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			8	100%
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2			2	100%
45	Professional Sound System	1	1			1	100%
46	Digital LED Running Text	1	1			1	100%
47	Layar Film/Projector	1	1			1	100%
48	Video Conference	1	1			2	100%
49	P.C Unit	10	10			11	100%
50	Lap Top	9	8	1		10	90%

51	Note Book	2	2			2	100%
52	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1			1	100%
53	Monitor	1	1			1	100%
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	11	4		18	89%
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2			3	67%
56	Peralatan Komputer lainnya	1	1			1	100%
57	Peralatan Permainan lainnya	1	1			1	100%
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2			2	100%
59	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			1	100%
60	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1			1	100%
61	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1			1	100%
62	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	1			1	100%
63	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	2			2	100%
64	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	2			2	100%
65	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1			1	100%
66	Pagar Permanen	1	1			1	100%
67	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	1			1	100%
68	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1			1	100%
69	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1			1	100%
70	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1				
JUMLAH		340	338	12		359	
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS		94,7%					

Sumber: RKBMD 2025

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Perak menunjukkan kondisi yang relatif memadai. Dari total kebutuhan sebanyak 359 unit, sebanyak 340 unit telah tersedia, sehingga tingkat ketersediaan mencapai 94,7 persen. Ditinjau dari kondisi barang, sebagian besar berada dalam kondisi baik, yaitu sebanyak 338 unit, sedangkan 12 unit lainnya dalam kondisi rusak ringan yang masih dapat digunakan dengan perbaikan terbatas.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa jenis sarana dan prasarana telah mencapai tingkat ketercukupan sebesar 100 persen, antara lain tanah untuk bangunan kantor pemerintah, kendaraan dinas operasional (station wagon dan sepeda motor), serta peralatan perkantoran seperti mesin ketik manual, lemari besi, filing cabinet, mesin absensi, dan meja kerja. Selain itu, perangkat pendukung teknologi informasi seperti komputer dan printer juga secara umum telah memenuhi kebutuhan operasional.

Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kebutuhan secara optimal. Kekurangan tersebut antara lain pada ketersediaan AC Split yang baru mencapai 91,67 persen, laptop sebesar 90 persen, scanner sebesar 67 persen, serta printer sebesar 89 persen dari total kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan pemenuhan sarana pendukung, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kenyamanan kerja serta optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, meskipun secara umum tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Perak telah tergolong baik, masih diperlukan upaya pemenuhan dan penataan secara bertahap terhadap sarana yang belum terpenuhi guna mendukung peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 3.8
Efisiensi Sarana dan Prasarana Terhadap Capaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset Tahun 2025	% Pemenuhan Kebutuhan Aset (%)	EFISIENSI Sarpras
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91,79	359	340	94,71	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	105,38				10,67%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	102,72				8,01%
Rata – Rata Capaian Kinerja Dan Ketersediaan SDM	99,96	359	340	94,71	
EFISIENSI SDM = Capain Kinerja – Ketersediaan SDM	5,25%				

Berdasarkan Tabel 3.11 Efisiensi Sarana dan Prasarana terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025, dapat dilakukan analisis perbandingan antara capaian kinerja dengan tingkat pemenuhan kebutuhan aset/sarana dan prasarana pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang. Analisis ini menunjukkan sejauh mana kinerja organisasi dapat dicapai dengan dukungan ketersediaan aset yang ada, serta menggambarkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja organisasi pada Tahun 2025 mencapai 99,96%, sedangkan tingkat pemenuhan kebutuhan aset mencapai 94,71% dari total kebutuhan sebanyak 359 unit, dengan ketersediaan aset sebanyak 340 unit . Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemenuhan aset belum mencapai 100%, kinerja organisasi tetap dapat dicapai secara optimal. Selisih antara capaian kinerja dan tingkat pemenuhan aset tersebut mencerminkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, dimana keterbatasan aset tidak secara signifikan menghambat pencapaian kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, capaian kinerja sebesar 91,79% dengan tingkat pemenuhan aset sekitar 94,71%,

sehingga diperoleh tingkat efisiensi sarana dan prasarana sebesar 5,25% . Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan aset yang relatif memadai, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi pemanfaatan aset.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, capaian kinerja mencapai 105,38% dengan tingkat efisiensi sarana dan prasarana sebesar 10,67% . Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal meskipun tidak seluruh kebutuhan aset terpenuhi. Hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif, khususnya dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, capaian kinerja sebesar 102,72% dengan tingkat efisiensi sarana dan prasarana sebesar 8,01% . Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola birokrasi lebih banyak ditentukan oleh efektivitas sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, serta kapasitas aparatur, dibandingkan dengan ketergantungan pada ketersediaan aset fisik.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan aset, Kecamatan Perak telah melaksanakan berbagai langkah konkret yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah melakukan identifikasi dan rasionalisasi kebutuhan aset melalui evaluasi terhadap rencana kebutuhan barang milik daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan pengadaan aset benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil organisasi serta menghindari pengadaan aset yang tidak mendukung pencapaian kinerja.

Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia melalui penggunaan sarana dan prasarana secara bersama (shared resources) antar unit kerja, sehingga aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa perlu penambahan aset baru. Penataan ruang kerja dan penggunaan peralatan kantor secara efisien juga menjadi bagian dari strategi ini.

Upaya efisiensi juga dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan aset secara berkala, sehingga umur ekonomis aset dapat diperpanjang dan kebutuhan pengadaan baru dapat diminimalisir. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

Selanjutnya, Kecamatan Perak juga mendorong digitalisasi proses kerja dan pelayanan publik, sehingga ketergantungan terhadap aset fisik dapat dikurangi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemenuhan kebutuhan aset belum sepenuhnya terpenuhi, kinerja organisasi tetap dapat dicapai secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menekankan pada optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia serta rasionalisasi kebutuhan aset. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan aset yang lebih selektif dan berbasis kinerja agar efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dapat terus ditingkatkan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Perak Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
2	3	4	5	6
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	3.061.016.542,02	2.455.541.637,07	80,22

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.095.150,00	4.094.550	99,99
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.470.750,00	3.470.150,	99,98
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	624.400,00	624.400	100.00
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	2.681.197.072,02	2.101.585.081	78.38
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.608.631.622,02	2.033.099.631	77.94
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.087.000,00	68.007.000	94,34
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	478.450,00	478.450	100.00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	75.425.650,00	64.013.000	92.38
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.901.900,00	3.901.900	100.00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.277.850,00	11.274.750	100.00

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.720.000,00	27.320.000	70,56
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.243.600,00	3.243.150	100,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.352.000,00	2.346.000	99,74
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.930.300,00	15.927.200	99,98
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	43.539.050,00	43.211.570	99,25
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43.539.050,00	43.211.570	99,25
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	59.005.420,00	48.444.601	82,10
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41.720.000,00	32.357.417	77,56
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17.285.420,00	16.087.184	93,07
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	197.754.200,00	194.192.835,07	98,20
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	52.738.200,00	49.476.092	93,81

Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	dan Perizinannya			
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	131.616.000,00	131.316.743,07	99,77
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13.400.000,00	13.400.000	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.438.750,00	3.438.750	100
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	3.438.750,00		
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.438.750,00	3.438.750	100
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.388.200,00	86.333.200	99,94
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		86.388.200,00		
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.275.700,00	38.233.200	100
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.112.500,00	48.100.000	100
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.500.000,00	9.487.500	99,87

Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		9.500.000,00		
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	9.500.000,00	9.487.500	99,87
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.037.500,00	4.037.500	100
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4.037.500,00	4.037.500	100
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.037.500,00	4.037.500	100
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.353.250,00	89.890.150	99,49
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		90.353.250,00		
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	12.195.750,00	12.112.650	99,32
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.157.500,00	77.777.500	99,51

Berdasarkan Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025, kinerja anggaran pada Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang secara umum menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik, dengan mayoritas program dan kegiatan memiliki realisasi di atas 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, meskipun terdapat beberapa komponen belanja yang realisasinya belum optimal.

Secara agregat, kinerja anggaran terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar sekitar Rp3,06 miliar dan realisasi sebesar Rp2,45 miliar atau sekitar 80,22%. Komponen terbesar dalam program ini adalah belanja gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi sebesar 77,94%, yang menunjukkan adanya efisiensi atau penyesuaian belanja pegawai selama tahun berjalan. Selain itu, kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan menunjukkan realisasi yang tinggi (di atas 90%), yang mencerminkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, program yang mendukung antara lain:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, khususnya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang mendukung stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemanfaatan anggaran difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pemberdayaan masyarakat desa.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan anggaran difokuskan pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berperan mendukung tata kelola birokrasi melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta penyediaan dukungan operasional yang memadai.

Dari sisi program yang mendukung sasaran strategis terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, dukungan anggaran tidak hanya berasal dari kegiatan perencanaan dan administrasi umum, tetapi secara komprehensif ditopang oleh beberapa program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup kegiatan:
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - Administrasi keuangan, administrasi umum, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan;
 - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

Program ini berperan sebagai tulang punggung dalam mendukung tata kelola birokrasi melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta penyediaan dukungan operasional yang memadai. Tingkat realisasi yang tinggi pada sebagian besar kegiatan menunjukkan bahwa fungsi manajerial dan administratif berjalan efektif.

Secara umum, pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis ini diarahkan untuk penguatan sistem tata kelola internal, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, penataan proses bisnis organisasi, serta peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi yang mencakup aspek akuntabilitas, pengawasan, tata laksana, dan pelayanan publik.

Selanjutnya, pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, program yang mendukung meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
merupakan program utama yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini mencakup pelaksanaan pelayanan administratif di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Melalui program ini, dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kecepatan dan ketepatan layanan, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan. Selain itu, program ini juga mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penerapan standar pelayanan publik, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berperan dalam menciptakan kondisi pemerintahan yang stabil, tertib, dan kondusif melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Stabilitas dan kondusivitas wilayah tersebut menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, karena pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud dalam lingkungan pemerintahan yang aman dan tertib.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui forum musyawarah desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi lebih responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara lebih tertib, sesuai dengan standar pelayanan, serta didukung oleh pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa sebagai bagian dari sistem pelayanan secara keseluruhan

5. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Melalui kegiatan koordinasi dengan aparat keamanan serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, program ini memastikan terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Kondisi tersebut sangat mendukung kelancaran proses pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemanfaatan anggaran pada sasaran ini diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan administratif, penyediaan fasilitas pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, yang tercermin dari capaian kinerja pelayanan publik yang melampaui target.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025 antara lain:

1. Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik, sehingga alokasi anggaran lebih tepat sasaran;
2. Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, yang mendorong pengendalian belanja;
3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara efektif, sehingga capaian kinerja tetap tinggi meskipun terdapat efisiensi anggaran;
4. Faktor teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, termasuk efisiensi pengadaan barang/jasa;
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran, yang mendukung pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025 dapat dikategorikan efektif dan efisien, dimana pemanfaatan anggaran telah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Perak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Dokumen ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan LKJIP dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi terkait, memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan capaian kinerja Kecamatan Perak. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendukung proses pengambilan kebijakan serta mendorong partisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam dokumen ini digunakan sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna memastikan tercapainya visi dan misi Kecamatan Perak sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan akuntabel.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Perak Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang bersifat rutin, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan Kecamatan Perak pada Tahun 2025 pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran

menunjukkan tingkat penyerapan yang optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut pada periode berikutnya, antara lain kebutuhan penambahan personel serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya penguatan SDM tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan ke depan.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Perak Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Perak telah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Baik, dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 89,97 persen terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Tahun 2025. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan penjelasan atas capaian kinerja organisasi Kecamatan Perak Tahun 2025 pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Perak Tahun 2025, kinerja Kecamatan Perak secara umum menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,97% dan predikat kinerja organisasi berada pada kategori “Baik” . Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Ditinjau dari masing-masing sasaran strategis, capaian kinerja menunjukkan variasi tingkat keberhasilan. Pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, capaian kinerja mencapai 91,79%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Sementara itu, pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, capaian kinerja mencapai 102,72%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek akuntabilitas, tata kelola, dan pengawasan internal. Selanjutnya, pada

sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, capaian kinerja mencapai 105,38%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah meningkat secara signifikan dan melampaui target yang direncanakan .

Secara agregat, total capaian kinerja sebesar 269,9% dari tiga sasaran strategis yang diukur menunjukkan bahwa kinerja organisasi berada pada jalur yang positif dan sebagian besar indikator kinerja telah tercapai bahkan melampaui target. Meskipun demikian, terdapat faktor koreksi nilai AKIP yang turut mempengaruhi nilai akhir capaian kinerja, sehingga diperlukan penguatan pada aspek kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara substansial.

Dari sisi efektivitas pemanfaatan sumber daya, capaian kinerja yang relatif tinggi dapat dicapai meskipun terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran juga mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berorientasi pada hasil (result oriented).

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan evaluasi kinerja daerah. Selain itu, peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi Kecamatan Perak Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dalam pencapaian sasaran strategis, dengan sebagian besar indikator kinerja telah tercapai sesuai target bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kualitas manajemen kinerja, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara

berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan pembangunan daerah

4.2. Inovasi dan Penghargaan

- **Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)**

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel semakin tinggi. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik yang prima.

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, sebagai wilayah administratif yang memiliki keragaman sosial dan potensi ekonomi, memerlukan inovasi pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, lahirlah gagasan inovasi “Kecamatan Tersenyum” – Transparansi, Responsif, dan Nyaman untuk Masyarakat.

Inovasi ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan, meningkatkan kecepatan respons terhadap kebutuhan warga, serta menciptakan suasana pelayanan yang ramah dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Penghargaan**

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Jombang, Kecamatan Perak memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,04 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian nilai tersebut meningkat jika dibandingkan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sebesar 74,90.

Penetapan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang menilai ketepatan desain dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, capaian sasaran strategis RB, serta dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dibandingkan periode sebelumnya, Kecamatan Perak menunjukkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek pengelolaan Reformasi Birokrasi,

kualitas rencana aksi, serta capaian sasaran strategis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian tersebut menjadi dasar untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

4.3. Upaya Perbaikan

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**

Dalam rangka meningkatkan capaian tujuan dimaksud, Kecamatan Perak akan melakukan serangkaian upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan fungsi pembinaan, pengawasan, serta koordinasi kewilayahan. Upaya tersebut diawali dengan penyusunan dan penetapan Surat Keputusan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan sebagai dasar kelembagaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa.

Selanjutnya, Kecamatan Perak akan menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, yang mencakup pembinaan terhadap penyusunan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, pengelolaan BUMDes, fasilitasi rancangan peraturan desa, penatausahaan aset desa, serta pemutakhiran profil desa. Upaya ini didukung dengan peningkatan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, Kecamatan Perak akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa, serta mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan. Seluruh kegiatan tersebut akan didukung dengan penataan administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung kegiatan secara tertib, konsisten, dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat koordinasi kewilayahan, Kecamatan Perak akan mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum-forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Fasilitasi pertemuan Forkopimcam akan dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, disertai dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur dan terdokumentasi.

Upaya perbaikan juga diarahkan pada penguatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, penguatan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pemerintah desa, serta unsur terkait dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan akan terus ditingkatkan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan berkelanjutan

2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Perak akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan. Forum ini diharapkan menjadi sarana partisipatif bagi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, Kecamatan Perak akan meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui berbagai media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta memperkuat tindak lanjut atas hasil SKM dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten dan terdokumentasi. Tindak lanjut tersebut akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur dan kualitas layanan.

Upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui percepatan waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada jenis layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Untuk mendukung profesionalisme petugas layanan, Kecamatan Perak akan menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan

kepada seluruh petugas layanan, serta menerapkan mekanisme reward dan punishment guna meningkatkan motivasi, disiplin, dan integritas aparatur.

Di samping itu, Kecamatan Perak akan melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, termasuk penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, penataan area parkir, serta penyediaan sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung **“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”**

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, Kecamatan Perak akan terus meningkatkan kualitas perumusan rencana aksi Reformasi Birokrasi melalui penyusunan rencana aksi yang lebih efektif, efisien, dan inovatif. Rencana aksi tersebut akan disusun berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi, hasil evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil dan perubahan yang mampu mengungkit ketercapaian target indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Kecamatan Perak juga akan menyempurnakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal dengan tujuan menghasilkan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kinerja. Evaluasi terhadap catatan dan rencana tindak lanjut akan dilakukan secara berkelanjutan, dengan penyesuaian dan penambahan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode atau triwulan berikutnya.

Penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan terus ditingkatkan pada seluruh pegawai, khususnya Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, agar Reformasi Birokrasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Perak akan melakukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan terhadap program pembangunan Zona Integritas berdasarkan isu strategis, permasalahan yang dihadapi, serta catatan dan rekomendasi

hasil evaluasi. Upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga akan terus dilakukan sesuai ketentuan, dengan berkoordinasi secara aktif dengan Tim SPIP Kabupaten.

Dalam aspek manajemen kinerja aparatur, Kecamatan Perak akan memperbaiki ketepatan waktu penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Penguatan mekanisme kerja dan manajemen kinerja akan dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan pemberian umpan balik perilaku kerja agar nilai-nilai BerAKHLAK benar-benar melekat dalam praktik kerja sehari-hari dan tidak hanya bersifat administratif atau simbolik



Perak, 6 Januari 2026
CAMAT PERAK

Drs. SUPRIYONO
Pembina Tingkat I
NIP. 197010131992011011

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Penetapan IKU**
- 3. KKPT**
- 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
- 5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja**
- 6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi**
- 7. Pengukuran Kinerja**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/172/415.57/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPRIYONO
Jabatan : Camat Perak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

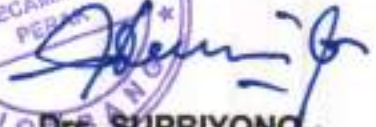
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Jombang, Januari 2025
PIHAK PERTAMA
Camat Perak



Drs. SUPRIYONO
NIP 197010131992011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	74,80
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8,18

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.015.501.054
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Perak	85,3	5.813.750
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	190.989.600
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	12.120.500
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	5.700.000

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	156.551.300
Jumlah					3.386.676.204

 **PIHAK KEDUA**
Bupati Jombang



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Jombang, 20 Januari 2025
PIHAK PERTAMA
Camat Perak

Drs. SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.7.2.7/1009/415.63/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUPRIYONO
Jabatan : Camat Perak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 24 September 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

PIHAK PERTAMA
Camat Perak
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si



Drs. SUPRIYONO
NIP 197010131992011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,18
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Perak	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,80
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Perak	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.061.016.542	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.438.750	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 90.353.250	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 9.500.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 86.388.200	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.037.500	APBD
	Rp. 3.254.734.242	

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 24 September 2025

PIHAK PERTAMA
Camat Perak

Ditandatangani secara elektronik



Drs. SUPRIYONO
NIP 197010131992011001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: SUPRIYONO
NIP	: 197010131992011001
Jabatan	: Camat Perak
Tugas Pokok	: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; LKJIP KEC. PERAK 2024 9 i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
Fungsi	: 1. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan - Menyelaraskan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. - Menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah - Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari dinas/instansi vertikal di wilayah kecamatan. - Mengembangkan hubungan kerja antar desa dan/atau kelurahan. - Menyelesaikan konflik administratif antardesa/kelurahan. 3. Pelayanan Publik - Menyediakan pelayanan administratif kepada masyarakat seperti KTP, KK, surat pindah, dan sebagainya (jika didelegasikan). - Menjamin kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 4. Pembinaan dan Pengawasan - Melakukan pembinaan terhadap kepala desa/lurah dan perangkatnya. - Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di bawahnya. 5. Pelaksanaan Fungsi Penunjang - Membantu pelaksanaan tugas-tugas teknis lain seperti statistik, arsip, dan kepegawaian sesuai kebutuhan wilayah.

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Perak
		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Indikator ini mengukur persentase rata-rata capaian kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penilaian kinerja individu dalam satu tahun berjalan (tahun n)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah Indeks komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak tahun n	Hasil survey IKM dan IPP Kecamatan Perak
		Nilai Paten Kecamatan Perak	Indikator ini mengukur nilai hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan standar pelayanan minimal dan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah	Nilai PATEN Kecamatan Perak Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
		Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Indikator ini mengukur persentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Agama (PHBA), dan monitoring serta evaluasi (monev) bidang sosial budaya yang berhasil dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan (tahun n) dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan PHBN / PHBA dan monev sosial budaya

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) yang telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Forkopimcam
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Indikator ini mengukur persentase laporan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan ketertiban umum (Trantibum) yang telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang dalam tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total laporan kasus yang dievaluasi	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait ----- -----x100% Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
		Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Indikator ini mengukur persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang wajib melaporkan di tahun berjalan (tahun n)	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa ----- ---X100% Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
		Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Indikator ini mengukur persentase desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif berfungsi, dibandingkan dengan jumlah seluruh desa dalam wilayah kecamatan atau daerah selama tahun berjalan (tahun n)	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif - ----- -----x100% Jumlah Desa	Dokumen RKPDesa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif
3	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	Indikator ini mengukur persentase realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Bareng selama tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total nilai ketetapan pajak yang dibebankan (target) pada tahun tersebut	Persentase Pelunasan PBB=(Jumlah ketetapan PBB / Realisasi pembayaran PBB)×100%	Pasti Bayar Bapenda

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Indikator ini mengukur tingkat realisasi penggunaan anggaran belanja oleh Kecamatan Perak selama tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Perak	$\text{Persentase Serapan Anggaran} = \left(\frac{\text{Pagu Anggaran Kecamatan Perak}}{\text{Realisasi Belanja Kecamatan Perak}} \right) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Jabatan : Camat Perak

Tugas pokok : menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap 6 aspek kinerja kecamatan: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Umum 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi IKKK Kec. Perak

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Perak diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Perak melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.	$IKPP = \frac{\{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)\}}{2}$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Perak (Hasil Survey IKM Kec. Perak melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Perak)

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik prima. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Komponen Penilaian RB terdiri dari : 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB PD yang terdiri dari: ? Pengelolaan Reformasi Birokrasi ? Rencana Aksi ? Monitoring dan Evaluasi 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB PD terdiri dari: ? Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ? Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Kec. Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi RB Kec. Perak
		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kec. Perak
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah, khususnya pada tingkat kecamatan mampu melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Nilai PATEN 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan 4. Tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan 6. Peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 7. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah 8. Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan 9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum 10. Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik	Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Perak

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam memfasilitasi, membina, dan mendorong partisipasi masyarakat desa dan kelurahan agar mampu mengelola potensi, sumber daya, serta kegiatan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Perak
		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kondisi ketentraman serta ketertiban masyarakat melalui kegiatan pencegahan, penanganan, dan penegakan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan 2. Penanganan Bencana di Kecamatan	Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Perak
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan daerah dan desa. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya serta Ketentraman dan ketertiban umum, Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)	Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Perak

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung peningkatan kinerja aparatur dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Perak tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Perak
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	Pelunasan PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah nominal pembayaran PBB-P2 yang diterima (realisasi) dari wajib pajak di seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Perak dalam tahun pajak berjalan, dibandingkan dengan total ketetapan PBB-P2 (nilai SPPT) yang diterbitkan untuk Kecamatan Perak pada tahun yang sama.	$\text{Persentase Pelunasan PBB} = \frac{(\text{Realisasi Penerimaan (PBB-P2) Kecamatan Perak}}{\text{Total Ketetapan PBB-P2 Kecamatan Perak}} \times 100\%$	1. Daftar Ketetapan PBB-P2 Kecamatan Perak (SPPT per desa). 2. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Perak
6	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Serapan anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi belanja Kecamatan Perak yang telah dibayarkan dan tercatat pada sistem keuangan daerah hingga periode pengukuran, dibandingkan dengan total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Perak Tahun 2025.	$\text{Persentase Serapan Anggaran} = \frac{(\text{Realisasi Belanja / Total Anggaran Belanja di DPA Kecamatan Perak Tahun 2025})}{100\%}$	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Perak Tahun 2025. 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Perak.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: SUPRIYONO
NIP	: 197010131992011001
Jabatan	: Camat Perak
Tugas Pokok	: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; LKJIP KEC. PERAK 2024 9 i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
Fungsi	: 1. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan - Menyelaraskan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. - Menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah - Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari dinas/instansi vertikal di wilayah kecamatan. - Mengembangkan hubungan kerja antar desa dan/atau kelurahan. - Menyelesaikan konflik administratif antardesa/kelurahan. 3. Pelayanan Publik - Menyediakan pelayanan administratif kepada masyarakat seperti KTP, KK, surat pindah, dan sebagainya (jika didelegasikan). - Menjamin kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 4. Pembinaan dan Pengawasan - Melakukan pembinaan terhadap kepala desa/lurah dan perangkatnya. - Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di bawahnya. 5. Pelaksanaan Fungsi Penunjang - Membantu pelaksanaan tugas-tugas teknis lain seperti statistik, arsip, dan kepegawaian sesuai kebutuhan wilayah.

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Perak
		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Indikator ini mengukur persentase rata-rata capaian kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penilaian kinerja individu dalam satu tahun berjalan (tahun n)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah Indeks komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak tahun n	Hasil survey IKM dan IPP Kecamatan Perak
		Nilai Paten Kecamatan Perak	Indikator ini mengukur nilai hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan standar pelayanan minimal dan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah	Nilai PATEN Kecamatan Perak Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
		Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Indikator ini mengukur persentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Agama (PHBA), dan monitoring serta evaluasi (monev) bidang sosial budaya yang berhasil dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan (tahun n) dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan PHBN / PHBA dan monev sosial budaya

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) yang telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Forkopimcam
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Indikator ini mengukur persentase laporan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan ketertiban umum (Trantibum) yang telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang dalam tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total laporan kasus yang dievaluasi	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait ----- -----x100% Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
		Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Indikator ini mengukur persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang wajib melaporkan di tahun berjalan (tahun n)	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa ----- ---X100% Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
		Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Indikator ini mengukur persentase desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif berfungsi, dibandingkan dengan jumlah seluruh desa dalam wilayah kecamatan atau daerah selama tahun berjalan (tahun n)	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif - ----- -----x100% Jumlah Desa	Dokumen RKPDesa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif
3	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	Indikator ini mengukur persentase realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Bareng selama tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total nilai ketetapan pajak yang dibebankan (target) pada tahun tersebut	Persentase Pelunasan PBB=(Jumlah ketetapan PBB / Realisasi pembayaran PBB)×100%	Pasti Bayar Bapenda

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Indikator ini mengukur tingkat realisasi penggunaan anggaran belanja oleh Kecamatan Perak selama tahun anggaran berjalan (tahun n), dibandingkan dengan total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Perak	$\text{Persentase Serapan Anggaran} = \left(\frac{\text{Pagu Anggaran Kecamatan Perak}}{\text{Realisasi Belanja Kecamatan Perak}} \right) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: SUPRIYONO
NIP	: 197010131992011001
Jabatan	: Camat Perak
Tugas pokok	: menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Fungsi	: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan di tingkat kecamatan Perak	0	0	75	Indeks	"Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) belum ada dasar penetapan dari tahun n-1. Kecamatan perak menetapkan target minimal 75 dari bobot maksimal 100 sebagai standar awal kinerja dengan rincian kontribusi aspek berikut: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total bobot 20 ditetapkan target 17.50 dengan capaian 88% 2. Apek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 ditetapkan target 33,6 dengan capaian 76% 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 ditetapkan target 6 dengan capaian 75% 4. Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 ditetapkan target 3 dengan capaian 75 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 ditetapkan target 9 dengan capaian 75% 6. Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 ditetapkan target 5.9 dengan capaian 49% Dengan demikian, penetapan target IKKK minimal 75 tahun 2025 bersifat realistis dan proporsional, mencerminkan kesiapan Kecamatan perak dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja terpadu. Capaian aktual 75 poin menjadi baseline kinerja tahun pertama, sekaligus landasan untuk perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya melalui penguatan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan. "

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.8	8,13	8.18	Indeks	"Berdasarkan SK Bupati nomor: 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 hasil Kecamatan perak adalah 8,13 melebihi target kinerja yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2025 ditetapkan target IKPP 8,65.. Dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP, dengan rumus penghitungan sebagai berikut: $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$ $IKPP = 8,13 - IKM = 93,53 - IPP = 3,45$ Untuk dapat mencapai target kinerja tersebut akan dilakukan strategi sebagai berikut: 1. IKM Hasil survey IKM Tahun 2025 yaitu 97.17 pada aplikasi sukma santri dengan 5 jenis layanan yaitu Fasilitas KTP-elektronik, Fasilitas Kartu Keluarga (KK), Fasilitas SKCK, Fasilitas Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitas Surat Keterangan lainnya terdapat unsur layanan dengan penilaian terendah yaitu waktu, kompetensi petugas, sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. a.Waktu Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan. b.Kompetensi petugas •Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. •Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama •Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang c.Sarana dan Prasarana •Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas) 2. IPP Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2025 nilai IPP Kecamatan perak adalah 3,45 Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut: a. Aspek Profesionalisme SDM •Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin •Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment b.Aspek Sarana dan Prasarana •Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas) c.Sistem Informasi Pelayanan Publik •Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan "

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	70	74,90	75	Indeks	"Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan perak Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10006/415.10/2024 tanggal 12 Desember 2024, diketahui bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan perak Tahun 2024 sebesar 74,90 dengan kategori BB . Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka target IRB Kecamatan perak Tahun 2025 ditetapkan sebesar 75, atau meningkat 0,1 poin dari capaian tahun sebelumnya. Nilai IRB merupakan indeks komposit yang disusun dari dua komponen utama, yaitu: 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB Perangkat Daerah dengan bobot 10% ditargetkan 6,47 dengan rincian - Pengelolaan Reformasi Birokrasi ditargetkan nilai 1,31 -Renca Aksi ditargetkan nilai 2,7 -Monitoring dan Evaluasi nilai 2,46 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB Perangkat Daerah dengan bobot 90%. ditargetkan 68,53 dengan rincian - Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ditargetkan 38,50 - Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional ditargetkan 30,03 Peningkatan nilai IRB tahun 2025 difokuskan pada komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB Perangkat Daerah pada Komponen Rencana Aksi, yaitu dari 2,67 menjadi 2,70, untuk mencapai nilai tersebut Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan hasil analisis permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini
4	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73	74,64	74.80	Nilai	Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor X.700/568/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2024, diketahui bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Perak sebesar 74,64. Karena target kinerja tahun sebelumnya telah tercapai, maka pada tahun 2025 Kecamatan Perak menetapkan target yaitu 74,80. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi peningkatan kinerja serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan tata kelola dan pelaksanaan SAKIP di tahun berikutnya

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
5	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	76	%	"Pada tahun 2024 belum ada Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Penetapan target 76% didasarkan pada batas minimal ccapaian nilai aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rincian sebagai berikut; 1. Nilai Paten (Hasil penilaian Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)) bobot 4 ditarget 2 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bobot 4 ditargetkan 3.76 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan bobot 4 ditargetkan 2.848 4. Tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat bobot 4 ditargetkan 3 5. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan total bobot 8 dengan rincian: -Item jenis Kewenangan sesuai SK Bupati/Walikota yang dilaksanakan oleh kecamatan dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota bobot 4 target 4 - Tingkat kepatuhan pelaporan pendelegasian kewenangan bobot 4 target 3 6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Bupati bobot 4 ditargetkan 3 7. Fasilitasi kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bobot 4 ditargetkan 3 8. Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan (rumah bersama kecamatan ditujukan untuk mengutakan peran camat dalam mengkoordinir penyuluh/pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh/pendamping setiap tahunnya agar masing-masing penyuluh/pendamping tidak berjalan sendiri-sendiri) bobot 4 ditargetkan 3 9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum (DO : Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan pada tahun berkenaan yang dikoordinasikan/dilaporkan kepada instansi Kabupaten terkait) bobot 4 ditargetkan 3 10. Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik bobot 4 ditargetkan 3 (DO : Inovasi yang dimaksud yakni hasil proses kreatif, bukan hanya benda atau produk yang kemunculannya tiba-tiba. Inovasi memiliki karakteristik : 1. Relevansi inovasi dengan permasalahan dan peningkatan layanan 2. Proses kreatif perumusan inovasi mencakup aspek kolaborasi antar elemen 3. Proses kreatif implementasi program inovasi mencakup aspek penggunaan sumber daya yang efisien dan hasil yang efektif 4. Evaluasi dan penyempurnaan program secara berkelanjutan Total Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan bobot 44 ditargetkan 33.6 dengan capaian 76%

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
6	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	75	%	"Pada tahun 2024, Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan belum memiliki capaian nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75%, berdasarkan batas minimal capaian indikator pada aspek tersebut. Indikator pertama adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang mencakup kegiatan penyelarasan program kerja perangkat daerah kabupaten/kota dengan program kerja kecamatan, serta koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta di wilayah kecamatan. Indikator ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 3. Indikator kedua yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Indikator ini juga memiliki bobot 4 dengan target nilai 3. Secara keseluruhan, Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki total bobot 8, dengan target nilai 6 dan capaian kinerja sebesar 75%. Target ini diharapkan dapat mendorong peningkatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.
7	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	49	%	"Pada tahun 2024, Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum belum memiliki capaian nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 49%, berdasarkan batas minimal capaian indikator pada aspek tersebut. Indikator pertama adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup kegiatan koordinasi penanganan konflik sosial, ketertiban umum, dan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan. Indikator ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 4. Indikator kedua, Penanganan Bencana di Kecamatan, mengacu pada Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, di mana kecamatan berperan mendukung BPBD kabupaten/kota dalam pemantauan dan bantuan teknis kebencanaan. Bobot indikator ini 4 dengan target nilai 1. Indikator ketiga adalah Peningkatan Ketangguhan Desa/Kelurahan terhadap Bencana, yang mencakup penguatan kelembagaan, kebijakan PRB, serta keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Bobot indikator ini 4 dengan target nilai 0,9. Secara total, bobot aspek sebesar 12 dengan target nilai 5,9, dan capaian kinerja ditetapkan sebesar 49%. Target ini diharapkan mendorong peningkatan efektivitas koordinasi, kesiapsiagaan bencana, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
8	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	75	%	Pada tahun 2024, Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum memiliki capaian nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75%, berdasarkan batas minimal nilai capaian pada aspek tersebut. Indikator pertama adalah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan. Indikator ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 3. Indikator kedua yaitu Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, yang bertujuan mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Kegiatan dilaksanakan melalui dialog rutin dalam forum-forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Indikator ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 3. Indikator ketiga adalah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), yang mencakup kegiatan fasilitasi pertemuan rutin triwulanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Indikator ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 3. Secara keseluruhan, Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki total bobot 12, dengan target nilai 9 dan capaian kinerja sebesar 75%.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
9	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	75	%	Pada tahun 2024, Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum memiliki capaian nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75%, berdasarkan batas minimal capaian indikator pada aspek tersebut. Indikator utama pada aspek ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kegiatan meliputi pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Pemerintahan Desa Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh dokumen administratif seperti SK Tim Binwas, rencana kerja tahunan (meliputi RKPDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, profil desa, serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa), dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja. Aspek ini memiliki bobot 4 dengan target nilai 3 dan capaian kinerja sebesar 75%.
10	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak		100	100	100	%	Penetapan target Pelunasan PBB Kecamatan Perak 100% adalah realistis dan strategis, dengan catatan: 1. Pengelolaan data akurat, 2. Koordinasi lintas unit berjalan efektif, 3. Monitoring dan sosialisasi dilakukan secara konsisten. Capaian 100% menjadi indikator keberhasilan optimalisasi PAD serta peningkatan tata kelola pajak daerah
11	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025		100	94,19	100	%	Penetapan target penyerapan anggaran sebesar 100% mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1. Kebijakan efisiensi dan efektivitas anggaran Pemerintah Daerah yang mendorong optimalisasi pelaksanaan program tanpa pemborosan. 2. Standar minimal capaian kinerja keuangan yang umumnya ditetapkan di atas 90% untuk menunjukkan kinerja anggaran yang baik. 3. Evaluasi penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi Kecamatan Perak cenderung stabil namun belum optimal mencapai 100%. 4. Ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan program yang realistis untuk dicapai selama tahun anggaran 2025.

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SUPRIYONO	1	NAMA	WARSUBI
2	NIP	197010131992011001	2	NIP	-
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	null / null
4	JABATAN	Camat Perak	4	JABATAN	Bupati
5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang
HASIL KERJA					
No	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		75	penguatan_internal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak		8,18	penerima_layanan
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		76%	penerima_layanan
		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		75%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum		49%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		75%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		75%	penguatan_internal
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		75	penguatan_internal
		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		74,80	penguatan_internal
4	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak		100%	penguatan_internal
5	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025		100%	anggaran
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tesebut		
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
3	Kompeten				

PERILAKU KERJA		
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . -Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai denga target dan standart kualitas yang ditetapkan
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SUPRIYONO	1	NAMA	WARSUBI
2	NIP	197010131992011001	2	NIP	-
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	/
4	JABATAN	Camat Perak	4	JABATAN	Bupati
5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		75	penguatan_internal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak		8,18	penerima_layanan
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		76%	penerima_layanan
		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		75%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum		49%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		75%	penguatan_internal
		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		75%	penguatan_internal
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		75	penguatan_internal
		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		74,80	penguatan_internal
4	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak		100%	penguatan_internal
5	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025		100%	anggaran
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				

PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . -Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai denga target dan standart kualitas yang ditetapkan
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: Drs. SUPRIYONO
NIP	: 197010131992011011
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan	: Camat Perak
Unit Kerja	: Kecamatan Perak

- Rencana Hasil Kerja :**
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
- Indikator :**
- 1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak
 - 2. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur
- Tribulan 1 :**
- Renaksi**
- 1. Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1
Target : 1 Kegiatan
 - 2. Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP
Target : 1 Kegiatan
 - 3. Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja
Target : 3 Kegiatan
 - 4. Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja
Target : 1 Kegiatan
 - 5. Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1
Target : 1 Kegiatan
 - 6. Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur
Target : 1 Kegiatan
 - 7. Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI
Target : 1 Kegiatan
 - 8. Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja
Target : 1 Kegiatan
 - 9. Melakukan evaluasi kinerja tribulan 1
Target : 1 Kegiatan
- Tribulan 2 :**
- Renaksi**
- 1. Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Perak
Target : 3 Kegiatan
 - 2. Mengkoordinasikan dan mMonitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja
Target : 3 Kegiatan
 - 3. Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja
Target : 1 Kegiatan
 - 4. Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai
Target : 1 Kegiatan
 - 5. Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 2
Target : 1 Kegiatan
 - 6. Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur
Target : 1 Kegiatan
 - 7. Menyelia dan motoring kinerja aparatur
Target : 1 Kegiatan
 - 8. Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja
Target : 1 Kegiatan
 - 9. Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2
Target : 1 Kegiatan
- Tribulan 3 :**
- Renaksi**
- 1. Menyelenggarakan internalisasi untuk memastikan semua pegawai terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi
Target : 1 Dokumen
 - 2. Menyelenggarakan rapat dialog kinerja bagi pegawai tentang target tribulan 3 dan realisasi tribulan 2
Target : 1 Dokumen
 - 3. Mengkoordinasikan penyusunan pengukuran kinerja tribulanan sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, dan anggaran dalam pencapaian kinerja

- Target : 1 Dokumen
4. Mengkoordinasikan pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja
- Target : 1 Dokumen
5. Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3
- Target : 1 Dokumen
6. Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2
- Target : 1 Laporan

Tribulan 4 :

Renaksi

-

Rencana Hasil Kerja :

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Indikator :

1. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak
2. Nilai Paten Kecamatan
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
6. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu
7. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1 dan IPP n-1
- Target : 1 Kegiatan
2. Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM dan IPP Kecamatan Perak
- Target : 1 Kegiatan
3. Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM dan IPP
- Target : 1 Kegiatan
4. Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat
- Target : 1 Kegiatan
5. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1
- Target : 1 Kegiatan
6. Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Perak
- Target : 1 Kegiatan
7. Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN
- Target : 1 Kegiatan
8. Monitoring pelaksanaan pelayanan PATEN
- Target : 3 Kegiatan
9. Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan
- Target : 1 Kegiatan
10. Monitoring dan evaluasi kegiatan sosial budaya
- Target : 1 Kegiatan
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan
- Target : 1 Kegiatan
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan
- Target : 1 Kegiatan
13. Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum
- Target : 1 Kegiatan
14. Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam
- Target : 1 Kegiatan
15. Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum
- Target : 1 Kegiatan
16. Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam
- Target : 1 Kegiatan
17. Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 3 Kegiatan
18. Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait
- Target : 3 Kegiatan
19. Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 1 Kegiatan
20. Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum
- Target : 3 Kegiatan
21. Mengevaluasi laporan Realisasi APBDes N-1
- Target : 13 Desa
22. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan realisasi APBDes N-1
- Target : 13 Desa
23. Monitoring pelaksanaan APBDes
- Target : 13 Desa
24. Mengkoodinasikan pembinaan PKK

- Target : 13 TP-PKK
25. Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes
- Target : 13 BUMDesa
26. Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes
- Target : 4 Kegiatan
27. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrebang kecamatan dalam rangka penentuan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
- Target : 1 Kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM dan IPP
- Target : 1 Kegiatan
2. Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat
- Target : 1 Kegiatan
3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pelayanan
- Target : 3 Kegiatan
4. Monitoring pelaksanaan pelayanan PATEN
- Target : 3 Kegiatan
5. Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN
- Target : 3 Kegiatan
6. Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN
- Target : 1 Kegiatan
7. Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan
- Target : 1 Kegiatan
8. Monitoring dan evaluasi kegiatan sosial budaya
- Target : 1 Kegiatan
9. Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum
- Target : 1 Kegiatan
10. Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam
- Target : 1 Kegiatan
11. Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum
- Target : 1 Kegiatan
12. Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam
- Target : 1 Kegiatan
13. Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 3 Kegiatan
14. Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait
- Target : 3 Kegiatan
15. Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 3 Kegiatan
16. Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum
- Target : 3 Kegiatan
17. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes
- Target : 13 Desa
18. Monitoring pelaksanaan APBDes
- Target : 13 Desa
19. Mengevaluasi laporan Realisasi APBDes TW 2
- Target : 13 Desa
20. Mengkoodinasikan pembinaan PKK
- Target : 13 TP-PKK
21. Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes
- Target : 13 BUMDesa
22. Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes
- Target : 4 Kegiatan

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik kecamatan Perak
- Target : 1 Dokumen
2. Mengkoordinasikan penyampaian informasi terkait pelayanan publik maupun hasil survey Kepuasan Masyarakat melalui berbagai media baik online maupun offline
- Target : 3 Laporan
3. Mengkoordinasikan perbaikan/penambahan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan sesuai dengan anggaran yang tersedia
- Target : 1 Dokumen
4. Monitoring dan mengevaluasi sebagai upaya peningkatan aspek konsultasi dan pengaduan secara tatap muka maupun online
- Target : 1 Dokumen
5. Monitoring pelaksanaan pelayanan PATEN
- Target : 3 Laporan
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penilaian PATEN
- Target : 1 Dokumen
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan PATEN
- Target : 1 Dokumen
8. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)

- Target : 1 Dokumen
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)
- Target : 1 Dokumen
10. Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)
- Target : 1 Laporan
11. Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan
- Target : 1 Dokumen
12. Mengevaluasi kegiatan sosial budaya
- Target : 1 Laporan
13. Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum
- Target : 1 Laporan
14. Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam
- Target : 1 Laporan
15. Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam
- Target : 1 Laporan
16. Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 1 Dokumen
17. Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait
- Target : 1 Dokumen
18. Melakukan evaluasi terhadap kasus pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- Target : 1 Dokumen
19. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes
- Target : 1 Dokumen
20. Menyelia pelaksanaan APBDes
- Target : 1 Dokumen
21. Pembinaan dan evaluasi penyusunan RKPDes tahun n+1
- Target : 1 Dokumen
22. Monitoring Musdes penetapan RKPDes tahun n+1
- Target : 1 Dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

-

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan

Indikator :

- 1. Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak
- 2. Indeks Reformasi Birokrasi

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Optimalisasi pengawasan pelunasan PBB
- Target : 1 Kegiatan
- 2. Melaksanakan Evaluasi Berkala pelunasan PBB sebelum tanggal jatuh tempo
- Target : 1 Kegiatan
- 3. Melaksanakan evaluasi penilaian RB tahun n-1
- Target : 1 Kegiatan
- 4. Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai RB
- Target : 1 Kegiatan
- 5. Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi RB
- Target : 1 Kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan Evaluasi Berkala pelunasan PBB sebelum tanggal jatuh tempo Target
- Target : 1 Dokumen
- 2. Melaksanakan Evaluasi Berkala Implementasi Rerormasi Birokrasi Target
- Target : 1 Dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan Evaluasi Berkala pelunasan PBB sebelum tanggal jatuh tempo
- Target : 1 Dokumen
- 2. Melaksanakan Evaluasi Berkala Implementasi Rerormasi Birokrasi
- Target : 1 Dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

-

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya pengelolaan anggaran Kecamatan Perak

Indikator :

- 1. Persentase serapan anggaran

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan supervisi pelaksanaan penyerapan anggaran

Target : 1 Kegiatan

- 2. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran

Target : 1 Kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap capaian realisasi anggaran Target

Target : 1 Dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap capaian realisasi anggaran

Target : 1 Dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

-

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 1

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	hasil penilaian AKIP (SAKIP) tahun 2024 adalah 76,64 dari hal ini capaian mencapai 102,2% dari target sebesar 73. ada beberapa catatan dalam dokumen SAKIP dari evaluator yang masih perlu diperbaiki pada tahun 2025	langkah-langkah yang ditempuh adalah : memperbaiki dokumen pendukung SAKIP (Dokumen perencanaan kinerja, LKJIP, evaluasi internal, evaluasi dokumen renstra, reward dan punishment, BA Evaluasi Akuntabilitas internal). Selain itu meningkatkan komitmen Pegawai Kecamatan Perak agar SAKIP semakin membudaya	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	hasil penilaian AKIP (SAKIP) tahun 2024 adalah 76,64 dari hal ini capaian mencapai 102,2% dari target sebesar 73. ada beberapa catatan dalam dokumen SAKIP dari evaluator yang masih perlu diperbaiki pada tahun 2025	langkah-langkah yang ditempuh adalah : memperbaiki dokumen pendukung SAKIP (Dokumen perencanaan kinerja, LKJIP, evaluasi internal, evaluasi dokumen renstra, reward dan punishment, BA Evaluasi Akuntabilitas internal). Selain itu meningkatkan komitmen Pegawai Kecamatan Perak agar SAKIP semakin membudaya	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilaksanakan rapat internal membahas dan mengkoordinasikan implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Tim SAKIP kecamatan yang diketuai oleh Sekcam Perak melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP target tribulan IV	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan dan monitoting implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	hasil penilaian AKIP (SAKIP) tahun 2024 adalah 76,64 dari hal ini capaian mencapai 102,2% dari target sebesar 73. ada beberapa catatan dalam dokumen SAKIP dari evaluator yang masih perlu diperbaiki pada tahun 2025	langkah-langkah yang ditempuh adalah : memperbaiki dokumen pendukung SAKIP (Dokumen perencanaan kinerja, LKJIP, evaluasi internal, evaluasi dokumen renstra, reward dan punishment, BA Evaluasi Akuntabilitas internal). Selain itu meningkatkan komitmen Pegawai Kecamatan Perak agar SAKIP semakin membudaya	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilaksanakan dan tidak ada kendala karena pencapai target kinerja tribulan 1 sudah mencapai 100%	dipertahankan dan akan memaksimalkan lagi pencapaian target kinerja sesuai target tribulanan dan angkas	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	membentuk TIM SAKIP yang diketuai oleh sekrtris Kecamatan Perak	sudah dilaksanakan	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilaksanakan dan tidak ada kendala karena pencapai target kinerja tribulan 1 sudah mencapai 100%	dipertahankan dan akan memaksimalkan lagi pencapaian target kinerja sesuai target tribulanan dan angkas	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilaksanakan dan tidak ada kendala karena pencapai target kinerja tribulan 1 sudah mencapai 100%	dipertahankan dan akan memaksimalkan lagi pencapaian target kinerja sesuai target tribulanan dan angkas	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilaksanakan rapat internal membahas dan mengkoordinasikan implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, eva;uasi dan capaian kinerja	Tim SAKIP kecamatan yang diketuai oleh Sekcam Perak melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP target tribulan IV	
2	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	- Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	mengkoordinasikan pembayaran PBB di Kecamatan Perak	13 desa	13 desa	100.00%	telah dilaksanakan koordinasi pembayaran PBB di Kecamatan Perak	Memastikan Pembayaran PBB sesuai dengan aturan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan sosialisasi pengisian Survey IKM kepada masyarakat	melakukan evaluasi hasil Survey IKM	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan Perak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Menampilkan link survey pengisian IKM pada ruang pelayanan	sudah dibuatkan sarana untuk mempermudah masyarakat melakukan Input Survey	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Melakukan koordinasi perbaikan sarana pendukung pelayanan dengan instansi terkait	melakukan pemeliharaan sarana pelayanan	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	sudah dilakukan sosialisasi atas informasi pengisian Survey IKM di ruang pelayanan	menambah sarana / media informasi untuk sosialisasi survey IKM	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan evaluasi atas hasil penilaian IPP tahun 2024	melakukan rapat koordinasi dan Evaluasi internal	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Perak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan nilai IPP tahun 2025	melakukan evaluasi atas hasil penilaian IPP tahun 2024 untuk strategi peningkatan nilai IPP tahun 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	memberi arahan kepada petugas layanan terkait penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung IPP	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	telah dilakukan supervisi pelaksanaan pelayanan publik setiap bulan	melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan evaluasi atas hasil penilaian PATEN tahun 2024 yang belum mencapai target	Koordinasi dengan instansi terkait perihal hasil evaluasi penilaian PATEN	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Perak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan evaluasi untuk menentukan langkah strategis dalam meningkatkan pencapaian nilai PATEN	melakukan evaluasi hasil penilaian PATEN	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penilaian PATEN	koordinasi dengan petugas pelayanan terkait pemeliharaan pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	telah dilakukan supervisi setiap bulan	melakukan rapat evaluasi pelayanan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan PHBN/ PHBA selama tribulan 1	melakukan koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan PHBN/PHBA	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	melakukan koordinasi pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan evaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	melakukab koordinasi dan evaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial dengan instansi terkait	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan evaluasi kegiatan sosial budaya	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya yang telah dilaksanakan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	melakukan koordinasi hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan identifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum lintas sektor	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi untuk menentukan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	hasil rekomendasi forkopimcam telah ditindaklanjuti	menyusu laporan hasil rekomendasi forkopimcam	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	telah dilakukan Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan perak	melakukan rapat koordinasi Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	telah dilakukan koordinasi dalam rangka membuat strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2024	13 desa	13 desa	100.00%	laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes tahun 2024 sudah lengkap sebanyak 13 laporan	tidak ada kendala. Dan membangun komunikasi yang baik kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa pengumpulan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2024	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	pada tribulan 1 melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Kasi PMD	sudah berjalan sesuai ketentuan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDesa baik secara langsung maupun via telp, wa	melaksnakaan rapat konferensi kepala desa secara rutin untuk membahas segala permasalahan pemerintahan desa termasuk penyusunan APBDes sesuai	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 desa					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan					

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan					
4	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Mengkoordinasikan realisasi anggaran pada tri bulan 1	22 %					
Rata-rata capaian					100.00%				

Atasan Langsung

Jombang, 31 Maret 2026
Camat Perak

WARSUBI
NIP. -

SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNLAN 2

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM dan IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Keterbatasan anggaran operasional sehingga perbaikan dilakukan secara bertahap	Memonitor efektivitas sarpras dalam mendukung peningkatan nilai IKM dan IPP	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Beberapa masyarakat belum familiar dengan penggunaan QR Code untuk pengisian survei digital.	Melanjutkan sosialisasi IKM secara konsisten setiap pelayanan kepada masyarakat.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Kegiatan ini menjadi bahan analisis untuk mendukung peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring untuk mendukung peningkatan capaian nilai IKM dan IPP Kecamatan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Hasil monitoring menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan baik sesuai SOP, meskipun masih terdapat beberapa masyarakat yang perlu dibimbing terkait kelengkapan dokumen.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan PATEN untuk mendukung capaian nilai IKM dan IPP Kecamatan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Petugas PATEN menjalankan tugas dengan baik dan sudah terbiasa memberikan pelayanan sesuai standar waktu yang ditetapkan.	Memasang alur pelayanan dan daftar persyaratan secara jelas agar masyarakat memahami sebelum mendaftar.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribunal II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kompetensi petugas dalam rangka penilaian dan penyelenggaraan pelayanan PATEN.	Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana prasarana dan pelayanan untuk memastikan standar PATEN terpenuhi.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribunal II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dengan lintas pihak dan desa dalam rangka mendukung ketertiban, ketenteraman, dan kegiatan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan Perak.	Mengkoordinasikan pengamanan bersama Polsek dan Koramil pada kegiatan skala besar (tarawih keliling, pengajian akbar).	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi kegiatan sosial budaya yang didelegasikan oleh Kabupaten untuk dilaksanakan di tingkat kecamatan.	Meningkatkan koordinasi dengan OPD kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan sosial budaya di kecamatan berikutnya.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring dan evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	ada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan sosial budaya di wilayah kecamatan dan desa.	Melakukan koordinasi dengan desa terkait pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan identifikasi dan deteksi dini permasalahan pada urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan	Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk percepatan penanganan permasalahan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	ada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Forkopimcam (Kapolsek, Danramil, dan KUA) terkait permasalahan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan.	Mendorong penyelesaian masalah secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi strategi penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum secara kolaboratif dengan Forkopimcam dan desa	Melaksanakan monitoring berkala dengan Forkopimcam terkait progres penyelesaian permasalahan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut bersama hasil rekomendasi Forkopimcam terkait penanganan permasalahan urusan pemerintahan umum dan ketenteraman wilayah.	Melaksanakan monitoring rutin bersama Forkopimcam terhadap progres tindak lanjut rekomendasi.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan deteksi dini potensi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan potensi gangguan keamanan serta ketertiban umum di wilayah kecamatan.	Melaksanakan monitoring berkala bersama Forkopimcam untuk penanganan masalah.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan pelanggaran Perda dan potensi gangguan keamanan serta ketertiban umum di wilayah kecamatan.	Melaksanakan monitoring rutin bersama Forkopimcam dan instansi terkait.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Pada Tribunal II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan potensi gangguan keamanan serta ketertiban umum secara terarah dengan Forkopimcam dan instansi terkait.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala bersama Forkopimcam untuk mengukur progres strategi penanganan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Pada Tribunal II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyeliaan tindak lanjut pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) serta ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di wilayah kecamatan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pada titik rawan pelanggaran Perda dan ketertiban umum.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 13 desa di wilayah Kecamatan Perak.	Melaksanakan monitoring berkala progres fisik dan keuangan pelaksanaan APBDes di desa	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 13 desa di wilayah Kecamatan Perak.	Melaksanakan monitoring berkala hingga akhir tahun agar progres kegiatan terkontrol.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 13 desa di wilayah Kecamatan Perak.	Melaksanakan monitoring berkala hingga akhir tahun agar progres kegiatan terkontrol.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi laporan Realisasi APBDes TW 2	13 desa	13 desa	100.00%	Pada Tribulan II Tahun 2025, Kecamatan Perak telah melaksanakan kegiatan evaluasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Triwulan II dari 13 desa di wilayah Kecamatan Perak.	Melakukan monitoring kegiatan fisik yang belum selesai agar dapat segera direalisasikan pada Triwulan III.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK					

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan					
2	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	mengkoordinasikan pembayaran PBB di Kecamatan	1 kegiatan					
3	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Mengkoordinasikan realisasi anggaran pada tri bulan 2	1 kegiatan					
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Perak	3 kegiatan					
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan					
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan					
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan					
Rata-rata capaian					100.00%				

Atasan Langsung

WARSUBI

NIP. -

Jombang, 31 Maret 2026

Camat Perak

SUPRIYONO

NIP. 197010131992011001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 3

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	- Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	mengkoordinasikan pembayaran PBB di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan pembayaran PBB telah dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan perangkat desa	Melaksanakan sosialisasi lanjutan secara langsung di desa/kelurahan mengenai pentingnya pembayaran PBB tepat waktu	
2	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	- Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	Mengkoordinasikan realisasi anggaran pada tri bulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	pelaksanaan koordinasi realisasi anggaran Triwulan 3 berjalan tertib dan memberikan dampak positif terhadap percepatan serapan anggaran kecamatan	Mendorong unit kerja terkait untuk segera menyelesaikan proses administrasi, pengadaan, dan pencairan dana.	
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengarahkan penyusunan Renstra dan Renja berbasis kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Proses penyusunan Renstra dan Renja telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan dan jadwal yang ditentukan	Melakukan evaluasi internal terhadap dokumen Renstra dan Renja untuk memastikan konsistensi dengan pelaksanaan kegiatan	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan dan menetapkan Target Kinerja untuk dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	kegiatan ini telah terlaksana efektif dan tepat waktu, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengendalian dan evaluasi kinerja kecamatan pada sisa tahun anggaran	Menjadikan Perubahan PK sebagai alat kendali kinerja dalam penyusunan laporan kinerja akhir tahun.	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja triwulanan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Forum rapat menjadi sarana efektif untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah perbaikan	Melakukan evaluasi progres tindak lanjut hasil Monev pada triwulan berikutnya.	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	mengarahkan dan menilai capaian indikator utama	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Mekanisme pengumpulan data capaian masih perlu ditingkatkan konsistensinya agar lebih cepat	Memastikan arahan pimpinan menjadi acuan kerja seluruh unit	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target	Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan rencana percepatan hingga akhir tahun.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Aparatur telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas, namun diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan	Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan tugas harian aparatur.	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Menyelia dan motoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Tingkat kehadiran aparatur secara umum sudah baik, meskipun masih ditemukan beberapa kasus keterlambatan dan ketidakteraturan waktu kerja pada unit tertentu.	Memberikan pembinaan langsung kepada aparatur yang belum konsisten dalam kehadiran dan pelaksanaan tugas.	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Komitmen bersama untuk mendukung pencapaian kinerja meningkat setelah adanya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.	Melakukan evaluasi bersama atas capaian program dan kendala pelaksanaan.	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak - Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	kegiatan evaluasi kinerja Triwulan 3 berjalan efektif, partisipatif	Memastikan semua program dan kegiatan mendukung pencapaian target tahunan secara menyeluruh.	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	pelaksanaan penyeliaan dan supervisi terhadap PKK dan BUMDes telah berjalan baik dan konstruktif, serta menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian masyarakat desa	Menjadikan PKK dan BUMDes sebagai mitra aktif dalam mendukung target kinerja kecamatan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	monitoring administrasi PKK dan BUMDes berjalan efektif dan memberikan dasar yang kuat untuk pembinaan kelembagaan masyarakat desa.	Mendorong pemerintah desa memberikan dukungan teknis dan pembinaan kepada PKK dan BUMDes.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi hasil penilaian IKM SMT 1	1 kali	1 kali	100.00%	Nilai rata-rata IKM Semester 1 berada pada kategori “Sangat Baik”, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kecamatan	Mendorong masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan terhadap layanan kecamatan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kali	1 kali	100.00%	Koordinasi lintas stakeholder menjadi strategi efektif dalam mendorong perbaikan layanan publik secara kolaboratif.	Melakukan rapat koordinasi tindak lanjut secara berkala.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kali	3 kali	100.00%	Stakeholder menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kinerja pelayanan setelah dilakukan evaluasi bersama.	Melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi progres perbaikan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyusun dan memutakhirkan seluruh SOP layanan publik	100 %	100 %	100.00%	Sebagian besar SOP telah diperbarui dan disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan pelayanan terkini.	Menyelesaikan penyusunan SOP untuk seluruh jenis layanan publik yang belum lengkap	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melakukan pelatihan internal (in-house training) terkait pelayanan prima, komunikasi efektif, dan sikap responsif.	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Terjadi peningkatan pemahaman petugas mengenai konsep pelayanan prima dan pentingnya komunikasi yang jelas serta empati kepada masyarakat.	Menjadikan SOP ini sebagai standar bagi semua petugas layanan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BumDes	12 BumDes	92.31%	Sebagian besar BUMDes telah aktif menjalankan unit usaha dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas.	Mendorong pengurus BUMDes untuk melakukan inovasi dalam pengembangan unit usaha sesuai potensi desa.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mencetak dan memasang SOP dan Maklumat Pelayanan di area pelayanan, papan informasi, serta media sosial resmi	100 %	100 %	100.00%	SOP dan Maklumat Pelayanan telah terpasang di seluruh titik layanan strategis dan mudah diakses masyarakat.	Menjadikan papan informasi sebagai media komunikasi aktif dengan masyarakat	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	12 TP-PKK	13 TP-PKK	108.33%	Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah	Penyelarasan program PKK dengan prioritas pembangunan desa dan kecamatan untuk efektivitas kegiatan	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melakukan Pembangunan atau perbaikan ramp kursi roda menuju ruang pelayanan.	1 unit	1 unit	100.00%	erdapat peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses menuju ruang pelayanan.	Menyusun laporan capaian kegiatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Sebagian besar pelaksana pelayanan telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai SOP.	Memberikan apresiasi bagi pelaksana yang berkinerja baik	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Proses pelayanan PATEN secara umum berjalan lancar dan sesuai standar prosedur.	Menambahkan petunjuk atau informasi layanan yang lebih jelas bagi masyarakat.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Sebagian besar desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan cukup baik dan tepat waktu.	Meningkatkan transparansi pengelolaan APBDes kepada masyarakat	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi evaluasi PATEN dengan Bagian Pemerintahan telah berjalan dengan baik dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan. Diperlukan tindak lanjut berupa peningkatan fasilitas, pembinaan SDM, serta penyederhanaan prosedur agar pelaksanaan PATEN semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan agar kenyamanan masyarakat lebih terjamin. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan internal bagi petugas PATEN guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi persiapan penilaian PATEN telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kesiapan yang semakin matang dari kecamatan. Dengan penyelesaian kelengkapan dokumen, pembenahan sarana, dan peningkatan kapasitas petugas, diharapkan hasil penilaian PATEN dapat optimal dan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang prima di tingkat kecamatan	Menyelesaikan pembenahan ruang pelayanan dan kelengkapan administrasi sebelum jadwal penilaian. Melaksanakan simulasi pelayanan dan pembinaan teknis kepada petugas front office untuk meningkatkan kesiapan. Berkoordinasi intensif dengan Bagian Pemerintahan Kabupaten terkait jadwal dan teknis pelaksanaan penilaian.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Penyeliaan pelaksanaan APBDes telah berjalan baik dan membantu memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Ke depan, perlu ditingkatkan ketepatan waktu pelaporan serta pembinaan administrasi agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel dan transparan.	Melaksanakan pembinaan dan asistensi penyusunan laporan realisasi APBDes bagi desa yang mengalami kendala. Menjadwalkan kunjungan lapangan tambahan untuk memastikan tindak lanjut dari hasil penyeliaan sebelumnya. Berkoordinasi dengan pendamping desa agar memberikan pendampingan teknis secara rutin kepada pemerintah desa.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan PHBN dalam rangka HUT RI berjalan dengan baik dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor yang kuat, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan penuh semangat nasionalisme.	Menyusun jadwal kegiatan PHBN tingkat kecamatan dan membagikan kepada seluruh panitia dan desa. Mengusulkan tambahan dukungan anggaran serta kerja sama dengan pihak swasta/CSR untuk membantu kegiatan. Melaksanakan rapat teknis lanjutan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan keamanan menjelang hari pelaksanaan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan PHBN dan PHBA telah berjalan baik dan berhasil menciptakan suasana aman, tertib, dan meriah. Untuk ke depan, perlu peningkatan koordinasi lintas sektor serta perencanaan yang lebih matang agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.	Melaksanakan rapat evaluasi pasca kegiatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menetapkan langkah perbaikan. Mendorong partisipasi aktif seluruh desa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA berikutnya. Mengusulkan tambahan dukungan anggaran dan keterlibatan CSR lokal untuk mendukung kegiatan masyarakat berskala besar.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pelaksanaan kegiatan PHBN dan PHBA di wilayah kecamatan berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, kebersihan, dan kesiapan teknis agar pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya semakin tertib, aman, dan meriah.	Menyusun laporan hasil evaluasi PHBN/PHBA untuk dijadikan acuan perbaikan kegiatan tahun berikutnya	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 desa	13 desa	100.00%	Koordinasi pembinaan pelaksanaan APBDes telah berjalan baik dan membantu memperkuat tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Diperlukan pembinaan berkelanjutan agar seluruh desa dapat melaksanakan APBDes secara transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Melakukan pendampingan lanjutan bagi desa yang mengalami kendala dalam pelaporan APBDes. Mengadakan rapat koordinasi rutin setiap triwulan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan desa. Mendorong perangkat desa meningkatkan tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Kegiatan identifikasi dan deteksi dini permasalahan pemerintahan umum telah berjalan baik dan memberikan gambaran awal kondisi wilayah. Diperlukan langkah lanjutan berupa koordinasi lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan agar setiap permasalahan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat.	Melakukan pemantauan dan pembinaan lebih intensif kepada desa/kelurahan terkait administrasi pemerintahan. Menyusun daftar permasalahan prioritas yang perlu dikoordinasikan dengan Forkopimcam. Meningkatkan komunikasi dengan perangkat desa agar laporan potensi masalah dapat segera disampaikan ke kecamatan	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Koordinasi strategi penyelesaian pelanggaran perda dan gangguan keamanan serta ketertiban umum telah berjalan dengan baik. Namun, dibutuhkan peningkatan kolaborasi antarinstansi dan pengawasan berkelanjutan agar tindakan pencegahan dan penegakan perda dapat terlaksana secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah kecamatan.	Mengusulkan peningkatan intensitas patroli bersama antara Satpol PP, Polsek, dan perangkat desa. Melakukan sosialisasi perda dan pentingnya menjaga ketertiban umum melalui kegiatan masyarakat dan pertemuan desa. Menyusun rencana aksi bersama Forkopimcam untuk menangani pelanggaran yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam telah berjalan dengan baik dan menghasilkan langkah konkret dalam menjaga ketertiban serta kelancaran pemerintahan di wilayah kecamatan. Ke depan, diperlukan peningkatan koordinasi, pelaporan berkala, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan agar tindak lanjut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.	Menyusun daftar tindak lanjut hasil rapat Forkopimcam dan melakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaannya. Mendorong perangkat desa/kelurahan untuk aktif melaporkan kondisi wilayah dan kendala yang dihadapi. Menjadwalkan rapat koordinasi Forkopimcam secara berkala untuk membahas perkembangan isu pemerintahan umum.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum telah berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan langkah penyelesaian yang lebih terarah. Ke depan, perlu penguatan komunikasi lintas sektor, penyusunan pedoman bersama, serta peningkatan keterlibatan desa agar penyelesaian permasalahan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan berkesinambungan.	Menyusun panduan atau mekanisme sederhana penanganan permasalahan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi Forkopimcam untuk memantau progres penyelesaian masalah. Menugaskan perangkat kecamatan untuk melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan di lapangan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Koordinasi penanganan permasalahan pelanggaran Perda dan gangguan keamanan serta ketertiban umum telah berjalan dengan baik. Diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat agar langkah pencegahan dan penegakan dapat berjalan lebih efektif serta menjaga kondusivitas wilayah kecamatan.	Menyusun jadwal koordinasi rutin bersama instansi terkait untuk evaluasi pelaksanaan penertiban. Mengusulkan penambahan dukungan personel dan sarana pengawasan di lapangan. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Perda dan pentingnya menjaga ketertiban umum.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi Forkopimcam telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kerja sama yang solid antar unsur pemerintahan di tingkat kecamatan. Ke depan, perlu peningkatan konsistensi pelaporan dan pengawasan agar hasil rekomendasi dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tepat waktu.	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam. Menyusun daftar status pelaksanaan rekomendasi sebagai bahan evaluasi rapat Forkopimcam berikutnya. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat desa dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil tindak lanjut.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan aktif dari masyarakat. Untuk peningkatan ke depan, diperlukan perbaikan pada aspek administrasi, pelaporan, serta komunikasi antar level pemerintahan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan kabupaten	Menyusun jadwal koordinasi rutin dengan desa/kelurahan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai arahan kabupaten. Memberikan pembinaan administrasi bagi pelaksana kegiatan agar pelaporan lebih tertib dan sesuai format. Mengusulkan rapat koordinasi lanjutan dengan dinas kabupaten terkait guna sinkronisasi program sosial budaya tahun berikutnya.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Kegiatan deteksi dini potensi pelanggaran Perda dan gangguan keamanan serta ketertiban umum telah berjalan dengan baik. Situasi wilayah relatif aman dan kondusif, namun perlu peningkatan koordinasi dan kesadaran masyarakat agar potensi gangguan dapat dicegah sejak dini	Melakukan sosialisasi kembali tentang ketentuan Perda kepada masyarakat bersama Satpol PP. Meningkatkan koordinasi dengan Forkopimcam dan perangkat desa untuk memperkuat pemantauan lapangan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Tindak lanjut hasil rekomendasi Forkopimcam telah berjalan cukup baik dan menunjukkan sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban serta kelancaran urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Diperlukan peningkatan konsistensi dan pelaporan agar setiap rekomendasi dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai tujuan bersama.	Menyusun daftar rekomendasi Forkopimcam beserta status pelaksanaannya untuk dipantau secara berkala. Melakukan koordinasi lanjutan dengan perangkat desa untuk percepatan tindak lanjut yang belum selesai.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum berjalan baik dan menghasilkan langkah konkret dalam menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Ke depan, perlu penguatan komunikasi lintas sektor serta peningkatan ketertiban administrasi agar penanganan permasalahan dapat lebih cepat dan tepat.	Menyusun rencana kerja tindak lanjut bersama Forkopimcam untuk setiap isu pemerintahan umum yang muncul.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Koordinasi permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan strategis untuk menjaga stabilitas wilayah. Namun, diperlukan peningkatan konsistensi komunikasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil rapat agar upaya penyelesaian permasalahan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.	Menetapkan jadwal koordinasi Forkopimcam secara berkala untuk pemantauan isu pemerintahan umum. Membuat notulen dan daftar tindak lanjut hasil rapat untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan. Mendorong keterlibatan aktif perangkat desa dalam setiap agenda koordinasi untuk memperkuat sinergi.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Proses identifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum telah berjalan dengan baik dan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual di lapangan. Diperlukan tindak lanjut berkelanjutan melalui pembinaan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan sistem administrasi agar permasalahan dapat diminimalkan dan kinerja pemerintahan umum semakin efektif.	Menyusun daftar prioritas permasalahan pemerintahan umum untuk ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya. Melakukan rapat koordinasi dengan desa/kelurahan untuk menyamakan data dan langkah perbaikan administrasi. Mengusulkan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelaporan.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Menyusun jadwal supervisi lanjutan untuk memantau implementasi tindak lanjut hasil evaluasi. Memberikan bimbingan teknis sederhana bagi aparat desa dalam perencanaan kegiatan sosial budaya. Mengkoordinasikan dukungan lintas sektor (seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga adat) dalam pelaksanaan tindak lanjut.	Koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya telah berjalan dengan baik dan menghasilkan langkah perbaikan nyata di tingkat desa. Ke depan, perlu penguatan sistem monitoring berkelanjutan agar rekomendasi evaluasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Kegiatan evaluasi sosial budaya telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan data yang berguna untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Diperlukan langkah pembinaan dan fasilitasi lebih lanjut agar kegiatan sosial budaya semakin berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat	Memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas bagi pengelola kegiatan sosial budaya di desa/kelurahan. Menyusun panduan sederhana untuk pelaporan dan dokumentasi kegiatan sosial budaya	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak - Nilai Paten Kecamatan Perak - Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan - Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu - Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya telah berjalan sesuai rencana, namun masih diperlukan peningkatan dalam aspek administrasi, koordinasi, dan dukungan sumber daya agar keberlanjutan kegiatan sosial budaya dapat terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.	Memberikan pendampingan administrasi kepada desa dalam penyusunan laporan kegiatan sosial budaya. Menjadwalkan supervisi lanjutan untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	
Rata-rata capaian					100.01%				

Atasan Langsung

Jombang, 31 Maret 2026
Camat Perak

WARSUBI
NIP. -

SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : Drs. SUPRIYONO

NIP : 197010131992011011

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	- Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Melakukan evaluasi terhadap capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan setiap triwulan dengan menelaah progres indikator kinerja, menganalisis faktor pendukung dan penghambat capaian, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan telah dilaksanakan setiap triwulan melalui telaah progres indikator kinerja serta analisis faktor pendukung dan penghambat capaian	Menyusun dan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kinerja Kecamatan pada periode berikutnya	
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai, khususnya Tim Pembangunan RB	Melanjutkan pembinaan, sosialisasi, dan internalisasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan RB	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Perbaikan rencana aksi telah dilakukan melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien, dan inovatif berdasarkan permasalahan riil serta hasil evaluasi tahun sebelumnya	Melaksanakan dan memantau rencana aksi yang telah diperbaiki serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Penyempurnaan proses monitoring dan evaluasi internal telah dilakukan untuk menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan Reformasi Birokrasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan rencana aksi serta pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Penyesuaian pengelolaan sistem kerja telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem kerja serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-Kinerja BKN secara berkelanjutan	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Tindak lanjut atas rekomendasi Tim Evaluator sebagaimana tercantum pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai arahan	Melaksanakan dan memantau pelaksanaan rekomendasi secara berkelanjutan serta mengintegrasikannya ke dalam perbaikan kinerja dan dokumen AKIP selanjutnya	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan penguatan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penye	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Proses pembangunan Zona Integritas telah dilanjutkan melalui penguatan dan perbaikan program guna meningkatkan efektifitas dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja	Melakukan penguatan implementasi program Zona Integritas dan pemantauan berkelanjutan untuk optimalisasi pelayanan dan kinerja organisasi	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Upaya peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan serta seluruh pegawai terhadap implementasi SPIP telah dilaksanakan mulai dari lingkungan pengendalian, manajemen risiko, hingga pemantauan pengendalian intern	Melakukan penguatan sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan implementasi SPIP secara berkelanjutan di lingkungan kerja	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melaksanakan sosialisasi kemasyarakatan, Monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindak lanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Mengarahkan Perangkat Daerah terkait tentang pentingnya menindaklanjuti aduan secara s	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Sosialisasi kemasyarakatan serta monitoring berkala kepada perangkat daerah terkait telah dilaksanakan untuk memastikan tindak lanjut aduan masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan	Mengarahkan dan memperkuat komitmen perangkat daerah terkait agar menindaklanjuti aduan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Penguatan sistem antikorupsi, pengawasan, dan pengendalian telah dilaksanakan dengan penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas serta inovasi pencegahan korupsi	Melanjutkan penguatan pengendalian internal dan pengawasan serta mengembangkan inovasi berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Mengelola Arsip Dinamis (Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan)	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan telah dilaksanakan sesuai ketentuan kearsipan	Melakukan pemeliharaan dan penataan arsip dinamis secara berkelanjutan untuk meningkatkan tertib arsip dan kemudahan akses dokumen	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan	Melakukan penataan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara berkala untuk mendukung tertib arsip dan akuntabilitas organisasi	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Penunjukan pegawai sebagai pengelola arsip	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Penunjukan pegawai sebagai pengelola arsip telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk mendukung tertib administrasi kearsipan	Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola arsip serta memastikan pelaksanaan tugas kearsipan berjalan optimal	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melengkapi sarana dan prasarana di record center	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Pemenuhan dan pelengkapan sarana dan prasarana di record center telah dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan arsip yang tertib dan aman	Melakukan pemeliharaan serta penambahan sarana prasarana record center sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Menyusun laporan pengelolaan arsip	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Penyusunan laporan pengelolaan arsip telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kearsipan	Mengarsipkan laporan pengelolaan arsip serta memanfaatkan hasil laporan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan arsip selanjutnya	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatkan pengelolaan aset dengan ketepatan perencanaan dan realisasi antara (RKBMD dan RKA), ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan BMD, dan capaian entry data Pengadaan BMD dalam Sistem Informasi BMD	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Peningkatan pengelolaan aset telah dilaksanakan melalui kesesuaian perencanaan dan realisasi antara RKBMD dan RKA, ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan BMD, serta capaian entri data pengadaan BMD pada Sistem Informasi BMD	Melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap perencanaan, pelaporan, dan penginputan data BMD untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan aset	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatkan capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai untuk menunjang peningkatan nilai IP ASN pada dimensi kinerja, serta Meningkatkan kompetensi pegawai untuk menunjang peningkatan nilai IP ASN pada dimensi kompetensi	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Upaya peningkatan capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta peningkatan kompetensi pegawai telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan nilai IP ASN pada dimensi kinerja dan kompetensi	Melakukan penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai IP ASN	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas	Melanjutkan sosialisasi dan penguatan implementasi Core Values dan Employer Branding ASN secara konsisten di lingkungan kerja	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Sosialisasi dan penyampaian informasi hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada masyarakat telah dilaksanakan sebagai bentuk transparansi pelayanan publik	Memfaatkan hasil penilaian IKM sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan serta melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengevaluasi dan memonitoring hasil IKM	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi dan monitoring hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil evaluasi IKM dengan penyusunan rekomendasi perbaikan dan pemantauan peningkatan kualitas pelayanan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi IPP sesuai dengan aspek penilaian	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi IPP telah dilaksanakan sesuai dengan aspek penilaian yang ditetapkan	Memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi IPP serta melakukan koordinasi lanjutan untuk peningkatan kinerja pada aspek penilaian terkait	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana penunjang IKPP	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi perbaikan sarana dan prasarana penunjang IKPP telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan	Memantau pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan standar pelayanan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan PATEN n-1	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi penyelenggaraan PATEN Tahun n-1 telah dilaksanakan untuk menilai capaian pelaksanaan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan	Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan PATEN dengan perbaikan pelaksanaan layanan pada periode berikutnya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Sosialisasi dan penyampaian informasi hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada masyarakat telah dilaksanakan sebagai wujud transparansi pelayanan publik	Melanjutkan sosialisasi hasil penilaian IKM serta memanfaatkan hasilnya sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengevaluasi dan memonitoring hasil IKM tribulan 4	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi dan monitoring hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan IV telah dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil evaluasi IKM Triwulan IV dengan penyusunan rekomendasi perbaikan dan pemantauan peningkatan kualitas pelayanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi IPP sesuai dengan aspek penilaian	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi IPP telah dilaksanakan sesuai dengan aspek penilaian yang ditetapkan	Memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi IPP serta melakukan koordinasi lanjutan untuk peningkatan kinerja pada aspek penilaian terkait	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana penunjang IKPP	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi perbaikan sarana dan prasarana penunjang IKPP telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan	Memantau dan memastikan perbaikan sarana dan prasarana penunjang IKPP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengevaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan untuk menilai ketepatan respon, penyelesaian aduan, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan pengaduan	Melakukan perbaikan mekanisme penanganan pengaduan serta pemantauan lanjutan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan kepatuhan pelaporan delegasi kewenangan Bupati kepada Camat sesuai dengan Perbup No. 2 Tahun 2014	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi kepatuhan pelaporan delegasi kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2014 telah dilaksanakan untuk memastikan ketertiban dan kesesuaian pelaporan	Melakukan verifikasi kelengkapan dan ketepatan laporan serta pemantauan berkelanjutan agar pelaporan delegasi kewenangan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan pemenuhan laporan hasil pelaksanaan posyandu kepada Bupati	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pemenuhan laporan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati telah dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian pelaporan	Melakukan verifikasi dan penyempurnaan laporan serta pemantauan berkelanjutan guna memastikan pelaporan Posyandu dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/ pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dilaksanakan untuk mendukung keterlaksanaan kebijakan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku	Melakukan koordinasi lanjutan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan guna memastikan kesesuaian implementasi di tingkat kecamatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Memfasilitasi penyelenggaraan rumah bersama kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Bersama Kecamatan telah dilaksanakan untuk mendukung sinergi pelayanan dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan	Melakukan pemantauan pelaksanaan dan penguatan koordinasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Rumah Bersama Kecamatan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasana penunjang pelayanan di Kecamatan Perak	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Kecamatan Perak telah dilaksanakan untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kelancaran pelayanan	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan pelaksanaan pemeliharaan secara berkala serta pemantauan kondisi sarana dan prasarana guna menjaga kualitas pelayanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan inovasi dan kreativitas pelayanan publik di tingkat kecamatan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, penggalan ide dari pegawai dan masyarakat, serta penerapan solusi inovatif yang meningkatkan akses, kecepatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Pendorongan dan fasilitasi pengembangan inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan telah dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, penggalan ide dari pegawai dan masyarakat, serta penerapan solusi inovatif untuk meningkatkan akses dan kecepatan layanan	Menindaklanjuti inovasi yang telah diidentifikasi dengan penguatan implementasi, evaluasi dampak layanan, dan replikasi praktik baik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Memfasilitasi penyaluran program kerja PD Kab/Kota dengan program kerja kecamatan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah/swasta di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Fasilitasi penyaluran program kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan program kerja kecamatan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan untuk memastikan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program di wilayah kecamatan	Melakukan koordinasi lanjutan dan pemantauan implementasi program guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dan optimalisasi dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK ataupun BUMDes)	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK dan/atau BUMDes) telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan penguatan sinergi program, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi capaian pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan UU maupun perda/perkada	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi penerapan dan penegakan Undang-Undang serta Perda/Perkada telah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Melakukan pemantauan dan penguatan koordinasi dengan perangkat terkait guna meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan peraturan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan penanganan bencana di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi penanganan bencana di Kecamatan telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan, respons cepat, dan sinergi antar pihak terkait	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan penguatan mekanisme penanganan bencana serta pemantauan kesiapsiagaan dan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana)	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas desa dalam penanggulangan bencana	Menindaklanjuti pembentukan Destana dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pemantauan implementasi program kesiapsiagaan bencana di tingkat desa	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Menindaklanjuti kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan dan penguatan materi pembinaan guna meningkatkan efektivitas penanaman nilai kebangsaan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan pelaksanaan secara rutin Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forpimcam	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) secara rutin telah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas, kerukunan, dan sinergi lintas sektor	Menindaklanjuti hasil forum dengan pemantauan dan koordinasi lanjutan guna memastikan rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoordinasikan fasilitasi pertemuan rutin forkopimcam yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan umum	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam yang dilaksanakan oleh kecamatan telah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan sinergi lintas sektor	Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pemantauan pelaksanaan kesepakatan serta penguatan koordinasi antar unsur Forkopimcam	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoodinakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (administrasi umum, administasi produk hukum desa, administarsi pembangunan, administrasi kependudukan)	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan meliputi administrasi umum, administrasi produk hukum desa, administrasi pembangunan, dan administrasi kependudukan	Menindaklanjuti hasil pembinaan dan evaluasi dengan pemberian rekomendasi perbaikan serta pemantauan berkelanjutan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) - Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) - Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) - Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Mengkoodinakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa oleh Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa oleh kecamatan telah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan tertib administrasi	Menindaklanjuti hasil pembinaan dan evaluasi dengan pemberian rekomendasi perbaikan serta pemantauan lanjutan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Memperbaiki aspek yang kurang pada penilaian IPP sesuai dengan sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Perbaikan terhadap aspek yang masih kurang pada penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) telah dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	Melakukan pemantauan dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan publik guna meningkatkan nilai IPP pada periode penilaian berikutnya	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatkan jumlah responden survey IKM, serta Melakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah (waktu, sikap petugas, dan produk layanan)	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Upaya peningkatan jumlah responden survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta perbaikan pada tiga unsur terendah, yaitu waktu pelayanan, sikap petugas, dan produk layanan, telah dilaksanakan	Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei dan konsistensi perbaikan layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai IKM pada periode berikutnya	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan tindak lanjut atas evaluasi AKIP tribulan 4 sesuai rencana tindak lanjut evaluasi AKIP	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Tribulan IV telah dilaksanakan sesuai rencana tindak lanjut evaluasi AKIP untuk memperbaiki aspek kinerja yang belum optimal	Melakukan pemantauan dan penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut guna memastikan rekomendasi evaluasi AKIP diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan evaluasi atas Predikat Kinerja Organisasi TW 4	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi atas Predikat Kinerja Organisasi Triwulan IV telah dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan penyusunan rekomendasi perbaikan dan langkah penguatan kinerja pada periode berikutnya	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan evaluasi atas capaian monev renaksi dan pengukuran kinerja tw 4	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Evaluasi atas capaian monitoring dan evaluasi rencana aksi serta pengukuran kinerja Triwulan IV telah dilaksanakan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja	Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah tindak lanjut guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pada periode berikutnya	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah yang tepat sesuai dengan isu strategis yang dihadapi/tugas fungsi organisasi Perangkat Daerah bersangkutan dan mampu menjawab permasalahan utama Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Pengkajian kembali tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian dengan isu strategis, tugas dan fungsi organisasi, serta permasalahan utama yang dihadapi	Menindaklanjuti hasil kajian dengan penyesuaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah agar lebih fokus, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan organisasi	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja pada level program agar lebih relevan dan memiliki hubungan sebab-akibat yang logis dengan indikator sasaran di tingkat atasnya,	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Penyesuaian indikator kinerja pada level program telah dilakukan untuk meningkatkan relevansi serta memastikan hubungan sebab-akibat yang logis dengan indikator sasaran pada level yang lebih tinggi	Melakukan reviu lanjutan dan penetapan indikator kinerja yang telah disesuaikan agar selaras dengan tujuan strategis dan dapat diukur secara akurat	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Memastikan kembali bahwa crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu stra	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Penegasan kembali crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah telah dilakukan untuk memastikan identifikasi peran dan keterlibatan masing-masing Perangkat Daerah dalam mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun isu strategis	Menindaklanjuti hasil penegasan dengan penguatan koordinasi dan penyelarasan peran lintas Perangkat Daerah guna meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja lintas sektoral	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	secara aktif memimpin seluruh proses perencanaan mulai dari melakukan analisis atas evaluasi capaian, menyusun strategi perbaikan hingga menetapkan perencanaan kinerja pada setiap periodenya (tahunan/tribulan);	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Kepemimpinan aktif dalam seluruh proses perencanaan kinerja telah dilaksanakan mulai dari analisis capaian, perumusan strategi perbaikan, hingga penetapan perencanaan kinerja tahunan dan tribulan	Memperkuat konsistensi penerapan siklus perencanaan berbasis kinerja serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan perbaikan kinerja	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatkan kualitas dialog kinerja dengan melakukan internalisasi komitmen serta menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan Perangkat Daerah melalui evaluasi kinerja secara sungguh-sungguh kepada seluruh pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Peningkatan kualitas dialog kinerja telah dilaksanakan melalui internalisasi komitmen dan evaluasi kinerja yang komprehensif kepada seluruh pegawai sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan Perangkat Daerah	Menindaklanjuti dialog kinerja dengan penetapan rencana aksi perbaikan serta pemantauan implementasinya secara berkala untuk memastikan percepatan pencapaian kinerja	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Melakukan analisa atas permasalahan dan tindak lanjut atas target rencana aksi yang tidak tercapai pada evaluasi rencana aksi serta melakukan perubahan rencana aksi pada tribulan berikutnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Analisis atas permasalahan dan tindak lanjut terhadap target rencana aksi yang tidak tercapai telah dilaksanakan melalui evaluasi rencana aksi	Melakukan penyesuaian dan perubahan rencana aksi pada tribulan berikutnya berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan ketercapaian target kinerja	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Menyusun langkah-langkah inovatif untuk dapat memicu minat seluruh pegawai untuk peduli dan secara aktif memberikan masukan yang baik dan konkret dalam meningkatkan kualitas LKJIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Penyusunan langkah-langkah inovatif telah dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas LKJIP	Menindaklanjuti langkah inovatif tersebut dengan implementasi dan evaluasi partisipasi pegawai secara berkala guna memastikan peningkatan kualitas LKJIP yang berkelanjutan	
5	Tertindakannya pengelolaan anggaran Kecamatan Perak	- Persentase serapan anggaran	Melakukan supervisi terhadap pengelolaan dan realisasi anggaran kecamatan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran kas untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Supervisi pengelolaan dan realisasi anggaran kecamatan telah dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan, ketersediaan kas, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	Menindaklanjuti hasil supervisi dengan penguatan pengendalian anggaran dan penyesuaian pelaksanaan guna menjaga efektivitas dan kelancaran realisasi anggaran.	
6	Tertindakannya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	- Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	Optimalisasi pengawasan pelunasan pajak bumi dan bangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Optimalisasi pengawasan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan	Menindaklanjuti pengawasan dengan penguatan koordinasi, pemantauan berkala, dan langkah percepatan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo.	
	Tertindakannya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	- Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelunasan PBB sebelum jatuh tempo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Evaluasi berkala terhadap pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo telah dilaksanakan untuk memantau tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan penguatan koordinasi dan upaya percepatan pelunasan PBB guna meningkatkan realisasi sebelum batas waktu yang ditetapkan	
Rata-rata capaian					100.00%				

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 1

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	74.80 Nilai	Nilai	Belum Isi Realisasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Rp 0,00	Rp 0,00		Belum ada Hasil Penilaian Evaluasi AKIP	Proses Pemenuhan dokumen kelengkapan AKIP telah dilakukan
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	25 %	25.00%	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.986.260.104,00	Rp 663.080.481,00	22.20%	Pada Triwulan 1 Tahun 2025, Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur di Kecamatan Perak menunjukkan tingkat pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja pegawai berdasarkan perencanaan kerja individu (SKP), pelaksanaan tugas jabatan, dan kontribusi terhadap program/kegiatan unit kerja.	Penyusunan SKP Tepat Waktu, Monitoring dan Evaluasi Rutin, Peningkatan Disiplin dan Kehadiran, Peningkatan Koordinasi Antar seksi, dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan Secara Kolektif
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8.18 Indeks	Indeks	Belum Isi Realisasi	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Rp 0,00	Rp 0,00		Belum dilaksanakan penilaian PEKPP	Standarisasi Prosedur Layanan, Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berkala
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Perak	85.3 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 2.013.750,00	Rp 0,00		Belum dilakukan Penilaian PATEN	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu, Peningkatan Kompetensi Aparatur Layanan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	25 %	25.00%	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 147.768.600,00	Rp 12.732.500,00	8.62%	Pada Triwulan 1, Kecamatan Perak telah melaksanakan sebagian kegiatan sosial budaya yang dijadwalkan, seperti peringatan Isra Mi'raj dan kegiatan sosial Ramadhan, serta telah melakukan monev pada kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis RT/RW. Capaian ini menunjukkan komitmen kecamatan dalam menjaga kohesi sosial dan nilai-nilai budaya lokal.	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lembaga Sosial, Penyediaan Dukungan Anggaran dan Logistik, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Secara Berkala, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	%	Belum Isi Realisasi	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 147.768.600,00	Rp 12.732.500,00	8.62%	Telah dilaksanakan koordinasi Lintas Sektor Forkopimcam	melakukan rapat koordinasi lintas Sektor

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	25 %	25.00%	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.125.000,00	Rp 1.425.000,00	20.00%	Pada Triwulan 1, Kecamatan Perak menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda tentang kebersihan lingkungan dan pelanggaran izin usaha kecil. Dari total laporan yang masuk, sebagian besar telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota dan OPD teknis dengan tindakan seperti peneguran langsung, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor.	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan, Pemanfaatan Media Pelaporan yang Mudah Diakses
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	25 %	25.00%	8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.787.500,00	Rp 0,00		Persentase ini mengukur sejauh mana desa-desa di wilayah kecamatan menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau arahan pemerintah daerah	Pendampingan dan Pembinaan kepada Pemerintah Desa, Monitoring Progres Pelaporan Secara Berkala, Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Desa
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	100 %	25 %	25.00%	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 140.028.250,00	Rp 14.790.250,00	10.56%	telah melaksanakan Musrenbangdes dengan partisipasi LPM, dan LPM-nya aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Maka, persentase capaian mencapai 80%, menunjukkan tingkat partisipasi pembangunan desa yang cukup baik namun masih memerlukan penguatan kelembagaan di sebagian desa.	Fasilitasi Musyawarah Desa Secara Terjadwal, Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa, Kolaborasi dengan Pendamping Desa dan OPD Terkait
10	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	100 %	30 %	30.00%	10					Angka 30% pada triwulan pertama masih tergolong cukup baik, mengingat pelunasan PBB biasanya meningkat pada triwulan kedua dan ketiga, menjelang batas jatuh tempo.	Penyampaian SPPT Secara Tepat Waktu, Sosialisasi dan Edukasi Pajak kepada Masyarakat, Penginputan Data dan Pelaporan Secara Berkala ke UPT
11	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	100 %	22 %	22.00%	11					Capaian Persentase Serapan Anggaran Kecamatan Perak pada triwulan I tahun 2025 merupakan indikator awal yang cukup baik, menunjukkan kelancaran pelaksanaan program dan kesiapan administrasi keuangan. Pemantauan secara berkala tetap diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi hingga akhir tahun.	Percepatan Proses Administratif DPA dan Penatausahaan Keuangan, Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang Realistis dan Terstruktur, Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Rata-rata capaian					25.29%							

Atasan Langsung

WARSUBI
NIP. -

Jombang, 31 Maret 2026
Camat Perak

SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 2

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	74.80 Nilai	0 Nilai	0.00%	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Rp 0,00	Rp 0,00		proses evaluasi AKIP dilakukan pada akhir TB II dan hasil penilaiannya disampaikan pada awal TB III	menindaklanjuti catatan hasil evaluasi AKIP
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya	100 %	50 %	50.00%	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.986.260.104,00	Rp 1.213.832.368,00	40.65%	Capaian 50% menunjukkan bahwa sebagian besar aparaturnya telah menjalankan tugasnya, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kecepatan penyelesaian pekerjaan.	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara individu untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki.
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8.18 Indeks	0 Indeks	0.00%	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Rp 0,00	Rp 0,00		Kecamatan Perak sedang dalam tahap pengumpulan data dan penilaian IKPP melalui monitoring dan survei kepuasan masyarakat serta penilaian kepatuhan standar pelayanan	Pelaksanaan survei masyarakat secara rutin dan menganalisis hasilnya untuk perbaikan layanan.
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Perak	85.3 Nilai	0 Nilai	0.00%	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 2.013.750,00	Rp 1.425.000,00	70.76%	Meskipun terdapat pelayanan harian yang berjalan, kegiatan penilaian dan monitoring PATEN sebagai dasar perhitungan nilai PATEN belum dilaksanakan pada Tribunal II	Mengoptimalkan pelayanan PATEN harian dengan tetap berpedoman pada SOP dan ketentuan pelayanan publik.
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	50 %	50.00%	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 147.768.600,00	Rp 25.120.000,00	17.00%	Capaian 50% menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah berjalan sesuai rencana, sementara kegiatan PHBN/PHBA lainnya akan dilaksanakan pada Tribunal III dan IV, sesuai kalender nasional dan kalender keagamaan.	Melanjutkan pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai jadwal pada Tribunal III dan IV.
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	50 %	50.00%	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 147.768.600,00	Rp 25.120.000,00	17.00%	Dari seluruh rekomendasi tersebut, 50% telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan dan pihak terkait dengan langkah konkret	Melaksanakan monitoring secara berkala atas rekomendasi Forkopimcam yang telah ditindaklanjuti.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	50 %	50.00%	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.125.000,00	Rp 3.800.000,00	53.33%	persentase laporan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Trantibum) yang telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait mencapai 50% dari total laporan yang masuk.	Mengoptimalkan koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, dan perangkat desa dalam penyelesaian kasus.
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	100 %	100.00%	8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.787.500,00	Rp 950.000,00	25.08%	Tribulan II Tahun 2025, persentase laporan realisasi APB Desa yang disampaikan tepat waktu oleh seluruh desa di Kecamatan Perak tercapai 100% (13 Desa)	elanjutkan pendampingan dan pengawasan secara berkala terhadap penyusunan laporan realisasi APB Desa pada Tribulan III dan IV.
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	100 %	50 %	50.00%	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 140.028.250,00	Rp 22.477.750,00	16.05%	Terbatasnya kapasitas SDM desa dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pemberdayaan lembaga.	Mengkoordinasikan jadwal kegiatan desa dengan agenda monitoring Kecamatan agar kegiatan berjalan lancar.
10	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	100 %	50 %	50.00%	10		Rp 0,00	Rp 0,00		Sebagian besar desa telah aktif melakukan penagihan kepada wajib pajak melalui kolektor desa.	Melaksanakan monitoring capaian PBB per desa secara berkala hingga jatuh tempo.
11	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	100 %	45.07 %	45.07%	11		Rp 0,00	Rp 0,00		Beberapa kegiatan fisik dan kegiatan tertentu baru dijadwalkan pada Tribulan III dan IV, sehingga belum terealisasi pada Tribulan II.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dan belanja operasional pada Tribulan III dan IV.
Rata-rata capaian					40.46%							

Atasan Langsung

WARSUBI
NIP. -

Jombang, 31 Maret 2026
Camat Perak

SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 3

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak	74.80 Nilai	73.55 Nilai	98.33%	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Rp 3.061.016.542,02	Rp 1.494.003.115,00	48.81%	Realisasi capaian nilai AKIP tahun 2025 sebesar 73,55 atau sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 74,80	menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	75 %	75.00%	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.061.016.542,02	Rp 1.494.003.115,00	48.81%	Capaian 75% menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah menjalankan tugasnya, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kecepatan penyelesaian pekerjaan.	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara individu untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki.
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8.18 Indeks	N/A Indeks	Belum Rilis	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Rp 3.438.750,00	Rp 1.425.000,00	41.44%	proses entry PEKPP telah dilakukan akan tetapi penilaian IKPP masih dalam proses sehingga nilai IKPP 2025 masih belum bisa diketahui	melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Perak	85.3 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.438.750,00	Rp 1.425.000,00	41.44%	Meskipun terdapat pelayanan harian yang berjalan, kegiatan penilaian dan monitoring PATEN sebagai dasar perhitungan nilai PATEN belum dilaksanakan pada Tribulan 3	Mengoptimalkan pelayanan PATEN harian dengan tetap berpedoman pada SOP dan ketentuan pelayanan publik.
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	75 %	75.00%	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 86.388.200,00	Rp 25.120.000,00	29.08%	Capaian 75% menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah berjalan sesuai rencana, sementara kegiatan PHBN/PHBA lainnya akan dilaksanakan pada Tribulan IV, sesuai kalender nasional dan kalender keagamaan.	Melanjutkan pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai jadwal pada Tribulan IV
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	75 %	75.00%	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 86.388.200,00	Rp 25.120.000,00	29.08%	Dari seluruh rekomendasi tersebut, 75% telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan dan pihak terkait dengan langkah konkret	Melaksanakan monitoring secara berkala atas rekomendasi Forkopimcam yang telah ditindaklanjuti.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	75 %	75.00%	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 9.500.000,00	Rp 3.800.000,00	40.00%	laporan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Trantibum) yang telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait mencapai 75% dari total laporan yang masuk.	Mengoptimalkan koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, dan perangkat desa dalam penyelesaian kasus.
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	100 %	100.00%	8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 4.037.500,00	Rp 950.000,00	23.53%	Tribulan II Tahun 2025, persentase laporan realisasi APB Desa yang disampaikan tepat waktu oleh seluruh desa di Kecamatan Perak tercapai 100% (13 Desa)	melanjutkan pendampingan dan pengawasan secara berkala terhadap penyusunan laporan realisasi APB Desa pada Tribulan IV
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	100 %	100 %	100.00%	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 90.353.250,00	Rp 22.477.750,00	24.88%	Terbatasnya kapasitas SDM desa dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pemberdayaan lembaga.	Mengkoordinasikan jadwal kegiatan desa dengan agenda monitoring Kecamatan agar kegiatan berjalan lancar.
10	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	100 %	100 %	100.00%	10		Rp 0,00	Rp 0,00		Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak sudah terealisasi sesuai target 100%	melakukan evaluasi atas capaian pelunasan pajak untuk menjadi pedoman di tahun berikutnya
11	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	100 %	59.89 %	59.89%	11		Rp 0,00	Rp 0,00		prosentase penyerapan sampai dengan TB III masih 59,89%.	Menetapkan strategi percepatan penyerapan anggaran akhir tahun untuk menghindari sisa lebih anggaran (SILPA) yang tinggi.
Rata-rata capaian					84.25%							

Atasan Langsung

WARSUBI
NIP. -

Jombang, 31 Maret 2026
Camat Perak

SUPRIYONO
NIP. 197010131992011001

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : Drs. SUPRIYONO

NIP : 197010131992011011

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75 Indeks	68.84 Indeks	91,79%	1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp 2.967.351.899,00	Rp 2.507.261.168,00	84.49%	Capaian kinerja yang terealisasi mencapai 87,07 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat kinerja belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang direncanakan	Pelaksanaan kinerja kecamatan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna mendeteksi potensi permasalahan sejak tahap awal, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran dan responsif
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75 Indeks	77.04 Indeks	102,72%	2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Rp 2.696.587.030,00	Rp 2.239.397.218,00	83.05%	Realisasi kinerja tercatat sebesar 104,09 persen dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Perak telah berlangsung secara efektif dan mampu melampaui sasaran yang direncanakan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan guna memastikan ketercapaian setiap indikator kinerja serta menjamin tersusunnya tindak lanjut yang sistematis berdasarkan hasil evaluasi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.18 Indeks	8.62 Indeks	105,38%	3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rp 270.764.869,00	Rp 267.863.950,00	98.93%	Realisasi kinerja tercapai 100 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Perak telah mencapai sasaran sebagaimana direncanakan	Konsistensi penerapan standar pelayanan dipertahankan disertai dengan upaya penyempurnaan prosedur layanan secara berkelanjutan, yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja serta masukan dari masyarakat.
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74.80 Nilai	73.55 Nilai	98,32%	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.696.587.030,00	Rp 2.242.970.318,00	83.18%	Tingkat realisasi kinerja tercatat sekitar 100,61 persen dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sasaran kinerja telah terpenuhi. Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen penilaian AKIP yang memerlukan penguatan, khususnya keterkaitan antara perencanaan dan pengukuran kinerja, kualitas indikator kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan sebagai landasan dalam memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76 Persen	79,11 Persen	104.09%	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.835.000,00	Rp 3.806.450,00	99.26%	Realisasi kinerja tercatat sebesar 104,09 persen dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Perak pada Tahun 2025 telah berlangsung secara efektif serta mampu melampaui sasaran yang direncanakan	Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik dipantau serta dievaluasi secara berkala guna menjamin keberlanjutan capaian kinerja yang telah dicapai
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75 Persen	68.75 Persen	91.67%	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 121.422.000,00	Rp 118.720.300,00	97.77%	Realisasi kinerja mencapai 91,67 persen dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan, desa, dan kelurahan serta pihak terkait dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	49 Persen	23.42 Persen	47.80%	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 14.585.000,00	Rp 14.560.300,00	99.83%	Capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2025 baru mencapai sekitar 47,80% dari target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan trantibum belum berjalan secara terencana dan preventif serta belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai output kinerja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi aspek trantibum terhadap nilai IKKK Kecamatan Perak	Melakukan penyusunan rencana kerja trantibum berbasis potensi gangguan ketertiban wilayah serta melakukan penguatan pendekatan preventif dan deteksi dini bersama Polsek, Koramil dan Aparatur Desa
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75 Persen	41.67 Persen	55.56%	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 119.327.869,00	Rp 119.214.500,00	99.90%	Realisasi kinerja tercatat sebesar 55,56 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada jauh di bawah sasaran yang direncanakan. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, keterbatasan dukungan sumber daya, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Meningkatkan ketertiban administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pemerintahan umum agar seluruh pelaksanaan tugas dapat terukur dan dinilai secara optimal

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75 Persen	25 Persen	33.33%	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 11.595.000,00	Rp 11.562.400,00	99.72%	Realisasi kinerja tercatat sebesar 33,33 persen dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja masih sangat jauh dari sasaran yang direncanakan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, keterbatasan sumber daya aparatur pembina, serta belum meratanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat desa	Meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan.
10	Terlaksananya pengelolaan anggaran Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran	90 Persen	84,49 Persen	93.88%	10		Rp 0,00	Rp 0,00		Pelaksanaan anggaran pada umumnya telah berjalan, namun belum optimal.Masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar, khususnya pada belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 446.108.908, hal ini disebabkan karena belum terisinya jabatan struktural sejumlah 3 jabatan yaitu kasi sosbud, kasi trantib dan kasubag umum dan kepegawaian	Koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan pengelolaan keuangan diperkuat guna memastikan ketersediaan data pegawai yang lebih akurat dan mutakhir
11	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	100 Persen	100 Persen	100.00%	11		Rp 0,00	Rp 0,00		Realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2025 mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa seluruh kewajiban PBB di wilayah Kecamatan Perak telah dibayar secara penuh	Mempertahankan koordinasi yang efektif dengan perangkat desa dan kelurahan dalam pendataan,penagihan, dan pelaporan PBB.
Rata-rata capaian					89,97%							

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : SUPRIYONO

NIP : 197010131992011001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Camat Perak

Unit Kerja : Kecamatan Perak

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75 Indeks	68.84 Indeks	91.79%	1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan Perak	Rp 3.254.734.242,02	Rp 2.648.728.737,07	81.38%	tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 91,79% dari target yang telah ditetapkan dan belum sepenuhnya memenuhi target kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kinerja kecamatan untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat.
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8.18 Indeks	8.62 Indeks	105.38%	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Rp 3.438.750,00	Rp 3.438.750,00	100.00%	capaian kinerja mencapai sekitar 105,38% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Perak telah melampaui target yang direncanakan	Menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap prosedur layanan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan masyarakat
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75 Indeks	77.04 Indeks	102.72%	3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Rp 3.061.016.542,02	Rp 2.455.541.637,07	80.22%	capaian kinerja mencapai sekitar 102,72% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Perak telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memastikan ketercapaian indikator dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74.80 Nilai	73.55 Nilai	98.33%	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.061.016.542,02	Rp 2.438.523.913,07	79.66%	tingkat capaian kinerja sebesar sekitar 98,33% dari target yang telah ditetapkan dan belum sepenuhnya memenuhi target. Belum tercapainya target nilai Evaluasi AKIP tersebut antara lain disebabkan oleh masih adanya beberapa komponen penilaian AKIP yang perlu ditingkatkan, seperti keterkaitan antara perencanaan dan pengukuran kinerja, kualitas indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76 %	81 %	106.58%	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.438.750,00	Rp 3.325.000,00	96.69%	capaian kinerja mencapai 106,58% dari target yang telah ditetapkan. apaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Perak pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik untuk memastikan keberlanjutan capaian kinerja.
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75 %	63 %	84.00%	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 90.353.250,00	Rp 89.830.250,00	99.42%	tingkat capaian kinerja sebesar 84% dari target yang telah ditetapkan dan belum memenuhi target kinerja. Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa	Memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan kelurahan serta pihak terkait dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49 %	49.3 %	100.61%	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 9.500.000,00	Rp 9.487.500,00	99.87%	capaian kinerja mencapai sekitar 100,61% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Perak pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai rencana dan sedikit melampaui target	Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri serta perangkat terkait dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75 %	33 %	44.00%	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 86.388.200,00	Rp 85.814.400,00	99.34%	tingkat capaian kinerja sebesar 44% dari target yang telah ditetapkan dan jauh di bawah target kinerja. Rendahnya capaian tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, keterbatasan dukungan sumber daya, serta masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Meningkatkan ketertiban administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pemerintahan umum agar seluruh pelaksanaan tugas dapat terukur dan dinilai secara optimal.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	25 %	33.33%	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 4.037.500,00	Rp 4.037.500,00	100.00%	ingkat capaian kinerja sebesar 33,33% dari target yang telah ditetapkan dan sangat belum memenuhi target kinerja. Rendahnya capaian tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, keterbatasan sumber daya aparatur yang melakukan pembinaan, serta belum meratanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi desa.	Meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan.
10	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Perak	100 %	100 %	100.00%	10		Rp 0,00	Rp 0,00		Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Perak Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Perak pada Tahun 2025 telah dilunasi sepenuhnya	Mempertahankan koordinasi yang efektif dengan perangkat desa dan kelurahan dalam pendataan, penagihan, dan pelaporan PBB.
11	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Kecamatan Perak	Persentase serapan anggaran Kecamatan Perak Tahun 2025	100 %	81.38 %	81.38%	11		Rp 0,00	Rp 0,00		Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada umumnya telah berjalan, namun belum optimal. Masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar, khususnya pada belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 575.531.991. Sisa anggaran tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan antara perencanaan kebutuhan belanja pegawai dengan realisasi jumlah pegawai yang ada, seperti belum terisinya formasi jabatan, mutasi pegawai, atau perubahan status kepegawaian selama tahun anggaran berjalan. Kondisi ini berdampak pada tidak terserapnya sebagian alokasi anggaran gaji dan tunjangan yang telah direncanakan	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani kepegawaian dan pengelolaan keuangan untuk memperoleh data pegawai yang lebih akurat dan mutakhir.
Rata-rata capaian					86.19%							

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	ABDUL WAKHID	1	NAMA	SUPRIYONO
2	NIP	196812011994031006	2	NIP	197010131992011001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Sekretaris Kecamatan Perak	4	JABATAN	Camat Perak
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	kuantitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
			kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
			kuantitas	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang
			kuantitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	kuantitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
			kuantitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
			kuantitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
			kuantitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 paket
			kuantitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	kuantitas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit
5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan
6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	kuantitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
			kuantitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
			kuantitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	kuantitas	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	1 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
3	Kompeten	
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat menghargai setiap orang dalam berinteraksi
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: kompeten sesuai ekspektasi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu terbuka dalam bekerja sama

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : ABDUL WAKHID
NIP : 196812011994031006
Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Perak
Unit Kerja : Sekretariat

- Rencana Hasil Kerja :**
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Indikator :**
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
- Tribulan 1 :**
Renaksi
1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah
Target : 1 dokumen
2. Mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (laporan tribulan 1 dan LKjIP n-1)
Target : 2 laporan
- Tribulan 2 :**
Renaksi
1. Mengkoordinasikan penyusunan perubahan renja tahun n dan renja n+1
Target : 1 dokumen
2. Mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (laporan tribulan 2)
Target : 1 laporan
- Tribulan 3 :**
Renaksi
1. Mengkoordinasikan penyusunan perubahan renja tahun n dan renja n+1
Target : 1 dokumen
2. Mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (laporan tribulan 3)
Target : 1 laporan
- Tribulan 4 :**
Renaksi
1. Mengkoordinasikan penyusunan Pagu Indikatif Penggunaan Anggaran (PIPA) tahun n+2
Target : 1 dokumen
2. Mengkoordinasikan implementasi RB Tribulan 4
Target : 1 kegiatan
3. Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen RB sebagai bahan evaluasi
Target : 1 kegiatan
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (laporan tribulan 3)
Target : 1 laporan
5. Mengevaluasi dan monitoring kinerja aparatur (pengukuran kinerja tribulan 3)
Target : 1 laporan
6. Mengkoordinasikan hasil evaluasi SAKIP tahun n
Target : 1 kegiatan
7. Mengkoordinasikan langkah strategis perbaikan nilai SAKIP tahun n+1
Target : 1 kegiatan
8. Melaksanakan tindaklanjut LHE SAKIP tahun n
Target : 1 kegiatan
9. Mengkoordinasikan implementasi SAKIP Tribulan 4
Target : 1 kegiatan
10. Mengevaluasi dan monitoring pengumpulan data statistik sektoral daerah pada aplikasi sambang
Target : 1 kegiatan

-
- Rencana Hasil Kerja :**
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah
- Indikator :**
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Melakukan evaluasi dan supervisi pencairan gaji dan tunjangan ASN

Target : 3 kegiatan

2. Melakukan evaluasi dan supervisi laporan keuangan

Target : 1 kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pencairan gaji dan tunjangan tepat waktu

Target : 6 kegiatan

2. Supervisi realisasi keuangan tribulan 2

Target : 1 kegiatan

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pencairan gaji dan tunjangan tepat waktu

Target : 6 kegiatan

2. Supervisi realisasi keuangan tribulan 3

Target : 1 kegiatan

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Supervisi realisasi keuangan tribulan 4

Target : 1 kegiatan

2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja tribulan 4

Target : 1 kegiatan

3. Mengkoordinasikan pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu

Target : 7 kegiatan

4. Monitoring dan verifikasi pencairan gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan aturan yang berlaku

Target : 7 kegiatan

5. Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

Target : 3 kegiatan

Rencana Hasil Kerja :

Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator :

1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan persiapan pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang telah direncanakan dalam DPA OPD

Target : 1 kegiatan

2. "Melakukan survey dan pemilihan penyedia baik secara online (e-catalog) maupun belanja langsung"

Target : 1 kegiatan

3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kepada penyedia

Target : 1 kegiatan

4. Mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi sarana dan prasarana yang telah direalisasikan

Target : 1 kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

-

Rencana Hasil Kerja :

Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator :

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 3 kegiatan

2. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 3 kegiatan

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 3 kegiatan

2. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 3 bulan

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 3 kegiatan

2. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 3 bulan

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 3 kegiatan

2. Mengkoordinasikan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi kegiatan di Kecamatan

Target : 1 kegiatan

3. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 3 bulan

Rencana Hasil Kerja :

Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa

Indikator :

- 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- 2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- 3. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- 4. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- 6. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Target : 6 paket

2. Mengkoordinasikan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 35 paket

3. Mengkoordinasikan pemenuhan bahan logistik kantor

Target : 1 paket

4. Mengkoordinasikan pemenuhan barang cetak dan penggandaan

Target : 2 paket

5. Mengkoordinasikan pemenuhan Bahan Bacaan

Target : 1 dokumen

6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 laporan

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Target : 6 paket

2. Mengkoordinasikan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 1 kegiatan

3. Mengkoordinasikan pemenuhan bahan logistik kantor

Target : 1 paket

4. Mengkoordinasikan pemenuhan barang cetak dan penggandaan

Target : 2 paket

5. Mengkoordinasikan pemenuhan Bahan Bacaan

Target : 1 dokumen

6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 laporan

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Mengkoordinasikan pemenuhan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Target : 6 paket

2. Mengkoordinasikan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 1 kegiatan

3. Mengkoordinasikan pemenuhan bahan logistik kantor

Target : 1 paket

4. Mengkoordinasikan pemenuhan barang cetak dan penggandaan

Target : 2 paket

5. Mengkoordinasikan pemenuhan Bahan Bacaan

Target : 1 dokumen

6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 laporan

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Mengkoordinasikan pemenuhan barang cetak dan penggandaan
Target : 2 kegiatan
- 2. Mengkoordinasikan pemenuhan bahan logistik kantor
Target : 3 kegiatan
- 3. Mengkoordinasikan pemenuhan Bahan Bacaan
Target : 3 kegiatan
- 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target : 1 kegiatan
- 5. Mengkoordinasikan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Target : 2 kegiatan
- 6. Mengkoordinasikan pemenuhan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Target : 1 kegiatan

Rencana Hasil Kerja :

Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator :

- 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- 2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Mengkoordinasikan pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Target : 3 kegiatan
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target : 1 kegiatan
- 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
Target : 2 unit

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. "Mengkoordinasikan pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan "
Target : 1 unit
- 2. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Target : 1 kegiatan
- 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
Target : 1 gedung

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Mengkoordinasikan pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Target : 1 unit
- 2. Mengkoordinasikan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 kegiatan
- 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Target : 1 kegiatan

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Mengkoordinasikan pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Target : 1 unit
- 2. Mengkoordinasikan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 kegiatan
- 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Target : 1 kegiatan

Rencana Hasil Kerja :

Tersusunnya dokumen SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator :

- 1. Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

-

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: ABDUL WAKHID
NIP	: 196812011994031006
Jabatan	: Sekretaris Kecamatan Perak
Tugas pokok	: melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
Fungsi	: 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 4. Pengelolaan urusan rumah tangga; 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi; 7. Pengelolaan kearsipan; 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	laporan	1. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah • Target ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. 2. RKPd dan Renja Perangkat Daerah • Target tahunan disesuaikan dengan prioritas dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. 3. Dokumen Penganggaran (KUAPPAS dan APBD) • Target harus realistis dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 • Menjadi acuan dalam integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta dalam menetapkan indikator dan target kinerja yang terukur. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 • Digunakan sebagai pedoman penetapan indikator kinerja, penyusunan target, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. 6. Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya • Penetapan target mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya agar target bersifat progresif namun tetap realistis. 7. Kapasitas Sumber Daya Perangkat Daerah • Termasuk SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi yang tersedia dalam mendukung perencanaan dan pelaporan.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	14	orang	jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan pada perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
3	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	data	1. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah • Target ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. 2. RKPd dan Renja Perangkat Daerah • Target tahunan disesuaikan dengan prioritas dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. 3. Dokumen Penganggaran (KUAPPAS dan APBD) • Target harus realistis dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 • Menjadi acuan dalam integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta dalam menetapkan indikator dan target kinerja yang terukur. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 • Digunakan sebagai pedoman penetapan indikator kinerja, penyusunan target, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. 6. Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya • Penetapan target mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya agar target bersifat progresif namun tetap realistis. 7. Kapasitas Sumber Daya Perangkat Daerah • Termasuk SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi yang tersedia dalam mendukung perencanaan dan pelaporan.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	dokumen	• Pedoman Pemeriksaan dan Reviu dari Inspektorat Daerah / BPK • Laporan dianggap sesuai jika telah melalui reviu atau pemeriksaan dan tidak ditemukan penyimpangan material terhadap peraturan atau standar akuntansi. • Evaluasi dan Capaian Tahun Sebelumnya • Target ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi penyusunan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan capaian menuju 100%
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	dokumen	• Pedoman Pemeriksaan dan Reviu dari Inspektorat Daerah / BPK • Laporan dianggap sesuai jika telah melalui reviu atau pemeriksaan dan tidak ditemukan penyimpangan material terhadap peraturan atau standar akuntansi. • Evaluasi dan Capaian Tahun Sebelumnya • Target ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi penyusunan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya
6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	7	7	unit	• Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renja, DPA, dan RUP) • Target disusun berdasarkan daftar kebutuhan riil perangkat daerah yang tertuang dalam perencanaan tahunan dan dokumen anggaran. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Capaian dan kendala pengadaan tahun lalu digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target yang lebih realistis atau mempertahankan tingkat realisasi maksimal.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	25	laporan	• Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) • Target pemenuhan jasa penunjang didasarkan pada volume kebutuhan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen resmi perangkat daerah. • Evaluasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya • Capaian tahun sebelumnya dijadikan referensi untuk menetapkan target capaian tahun berjalan agar lebih realistis dan terukur.
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	24	laporan	• Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) • Target pemenuhan jasa penunjang didasarkan pada volume kebutuhan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen resmi perangkat daerah. • Evaluasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya • Capaian tahun sebelumnya dijadikan referensi untuk menetapkan target capaian tahun berjalan agar lebih realistis dan terukur.
9	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	2	paket	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
10	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	1	1	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.
11	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	1	dokumen	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	laporan	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	24	35	paket	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
14	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	8	6	paket	• Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan DPA Perangkat Daerah • Menjadi acuan dalam menetapkan volume kebutuhan administrasi perkantoran dan menjadi basis target capaian tahunan. • Standar Pelayanan Minimal Internal (SOP dan Standar Kebutuhan) • Target ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum administratif kantor, seperti kecukupan ATK, listrik, air, langganan internet, kebersihan, dan dokumentasi. • Evaluasi Tahun Sebelumnya • Target mempertimbangkan capaian dan hambatan yang terjadi pada periode sebelumnya guna menetapkan target yang realistis dan progresif.
15	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	15	10	unit	• Dokumen KIB (Kartu Inventaris Barang) dan Hasil Inventarisasi Tahunan • Target ditetapkan berdasarkan data real aktual jumlah aset dan hasil pemeriksaan kondisi barang yang dilakukan secara berkala. • Evaluasi Pengelolaan Aset Tahun Sebelumnya • Hasil audit internal maupun eksternal (seperti BPK atau Inspektorat) menjadi dasar dalam menetapkan target perbaikan dan pemeliharaan kondisi aset.
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	2	unit	• Dokumen KIB (Kartu Inventaris Barang) dan Hasil Inventarisasi Tahunan • Target ditetapkan berdasarkan data real aktual jumlah aset dan hasil pemeriksaan kondisi barang yang dilakukan secara berkala. • Evaluasi Pengelolaan Aset Tahun Sebelumnya • Hasil audit internal maupun eksternal (seperti BPK atau Inspektorat) menjadi dasar dalam menetapkan target perbaikan dan pemeliharaan kondisi aset.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
17	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	8	20	unit	• Dokumen KIB (Kartu Inventaris Barang) dan Hasil Inventarisasi Tahunan • Target ditetapkan berdasarkan data real aktual jumlah aset dan hasil pemeriksaan kondisi barang yang dilakukan secara berkala. • Evaluasi Pengelolaan Aset Tahun Sebelumnya • Hasil audit internal maupun eksternal (seperti BPK atau Inspektorat) menjadi dasar dalam menetapkan target perbaikan dan pemeliharaan kondisi aset.
18	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun		1	1	1	dokumen	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja instansi pemerintah. 2. PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penilaian implementasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menegaskan integrasi antara perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan dasar tersebut, indikator ini ditetapkan untuk memastikan tersusunnya dokumen SAKIP yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan prinsip performance-based budgeting guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : ABDUL WAKHID

NIP : 196812011994031006

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Perak

Tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi :
1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	mengukur jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang telah disusun oleh SKPD, serta laporan hasil koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan tersebut. Indikator ini mencerminkan tingkat pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi terhadap penyusunan laporan kinerja perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	umlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disusun dan dilaporkan + jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun n	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta laporan hasil koordinasi dari bagian terkait
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	mengukur jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi dokumen jangka menengah dan tahunan seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen lain yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dan disahkan pada tahun n	Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	kegiatan mengukur jumlah himpunan data statistik sektoral yang dikumpulkan dari perangkat daerah dan telah melalui proses pemeriksaan atau verifikasi sesuai dengan standar pengelolaan data statistik sektoral daerah. Pengumpulan dan pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan ketersediaan, keakuratan, konsistensi, dan validitas data yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.	umlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa pada tahun n	Dokumentasi hasil pengumpulan data statistik sektoral dari perangkat daerah, berita acara pemeriksaan/verifikasi data, dan laporan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral.
2	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kegiatan mengukur jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta laporan hasil koordinasi yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Indikator ini menunjukkan tingkat pelaksanaan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang telah disusun dan disampaikan + jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD pada tahun n	Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD, laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan, berita acara rapat koordinasi, serta dokumen pendukung lainnya dari bagian keuangan atau pengelolaan keuangan daerah.
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kegiatan mengukur jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menerima pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam periode pelaporan	Jumlah ASN yang telah menerima gaji dan tunjangan sesuai daftar gaji pada tahun n	Daftar gaji dan tunjangan ASN, daftar nominatif pembayaran, dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	mengukur jumlah dokumen keuangan yang telah dilakukan proses penatausahaan serta pengujian atau verifikasi oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penatausahaan dan verifikasi dimaksud meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen transaksi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah.	umlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang telah diverifikasi atau diuji kebenarannya pada tahun n	Dokumen penatausahaan keuangan SKPD, laporan hasil verifikasi/pengujian keuangan, bukti transaksi, serta arsip pemeriksaan administrasi keuangan dari pejabat penatausahaan keuangan
3	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kegiatan mengukur jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang telah tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah disediakan	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Berita Acara Serah Terima Barang Laporan Realisasi Anggaran Dokumen laporan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa
4	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kegiatan mengukur jumlah laporan yang disusun dan disampaikan terkait dengan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan sarana-prasarana, utilitas perkantoran, serta layanan pendukung operasional lainnya.	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang telah disusun dan disampaikan	Dokumen laporan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, bukti pelaksanaan kegiatan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	mengukur jumlah laporan yang disusun dan disampaikan terkait dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi (telepon, internet, dan jaringan informasi), serta penyediaan sumber daya air dan listrik yang digunakan untuk mendukung operasional perkantoran dan pelayanan pemerintahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang telah disusun dan disampaikan pada tahun n	Dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik; bukti pembayaran tagihan atau kontrak layanan; laporan realisasi kegiatan; dan dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait.
5	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kegiatan mengukur jumlah paket pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang cetakan dan kegiatan penggandaan dokumen yang telah disiapkan dan tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi dalam satu periode tertentu	umlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan yang telah disediakan dan siap digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada tahun n	Dokumen laporan realisasi pengadaan barang cetakan dan penggandaan, daftar penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan (BAST), dan dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kegiatan mengukur jumlah paket pengadaan bahan logistik kantor yang telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dalam satu periode tertentu.	Jumlah paket bahan logistik kantor yang telah disediakan dan siap digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional kantor pada tahun n	Dokumen laporan realisasi pengadaan bahan logistik kantor, berita acara serah terima barang (BAST), daftar penerimaan barang, dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan pengadaan logistik.
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	mengukur jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah disediakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas, peningkatan wawasan aparatur, serta penyediaan referensi hukum dan kebijakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah disediakan dan dapat diakses atau dimanfaatkan oleh pegawai atau unit kerja pada tahun n	Daftar inventaris bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan pengadaan dokumen, berita acara penerimaan dokumen, dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan pengadaan referensi/bahan bacaan.
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	mengukur jumlah laporan kegiatan yang disusun dan disampaikan terkait penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang telah disusun dan disampaikan pada tahun n	Dokumen laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi, notulen rapat, daftar hadir peserta, surat undangan, serta berita acara pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	mengukur jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan administrasi pemerintahan di lingkungan perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang telah disediakan dan diterima oleh unit kerja pada tahun n	Dokumen laporan realisasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, berita acara serah terima barang (BAST), daftar penerimaan barang, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	mengukur jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan yang disediakan untuk mendukung kelancaran operasional bangunan kantor pemerintah daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang telah disediakan atau direalisasikan pada tahun n	Laporan realisasi pengadaan dan pemasangan instalasi listrik/penerangan, berita acara serah terima pekerjaan (BAST), daftar inventaris barang, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan fisik atau operasional kantor.
6	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan milik pemerintah daerah yang telah dilakukan pemeliharaan rutin dan/atau perbaikan, serta telah dibayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi perizinan, dan kelengkapan dokumen kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang telah dilakukan pemeliharaan dan dibayarkan pajak serta perizinannya pada tahun n	Dokumen laporan pemeliharaan kendaraan dinas, bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor, bukti perpanjangan STNK, laporan inventarisasi aset kendaraan, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan.

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	mengukur jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah yang telah dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dalam periode pelaporan. Pemeliharaan/rehabilitasi meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, atau peningkatan kondisi fisik bangunan agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan layak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan pemerintahan.	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dipelihara atau direhabilitasi pada tahun n	Dokumen laporan realisasi kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi bangunan, berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan (BAST), laporan hasil pekerjaan teknis, dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan fisik.
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	mengukur jumlah unit sarana dan prasarana yang terdapat pada gedung kantor atau bangunan lainnya milik pemerintah daerah yang telah dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi pada tahun n	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi pada tahun n	Laporan realisasi kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana, berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan (BAST), dokumen pertanggungjawaban kegiatan fisik, serta daftar inventaris aset daerah
7	Tersusunnya dokumen SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	mengukur jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disusun oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang telah tersusun dan disahkan pada tahun n	Dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, RKT, LKjIP, dan dokumen pendukung lainnya), laporan penyusunan SAKIP perangkat daerah, berita acara verifikasi, serta dokumentasi hasil evaluasi internal. Frekuensi Pengukuran:

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	IDA AYU NURSANTI	1	NAMA	ABDUL WAKHID
2	NIP	198012042006042025	2	NIP	196812011994031006
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d
4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	JABATAN	Sekretaris Kecamatan Perak
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kuantitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 paket
2	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	kuantitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
3	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kuantitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 dokumen
4	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kuantitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
5	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kuantitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
6	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	kuantitas	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
7	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit
8	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
9	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1 0	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit
1 1	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
1 2	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kuantitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
1 3	Tersusunnya dokumen SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlaksananya pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja	kuantitas	persentase pelaksanaan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja	100%
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat menghargai setiap orang dalam berinteraksi		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: kompeten sesuai ekspektasi		
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu terbuka dalam bekerja sama

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : IDA AYU NURSANTI
NIP : 198012042006042025
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rencana Hasil Kerja :
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator :
1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Tribulan 1 :
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih
Target : 1 dokumen
2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih
Target : 1 dokumen
2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih
Target : 1 dokumen
2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :
Renaksi
1. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen
2. Melaksanakan pemenuhan belanja alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih
Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator :
1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Tribulan 1 :
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja Paket Barang Cetak dan Penggandaan
Target : 1 dokumen
2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname bahan cetak untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen
3. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku
Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja Paket Barang Cetak dan Penggandaan
Target : 1 dokumen
2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname bahan cetak untuk dilaporkan kepada atasan
Target : 1 dokumen
3. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Paket Barang Cetak dan Penggandaan

Target : 1 dokumen

- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname bahan cetak untuk dilaporkan kepada atasan

Target : 1 dokumen

- 3. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Paket Barang Cetak dan Penggandaan

Target : 1 dokumen

- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi data stock opname bahan cetak untuk dilaporkan kepada atasan

Target : 1 dokumen

- 3. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator :

- 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :

- 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator :

- 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Melaksanakan pemenuhan belanja penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

Target : 1 dokumen

- Tribulan 2 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Target : 1 dokumen
- Tribulan 3 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Target : 1 dokumen
- Tribulan 4 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Target : 1 dokumen
-

- Rencana Hasil Kerja :**
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
- Indikator :**
1. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
- Tribulan 1 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja kebutuhan bahan logistik kantor/ mamin harian pegawai melalui e-catalog rutin setiap bulan
Target : 3 dokumen
- Tribulan 2 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja kebutuhan bahan logistik kantor/ mamin harian pegawai melalui e-catalog rutin setiap bulan
Target : 2 dokumen
- Tribulan 3 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja kebutuhan bahan logistik kantor/ mamin harian pegawai melalui e-catalog rutin setiap bulan
Target : 3 dokumen
- Tribulan 4 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan belanja kebutuhan bahan logistik kantor/ mamin harian pegawai melalui e-catalog rutin setiap bulan
Target : 3 dokumen
-

- Rencana Hasil Kerja :**
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator :**
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
- Tribulan 1 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target : 1 dokumen
- Tribulan 2 :**
Renaksi
-
- Tribulan 3 :**
Renaksi
-
- Tribulan 4 :**
Renaksi
-
-

- Rencana Hasil Kerja :**
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Indikator :**
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Tribulan 1 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 3 dokumen
2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi kegiatan di Kecamatan
Target : 1 dokumen
3. "Melakukan kegiatan pemenuhan standar operasional prosedur sesuai dengan pedoman yang berlaku"
Target : 1 dokumen
- Tribulan 2 :**
Renaksi
1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 3 dokumen
2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi kegiatan di Kecamatan
Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Target : 3 dokumen

2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi kegiatan di Kecamatan

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Target : 3 dokumen

2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi kegiatan di Kecamatan

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator :

1. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya
Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator :

1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Tribulan 1 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 dokumen

Tribulan 2 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 dokumen

Tribulan 3 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 dokumen

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan pemenuhan belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja

Indikator :

1. persentase pelaksanaan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

-

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : IDA AYU NURSANTI

NIP : 198012042006042025

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok : 1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
4. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
6. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
7. Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
8. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
10. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi : Melaksanakan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	24	35	paket	adanya penngkatan kebutuhan
2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	2	2	paket	berdasarkan kebutuhan
3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	1	1	dokumen	berdasarkan kebutuhan
4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	4	laporan	berdasarkan kebutuhan
5	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	1	paket	berdasarkan kebutuhan
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	7	7	unit	berdasarkan kebutuhan
7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	25	laporan	berdasarkan kebutuhan
8	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	2	unit	berdasarkan kebutuhan
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	24	laporan	berdasarkan kebutuhan

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	8	20	unit	berdasarkan kebutuhan
11	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	15	10	unit	berdasarkan kebutuhan
12	persentase pelaksanaan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja		100	100	100	%	persentase capaian kinerja
13	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	8	6	paket	berdasarkan kebutuhan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : IDA AYU NURSANTI

NIP : 198012042006042025

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok :
1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
4. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
6. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
7. Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
8. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
10. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi : Melaksanakan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pembelian ATK untuk kebutuhan selama tahun n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan tahun n	laporan stock opname
2	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kegiatan pemenuhan barang cetakan maupun barang penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
3	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kegiatan untuk pemenuhan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan penyusunan laporan hasil rapat koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n	Laporan SPJ
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Memfasilitasi penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan stok opname
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang menjadi hak pegawai yang diberikan saat masuk kerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n	laporan SPJ

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kegiatan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
8	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kegiatan memfasilitasi pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kegiatan pemenuhan jasa komunikasi dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung agar berfungsi sebagaimana mestinya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi tahun n	Laporan SPJ
11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	kegiatan memelihara gedung kantor agar bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara pada tahun n	laporan SPJ
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya, serta pelunasan pajak dan surat ijinnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n	laporan SPJ
13	Terlaksananya pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja	persentase pelaksanaan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja	Indikator ini menggambarkan tingkat keterlaksanaan kegiatan pengukuran atau pemantauan terhadap seluruh indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Lembar Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dimaksud meliputi proses pengumpulan data, verifikasi, analisis, serta pelaporan capaian indikator sesuai periode yang ditetapkan.	Persentase Pengukuran Kinerja=Jumlah indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK / Jumlah indikator kinerja yang diukur ?x 100%	Dokumen Perjanjian Kinerja, laporan monev, laporan kinerja triwulan/tahunan,

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DINI NURFIBRIANY	1	NAMA	SUPRIYONO
2	NIP	198302272011012002	2	NIP	197010131992011001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Seksi Sosial dan Budaya	4	JABATAN	Camat Perak
5	UNIT KERJA	Seksi Sosial dan Budaya	5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	kuantitas	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	15 orang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	kuantitas	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 Dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat menghargai setiap orang dalam berinteraksi	

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: kompeten sesuai ekspektasi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu terbuka dalam bekerja sama

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DINI NURFIBRIANY
NIP : 198302272011012002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Budaya
Unit Kerja : Seksi Sosial dan Budaya

Rencana Hasil Kerja :
Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
Indikator :
1. Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Tribulan 1 :
Renaksi
1. Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Target : 4 Dokumen
Tribulan 2 :
Renaksi
1. Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Target : 4 Dokumen
Tribulan 3 :
Renaksi
1. Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Target : 4 Dokumen
Tribulan 4 :
Renaksi
1. Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Target : 4 Dokumen
2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkopimcam
Target : 1 Kegiatan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkopimcam
Target : 1 Kegiatan

Rencana Hasil Kerja :
Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Indikator :
1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Tribulan 1 :
Renaksi
1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Target : 15 Orang
Tribulan 2 :
Renaksi
1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Target : 15 Orang
Tribulan 3 :
Renaksi
1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Target : 15 Orang
Tribulan 4 :
Renaksi
1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Target : 15 Orang
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan sosial budaya
Target : 1 Kegiatan
3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial, kemiskinan, dan kesehatan
Target : 1 Kegiatan

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DINI NURFIBRIANY

NIP : 198302272011012002

Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Budaya

Tugas pokok :
1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pembinaan
4. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dalam rangka peningkatan layanan di bidang sosial budaya;
5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial budaya Kelurahan;
6. Melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang sosial budaya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Fungsi :
1. Dokumen subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya, pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya, administrasi di bidang sosial budaya, penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas
2. Laporan pemberian petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik
3. Laporan pemeriksaan kinerja bawahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk peningkatan kinerja
4. Laporan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya, pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya, administrasi di bidang sosial budaya, penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan
5. Laporan subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
6. Laporan subkegiatan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
7. Laporan subkegiatan administrasi di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
8. Laporan subkegiatan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
9. Laporan subkegiatan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
10. Laporan subkegiatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan
11. Laporan monitoring dan evaluasi bahan dan data di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
12. Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
13. Laporan monitoring dan evaluasi administrasi di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
14. Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
15. Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
16. Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan
17. Laporan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
----	-----------------------------------	--	------------------	---------------------	----------------	--------	-------------------------

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	4	Dokumen	Dokumen yang tersusun
2	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15	15	15	Orang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama	: DINI NURFIBRIANY
NIP	: 198302272011012002
Jabatan	: Kepala Seksi Sosial dan Budaya
Tugas pokok	: 1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sosial budaya; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; 3. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pembinaan 4. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dalam rangka peningkatan layanan di bidang sosial budaya; 5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial budaya Kelurahan; 6. Melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang sosial budaya; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah
Fungsi	: 1. Dokumen subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya, pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya, administrasi di bidang sosial budaya, penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas 2. Laporan pemberian petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik 3. Laporan pemeriksaan kinerja bawahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk peningkatan kinerja 4. Laporan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya, pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya, administrasi di bidang sosial budaya, penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan 5. Laporan subkegiatan bahan dan data di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 6. Laporan subkegiatan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 7. Laporan subkegiatan administrasi di bidang sosial budaya dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 8. Laporan subkegiatan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 9. Laporan subkegiatan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 10. Laporan subkegiatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan 11. Laporan monitoring dan evaluasi bahan dan data di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 12. Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 13. Laporan monitoring dan evaluasi administrasi di bidang sosial budaya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 14. Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 15. Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 16. Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan 17. Laporan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Orang

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

NO			PEGAWAI YANG DINILAI			NO			PEJABAT PENILAI KINERJA											
1			NAMA			DWINdra SETYO NUGROHO			1			NAMA			SUPRIYONO					
2			NIP			199109072015051001			2			NIP			197010131992011001					
3			PANGKAT/GOL. RUANG			Penata / III/c			3			PANGKAT/GOL. RUANG			Pembina Tingkat I / IV/b					
4			JABATAN			Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			4			JABATAN			Camat Perak					
5			UNIT KERJA			Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			5			UNIT KERJA			Kecamatan Perak					
HASIL KERJA																				
No		RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI					RENCANA HASIL KERJA					ASPEK		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU					TARGET	
(1)		(2)					(3)					(4)		(5)					(6)	
UTAMA																				
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					kuantitas		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)					78 lembaga kemasyarakatan	
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					kuantitas		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)					4 dokumen	
PERILAKU KERJA																				
1		Berorientasi Pelayanan																		
		• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti												Ekspektasi Khusus Pimpinan: -						
2		Akuntabel																		
		• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan												Ekspektasi Khusus Pimpinan: -						
3		Kompeten																		
		• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik												Ekspektasi Khusus Pimpinan: -						
4		Harmonis																		
		• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif												Ekspektasi Khusus Pimpinan: -						
5		Loyal																		

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DWINDRA SETYO NUGROHO
NIP : 199109072015051001
Pangkat/Gol Ruang : Penata / III/c
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Rencana Hasil Kerja :**
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Indikator :**
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)
- Tribulan 1 :**
Renaksi
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Desa Mantra tahun n+1
Target : 1 Kegiatan
2. fasilitasi usulan prioritas desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 13 usulan
3. verifikasi Usulan pembangunan desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 6 usulan
4. Melaksanakan kegiatan Pramusrenbangcam dan Musrenbangcam
Target : 2 Kegiatan
5. Evaluasi dan pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa
Target : 11 Dokumen
- Tribulan 2 :**
Renaksi
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Desa Mantra tahun n+1
Target : 1 Kegiatan
2. fasilitasi usulan prioritas desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 13 usulan
3. verifikasi Usulan pembangunan desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 6 usulan
4. Melaksanakan kegiatan Pramusrenbangcam dan Musrenbangcam
Target : 2 Kegiatan
5. Evaluasi dan pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa
Target : 13 Dokumen
- Tribulan 3 :**
Renaksi
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Desa Mantra tahun n+1
Target : 1 Kegiatan
2. fasilitasi usulan prioritas desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 13 Dokumen
3. verifikasi Usulan pembangunan desa tahun n+1 dalam SIPD
Target : 6 usulan
4. Melaksanakan kegiatan Pramusrenbangcam dan Musrenbangcam
Target : 2 Kegiatan
5. Evaluasi dan pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa
Target : 13 Dokumen
- Tribulan 4 :**
Renaksi
1. Monitoring Musdes penetapan Perdes APBDes
Target : 13 Dokumen
2. Mengevaluasi penyusunan Perdes APBDes
Target : 1 Dokumen
3. Mengkoordinasikan pengumpulan Perdes APBDes
Target : 13 Dokumen

- Rencana Hasil Kerja :**
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Indikator :**
1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)

Tribulan 1 :

Renaksi

- 1. Melakukan pengajuan pencairan dana transfer APBDesa tahun n
Target : 13 Kegiatan
- 2. Monitoring publikasi LRA APBDesa tahun n-1 dan APBDesa tahun n
Target : 18 Dokumen
- 3. Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Target : 1 Laporan

Tribulan 2 :

Renaksi

- 1. Melakukan pengajuan pencairan dana transfer APBDesa tahun n
Target : 13 Kegiatan
- 2. Monitoring publikasi LRA APBDesa tahun n-1 dan APBDesa tahun n Target
Target : 18 Dokumen
- 3. Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat Target
Target : 1 Laporan

Tribulan 3 :

Renaksi

- 1. Melakukan pengajuan pencairan dana transfer APBDesa
Target : 13 Kegiatan
- 2. Monitoring publikasi LRA APBDesa tahun n-1 dan APBDesa tahun n
Target : 18 Dokumen
- 3. Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Target : 1 Laporan

Tribulan 4 :

Renaksi

- 1. Pembinaan rutin TP-PKK (pleno rutin)
Target : 1 Dokumen
 - 2. Monitoring dan evaluasi administrasi TP-PKK Desa
Target : 13 TP PKK Desa
 - 3. Koordinasi dan pembinaan BUMDes
Target : 1 Dokumen
 - 4. Monitoring dan evaluasi administrasi BUMDes
Target : 13 BumDesa
-

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DWINDRA SETYO NUGROHO
NIP : 199109072015051001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas pokok : -
Fungsi : -

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78	78	78	Lembaga	ndikator ini menggambarkan tingkat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Semakin banyak lembaga yang terlibat, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan sinergi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, indikator ini juga mengukur efektivitas peran Kasi PMD sebagai fasilitator dan penggerak pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	4	Dokumen	ndikator ini menggambarkan tingkat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Semakin banyak lembaga yang terlibat, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan sinergi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, indikator ini juga mengukur efektivitas peran Kasi PMD sebagai fasilitator dan penggerak pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DWINDRA SETYO NUGROHO
NIP : 199109072015051001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas pokok :
Fungsi :

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasi PMD berperan sebagai fasilitator, pembina, dan pengendali kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan	artisipasi lembaga dapat dibuktikan melalui: Daftar hadir, berita acara, dokumentasi kegiatan, Surat tugas atau undangan resmi, Laporan hasil kegiatan pemberdayaan.	Sumber Data Laporan kegiatan Seksi PMD Berita acara dan daftar hadir kegiatan pemberdayaan Dokumentasi kegiatan (foto, undangan, laporan) Rekap partisipasi lembaga masyarakat dari des
2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) adalah pejabat struktural pada Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang mencakup pembinaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan, fasilitasi pembangunan desa, serta pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasi PMD berperan sebagai fasilitator, pembina, dan pengendali kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan	Laporan kegiatan Seksi PMD Berita acara dan daftar hadir kegiatan pemberdayaan Dokumentasi kegiatan (foto, undangan, laporan) Rekap partisipasi lembaga masyarakat dari desa	Laporan kegiatan Seksi PMD Berita acara dan daftar hadir kegiatan pemberdayaan Dokumentasi kegiatan (foto, undangan, laporan) Rekap partisipasi lembaga masyarakat dari desa

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DWINDRA SETYO NUGROHO	1	NAMA	SUPRIYONO
2	NIP	199109072015051001	2	NIP	197010131992011001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	JABATAN	Camat Perak
5	UNIT KERJA	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	kuantitas	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat menghargai setiap orang dalam berinteraksi		
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: kompeten sesuai ekspektasi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu terbuka dalam bekerja sama

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DWINDRA SETYO NUGROHO
NIP : 199109072015051001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas pokok : -
Fungsi : -

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	12	Dokumen	Indikator ini mencerminkan fungsi koordinatif dan kolaboratif Kasi Trantib sebagai pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Selain mudah diukur dan diverifikasi, indikator ini menunjukkan tingkat sinergitas antar-lembaga yang berdampak langsung terhadap ketertiban masyarakat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : DWINDRA SETYO NUGROHO
NIP : 199109072015051001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas pokok :
Fungsi :

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah kerja kecamatan. Kasi Trantib bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tentram melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah desa/kelurahan. Pelaksanaan tugas Kasi Trantib meliputi kegiatan penegakan peraturan daerah, operasi penertiban, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan yang disusun dalam penyelenggaraan Sinergi dengan Instansi Terkait	Data Laporan Penyelenggaraan yang diupload pada link cloud

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas pokok :
Fungsi :

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Laporan Peningkatan Efektivitas Pelayanan adalah dokumen formal yang menggambarkan: 1. Upaya kecamatan dalam meningkatkan kualitas layanan (misalnya pelayanan administrasi, surat menyurat, rekomendasi, layanan terpadu, inovasi pelayanan). 2. Evaluasi terhadap standar pelayanan, SOP, waktu layanan, dan kendala. 3. Rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Dokumen yang difasilitasi adalah dokumen resmi yang disusun oleh desa dengan pendampingan atau verifikasi dari Kecamatan, meliputi: 1. Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa, seperti: • RKP Desa • APBDes • Perubahan APBDes • Laporan Realisasi APBDes • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2. Dokumen Pengelolaan Aset Desa, seperti: • Buku Inventaris Aset Desa • Kartu Inventaris Aset • Berita Acara Pendayagunaan/Pemanfaatan Aset	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n	- Laporan Pengelolaan Keuangan Desa - Laporan Aset Desa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas pokok :
Fungsi :

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang dimaksud mencakup dokumen strategis dan teknis yang disusun oleh perangkat daerah, antara lain: 1. Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis 5 tahunan). 2. Renja Perangkat Daerah (Rencana Kerja tahunan). 3. Rencana Aksi (Action Plan) bidang tertentu (misalnya RB, SPIP, ZI, dll) jika menjadi kewajiban perencanaan perangkat daerah. 4. Dokumen pendukung lainnya seperti RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan dokumen evaluasi perencanaan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n	Dokumen Perencanaan PD
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah jumlah total dokumen laporan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat pencapaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan. Laporan ini disusun secara periodik setiap triwulan serta tahunan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan merupakan hasil koordinasi serta fasilitasi penyusunan oleh perangkat daerah yang berwenang.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun n	Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah yang mendapatkan pembayaran gaji pokok serta tunjangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hak kepegawaiannya dalam tahun anggaran berjalan (tahun n).	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	Dokumen gaji dan tunjangan ASN

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan jumlah keseluruhan dokumen administrasi keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran berjalan (tahun n). Dokumen ini mencerminkan proses pencatatan, pengujian, serta verifikasi terhadap setiap pengeluaran anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan jumlah keseluruhan dokumen administrasi keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran berjalan (tahun n). Dokumen ini mencerminkan proses pencatatan, pengujian, serta verifikasi terhadap setiap pengeluaran anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n	Laporan Keuangan Perangkat Daerah

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas pokok : -
Fungsi : -

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ditetapkan sebanyak 12 laporan pelaksanaan pelayanan setiap bulan baik pelayanan kependudukan (KK, KTP, perekaman dan surat pindah), perizinan (ijin keramaian dll) maupun non perizinan (SKCK, SKM, Waris, Dispensasi nikah dll)
2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26	26	26	dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 26 dokumen 13 dokumen keuangan desa dari 13 desa dan 13 dokumen pendayagunaan aset desa dari 13 desa

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas pokok : -
Fungsi : -

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	dokumen	Target 2025 didasarkan pada jumlah dokumen Renja 2026 dan Renja P-2025 dan Renstra 2025-2029
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	Laporan	Target 2025 didasarkan pada jumlah laporan LKJIP Kec. Perak Tahun 2023 dan Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tribulan 1, 2, 3, dan 4
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	14	Orang/bulan	Pada tahun 2025 ditetapkan target 14 orang/bulan karena jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 14 orang
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	Dokumen	Pada tahun 2025 ditetapkan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	Laporan	Target 2025 didasarkan pada Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan sebanyak 1 laporan

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Pangkat/Gol Ruang : Penata / III/c
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Unit Kerja : Seksi Tata Pemerintahan

Rencana Hasil Kerja :
Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat
Indikator :
1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
Tribulan 1 :
Renaksi
-
Tribulan 2 :
Renaksi
-
Tribulan 3 :
Renaksi
-
Tribulan 4 :
Renaksi
1. Mengkoordinasikan media pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor
Target : 1 Laporan
2. Mengkoordinasikan pengelolaan media informasi PATEN yang jelas dan mudah dimengerti
Target : 1 Laporan
3. Melakukan rapat koordinasi Tim PATEN
Target : 1 Laporan
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey IKM kepada masyarakat pengguna layanan
Target : 1 Laporan
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat tahun n
Target : 1 Laporan
6. Mengkoordinasikan laporan tindak lanjut skm tahun n-1
Target : 1 Laporan
7. Melakukan Evaluasi atas hasil penilaian PEKPP tahun n
Target : 1 Laporan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rumah bersama
Target : 1 dokumen
9. Memverifikasi Pengajuan dokumen kependudukan (KK,KTP,Surat Pindah)
Target : 3 Laporan
10. Memverifikasi pengajuan legalisasi surat-surat (surat keterangan waris, SKCK)
Target : 3 Laporan
11. Memberikan reward and punishment petugas pelayanan
Target : 1 dokumen
12. Menyusun laporan delegasi sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
Target : 1 Laporan
13. Menyusun laporan delegasi sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
Target : 1 Laporan

Rencana Hasil Kerja :
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator :
1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)
Tribulan 1 :
Renaksi
-
Tribulan 2 :
Renaksi
-
Tribulan 3 :
Renaksi

-

Tribulan 4 :
Renaksi

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APBDes

Target : 1 Laporan

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa

Target : 1 Laporan

3. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi APBDes

Target : 1 Laporan

4. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa

Target : 1 Laporan

5. menyusun laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa

Target : 1 Laporan

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAGUS RACHMAT
NIP : 198509282005011001
Pangkat/Gol Ruang : Penata / III/c
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Unit Kerja : Seksi Tata Pemerintahan

Rencana Hasil Kerja :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tribulan 1 :
Renaksi

-
Tribulan 2 :
Renaksi

-
Tribulan 3 :
Renaksi

-
Tribulan 4 :
Renaksi
1. Melaksanakan rapat persiapan penyusunan Ranwal Renja Tahun n+2
Target : 1 kegiatan
2. Melakukan Penyusunan Ranwal Renja Tahun n+2
Target : 1 dokumen

Rencana Hasil Kerja :
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator :
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tribulan 1 :
Renaksi

-
Tribulan 2 :
Renaksi

-
Tribulan 3 :
Renaksi

-
Tribulan 4 :
Renaksi

Rencana Hasil Kerja :
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator :
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tribulan 1 :
Renaksi

-
Tribulan 2 :
Renaksi

-
Tribulan 3 :
Renaksi

-
Tribulan 4 :
Renaksi
1. Mengkoordinasikan dengan bendahara terkait pembayaran gaji dan tunjangan ASN

- Target : 6 kegiatan
2. Mengevaluasi dokumen pengajuam gaji dan tunjangan
- Target : 6 dokumen
3. Membuat dan menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPD) Gaji dan Tunjangan
- Target : 6 dokumen

Rencana Hasil Kerja :
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator :
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tribulan 1 :
Renaksi
-

Tribulan 2 :
Renaksi
-

Tribulan 3 :
Renaksi

Tribulan 4 :
Renaksi
1. Melaksanakan penatausahaan keuangan (pelaksana teknis kegiatan)

Target : 9 dokumen

2. Membuat dan menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPD)

Target : 9 dokumen

Rencana Hasil Kerja :
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator :
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tribulan 1 :
Renaksi
-

Tribulan 2 :
Renaksi

Tribulan 3 :
Renaksi

Tribulan 4 :
Renaksi

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAGUS RACHMAT	1	NAMA	SUPRIYONO
2	NIP	198509282005011001	2	NIP	197010131992011001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	4	JABATAN	Camat Perak
5	UNIT KERJA	Seksi Tata Pemerintahan	5	UNIT KERJA	Kecamatan Perak
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	kuantitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kuantitas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAGUS RACHMAT	1	NAMA	ABDUL WAKHID
2	NIP	198509282005011001	2	NIP	196812011994031006
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d
4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	4	JABATAN	Sekretaris Kecamatan Perak
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kuantitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
3	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	kuantitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang
4	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kuantitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
5	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	
2	Akuntabel				

PERILAKU KERJA		
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
3	Kompeten	
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat menghargai setiap orang dalam berinteraksi
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: kompeten sesuai ekspektasi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu terbuka dalam bekerja sama